

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA OLEH NEGARA-NEGARA ASEAN MELALUI AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*)



Oleh

**NURCHALIS
NIM B 111 06 269**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
MAKASSAR
2013**

(Halaman Judul)

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA OLEH
NEGARA-NEGARA ASEAN MELALUI AFAS
(*Asean Framework Agreement on Service*)**

Oleh

**NURCHALIS
NIM B 111 06 269**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA OLEH NEGARA- NEGARA ASEAN MELALUI AFAS (Asean Framework Agreement on Service)

Disusun dan diajukan oleh :

NURCHALIS
NIM B 111 06269

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 8 maret 2013
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H
NIP. 19631028 199002 1 001

Maskun, S.H.,LLM
NIP. 19761129 1999 03 1 005

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : **NURCHALIS**
Nomor Induk : **B 111 06 269**
Bagian : **HUKUM INTERNASIONAL**
Judul : **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA
OLEH NEGARA-NEGARA ASEAN MELALUI AFAS
(*ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICE*)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 24 Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Juajir sumardi, S.H.,M.H
NIP. 19631028 199002 1 001

Maskun, S.H.,LLM
NIP. 19761129 1999 03 1 005

ABSTRAK

Nurchalis (B11106269), Analisis Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan Jasa Oleh Negara-Negara Asean Melalui AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*), dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Maskun.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana negara-negara anggota AFAS memberlakukan Negara-Negara dalam lingkup GATS dan bagaimana implikasinya, dan bagaimana AFAS dapat diterapkan efektif terhadap Negara-Negara peserta, dalam Hal ini Negara-Negara Asean serta untuk mengetahui sejauh mana AFAS dapat mempengaruhi industri jasa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* (mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku, perjanjian internasional, hasil seminar, surat, bahan-bahan dari internet, serta bahan kepustakaan lain) serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian, baik itu data primer, maupun sekunder yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif untuk kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut 1). Aturan-aturan perdagangan jasa regional dilakukan dengan menabrak prinsip-prinsip umum yang biasa berlaku di WTO, seperti prinsip Non diskriminasi dan *National Treatment*. Namun aturan yang dibuat di GATS yang memayungi perdagangan jasa dibuat dengan memperlonggar pemberlakuan prinsip tersebut. 2). bahwa dalam AFAS sendiri menerapkan prinsip MFN (*Most Favoured Nation*), *Non Discriminative*, *Transparency*, dan *Progressive Liberalisation* yang dijabarkan dalam mekanisme pelaksanaan AFAS. Mekanisme AFAS dilaksanakan dengan melaksanakan serangkaian negosiasi dibawah ASEAN *Cordinating Committee on Service* (CCS), yang mengkordinasi kan 6 kelompok kerja sektor jasa, yaitu bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. 3). industri jasa Indonesia berkembang sangat pesat di bawah AFAS. pada tahun 2007 nilai kontribusi sektor jasa terhadap PDB Indonesia kurang lebih mencapai 43%. Hal ini salah satu petunjuk bahwa sektor perdagangan jasa di Indonesia berkembang cukup pesat dan berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri

Oleh karena itu kemudian penulis memberikan saran, 1) ASEAN perlu mengakomodasi Negara-negara yang berada diluar konteks ASEAN, dengan semakin memperbanyak kerjasama antara ASEAN dengan Negara-negara mitra diluar ASEAN (*Kerjasama External*). 2) Negara Negara ASEAN agar lebih aktif untuk memperbaiki sektor jasa dalam negeri mereka agar mereka secara bertahap dapat mengurangi

jumlah MFN list yang diajukan dalam komitmen MFN AFAS mereka. Kemudian dalam pelaksanaan mekanisme AFAS, hendaknya Negara-negara ASEAN lebih berpartisipasi Aktif untuk lebih berusaha dalam memenuhi semua target tenggang waktu yang telah ditetapkan dan bersaing dengan penyedia jasa asing. 3) satu satunya hal yang harus dilakukan adalah dengan mempersiapkan sektor-sektor jasa yang akan diliberalisasi dengan sebaik mungkin. Sektor-sektor yang diliberalisasi harus mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pemerintah

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji atas kehadiran Allah subhana wata'alah, atas rahmat, kesehatan dan kemudahan yang Dia berikan selama ini atas penulis, baik itu dalam kehidupan penulis, hingga dalam menyelesaikan masa studi penulis.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Pertama tama, penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua penulis, ibu saya Andi Saida yang telah sangat sabar memfasilitasi dan memotivasi penulis selama masa kuliah untuk bekerja keras dan segera menyelesaikan studi penulis. Kemudian kepada ayah saya Abd Hamid K, yang telah mendidik dan menyayangi dan memberikan keleluasaan untuk menentukan jalan penulis hingga dewasa. Selanjutnya, ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi, SP.B. Sp. BO beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DFM beserta jajarannya. Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H, Dr Anshori Ilyas, S.H.,M.H, dan bapak Romy Librayanto, S.H.,M.H. kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami selama ini.

3. Pembimbing I penulis, Prof.Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan terhadap segala keperluan perbaikan dan proses Ujian penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada pembimbing II penulis, Maskun S.H.,LLM, Terimakasih atas kesabaran beliau untuk “diganggu” baik itu siang maupun malam selama ini dalam proses konsultasi dan penyempurnaan skripsi penulis.
5. Kepada tim penguji skripsi penulis, Dr. Laode Abdul Gani, Prof.Dr. Muh Ashri, S.H.,M.H (satu satunya yang selalu bersedia membawa skripsi penulis yang super tebal) dan ibu Birkah Latif S.H.,M.H (meskipun sebagai penguji, namun bantuan ibu sangat banyak, mulai dari saat saya memasukkan judul, sampai proses pengujian, terima kasih bu’) kami ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktunya untuk mempelajari dan menguji coretan coretan penulis dalam skripsi ini kemudian menguji hasil tulisan kami.
6. Kepada pihak pihak yang menjuadi tempat dalam penelitian penulis, Pihak Kementerian Luar Negeri, Kementrian Perdagangan dan perindustrian, dan perpustakaan nasionaldi Jakarta. Terimakasih atas keramahan dan sikap koorperatif yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan pencarian data di area yang sangat asing bagi penulis. Juga kepada Ibu Haerana, kepala ruang baca Fakultas Hukum, atas kerammahan dan buku buku syang sering saya pinjam, serta Koran-koran yang selama ini dapat saya baca secara gratis.
7. Ketua bagian Hukum Internasional, Prof.Dr. SM Noor, S.H.,M.H, beserta dosen dosen bagian, Pak judhariksawan, pak Lakollo, Ibu iin (wakil ketua

bagian yang paling sering saya mintai tandatangan), ibu Birkah (dosen paling ramah dan gaul di bagian..hhe) serta dosen dosen HI lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu satu.

8. Kepada penasihat akademik penulis, pak Arman Mattono S.H.,M.H. terimakasih atas bimbingan dan nasihatnya dalam bidang akademik yang diberikan selama penulis menempuh masa studi.
9. Kepada dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini menjadilah satu sumber ilmu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, alm Prof.Dr Achmad Ali S.H.,M.H, Prof.Dr. Musakkir bado S.H.,M.H, Ismail arlif S.H.,M.kn, Prof,Dr. Arfin Hamid S.H.M.H (dosen yang selalu”merasa” muda hhe) Prof Syamsul Bachri, prof Razak, dan segenap dosen dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu satu.
10. Kepada seluruh staf Akademi, Pak bunga (terima kasih atas keramahannya selama ini pak, kita mi juaranya, cari satu duaji ki’ sama pegawai bank..hhe) pak usman (sebagai yang pegang 2006) ibu Sri’, pak Ramalang dan seluruh staf akademik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu satu.
11. Andi Kurniasari ☺
12. Kepada seluruh keluarga saya, kakak saya, saudara satu satunya Nasruddin, ponakan ponakan saya yang belum pernah saya lihat secara langsung, sepupu-sepupu terdekat saya, Sibghatullah Mujaddid, Anna Maria, dan juga brotha Nurul hadi alias ucok yang telah bersedia dijadikan kosannya waktu di Jakarta jadi markas waktu penelitian, terimakasih jalan jalannya tawaf

keliling mall..hhi, panduannya tentang jakarta dan Busway, serta airplane ticketnya juga..hhehe I will never forget that brow. ☺

13. Sahabat sahabat terbaik penulis dalam hidup, Aljamaah Albokepers...hhehe. Danil Ramadhani Tawaduude, Andy Iskandar, Sky, Opik (sekjen albokepers..hha), Tom (ketua deawan pembina..ckck), Shara, Eta', April, Tari, Erna. We Are....emm..apa yah...hhehe.
14. Kawan kawan ILSA generasi ke II, Rai Hasni, kadar, omeh, akbar, K' yayan, ka' kartini, ka' cullu' dan lain lainnya, our fought, experience was unforgettable....
15. Keluarga saya di UKM Karate-do Gojukai Fakultas Hukum Unhas, Mansur, dito', Pute', Fitri, Mula', etc (and all 06 era) ,Ijah, Arlis, Asni, Dian, Eka, Eki, Fanni, Icha bonding hhe, Ifa, Lily, Tiwi, Tri, Suci, Anna, Nia, Niya, Udpa, Ari, etc (and all 08 era), Nila, Icha kurus, Afli, Nita, Diya, Mely, Rudi, dan segenap keluarga besar Gojukai Fakultas Hukum Unhas yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang semuanya telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unhas
16. Saudara saudaraku di Ma'had Mahasiswa Makassar, liqo' dan Kammi, akh Hendra, Fikar, Arfa ka' Muslim, ka' aziza, ka' a'la una, dan kawan kawan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
17. Kawan kawan UKC, ka' Ridha beserta meja laptop dan sepatunya...hhe, yudi, Aspar, Ono, Hartati, Niar, Iskandar, ka' karman, hingga seluruh generasi UKC ke atas..We are always the best fighter...

18. KKN Tanete Crew. Sabirin, Heri, Indah, Iin, Wina, Dilla, Rini, Ira,
unforgettable two month between us thanks all brow.
19. Kawan kawan Examinasi 06, Ahmad, Nasir, budi, dedi ingga, marwan, serta
seluruh anak 06 yang berjumlah sekitar 320an orang....
20. Kepada Muthmainnah AR/ inna, terimakasih atas FD nya yang jadi tempat
penyimpanan data terakhirku (ini skripsi gak akan bisa dijilid kalo gak ada
itu data hhe..thanks ☺), juga kepada seluruh kawan kawan yang berperan
melancarkan penulisan dan perampungan proses studi penulis yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Abstrak	iv
Ucapan Terimakasih	vi
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
 BAB I	
 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti	10
 BAB II	
 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Liberalisasi Perdagangan	12
1. Konsep Liberalisasi perdagangan	12
2. Perkembangan Liberalisasi perdagangan	15
3. Pro kontra mengenai liberalisasi	28
B. <i>World Trade Organization</i> (WTO)	31
1. Sejarah singkat GATT.....	32
2. Sejarah WTO.....	34
3. Struktur organisasi WTO	43
4. Fungsi WTO.....	44
5. Aturan Hukum perdagangan Pasca Uruguay round WTO.....	45
C. <i>General Agreement Tariff on Service</i> (GATS).....	54
1. Ruang Lingkup GATS	54
2. Aturan Pokok GATS	63

3. Implikasi Pelaksanaan GATS	71
4. Penyelesaian Sengketa	72
D. <i>Association of South East Asian Nation (ASEAN)</i>	77
1. Struktur Organisasi ASEAN	79
2. Tujuan dan Prinsip ASEAN	81
3. Asea Economic Community (AEC).....	85
E. <i>ASEAN Framework Agreement on Service(AFAS)</i>	89
1. Cetak biru Sektor Jasa MEA	92
2. Prinsip-Prinsip AFAS.....	93
3. Mekanisme AFAS	94
4. Perkembangan Liberalisasi empat sektor Jasa Prioritas.....	96
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	106
B. Jenis dan Sumber Data	106
C. Teknik Pengumpulan Data	107
D. Analisis Data	107
BAB IV	
PEMBAHASAN	
A. Status AFAS terhadap aturan aturan GATS	108
1. AFAS sebagai bagian regionalisme ekonomi	110
2. Analisis posisi AFAS sebagai bagian regionlisme ekonomi terhadap aturan GATS/ WTO	129
3. Perbandingan Komitmen Negara ASEAN untuk AFAS dan GATS	136
B. Penerapan prinsip dan mekanisme AFAS terhadap negara-negara ASEAN	156
1. Penerapan prinsip AFAS.....	157
2. Penerapan mekanisme AFAS.....	163
C. Dampak liberalisasi perdagangan jasa oleh AFAS terhadap industry	

jasa di Indonesia.....	216
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	232
A. KESIMPULAN.....	232
B. SARAN	236
Daftar Pustaka	238

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel. 1. Pra kondisi integrasi ekonomi	120
Tabel 2. Subsector File Transfer Service.....	142
Tabel 3. Electronic Mail Service	143
Tabel 4. Internet Acces Service	144
Tabel 5. Telegraph Service	145
Tabel 6. Local Service: Telecomfrencing Service	146
Tabel 7. Voice Mail Service	147
Tabel 8. Neraca Pembayaran Indonesiatransaksi Berjalan jasa-Jasa (Juta USD).....	228

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar . 1 : Nilai kontribusi sektor jasa terhadap PDB Negara-negara anggota Asean.....	220
Gambar. 2 :Jumlah Ekspor dan Impor Sektor Jasa Asean	221
Gambar. 3: Nilai Kontribusi Ekspor dan Impor Sektor Jasa ASEAN terhadap Dunia	221
Gambar . 4: Nilai Ekspor perdagangan bidang Jasa ASEAN tahun 2007	222

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap munculnya ancaman-ancaman internal dan eksternal yang berpotensi timbul di kawasan ini kemudian mengilhami negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah dalam menghadapi bersama-sama berbagai tantangan-tantangan terhadap kawasan tersebut dimasa datang. Hal ini juga sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kerja sama bilateral maupun regional antar negara-negara Asia Tenggara.

Melalui lima negara sebagai *founding father*, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura maka pada bulan agustus 1967 didirikanlah suatu wadah tersebut yang dinamakan “Association South East Asian Nation” yang selanjutnya disingkat ASEAN. ASEAN merupakan hasil dari Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 agustus 1967, yang hingga saat ini (2011), jumlah anggota Asean telah bertambah menjadi sepuluh anggota setelah Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999) bergabung menjadi anggota ASEAN

Banyak kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kurun waktu pendiriannya sejak tahun 1967 hingga saat ini, Mulai dari kerjasama dibidang keamanan, sosial hingga kerjasama dibidang ekonomi.

Khusus dibidang ekonomi, kebijakan liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN telah banyak menyita perhatian para ahli hukum internasional di kawasan ini, karena merupakan isu krusial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Liberalisasi perdagangan merupakan isu yang kontroversial dalam dinamika perdagangan internasional seiring dengan pro dan kontra terhadap manfaat dan kesiapan negara-negara berkembang dalam persaingan dengan negara maju dalam perdagangan bebas itu. Dalam tulisan ini kemudian lebih fokus mengupas mengenai liberalisasi di bidang Jasa.

Sebelum lebih jauh berbicara mengenai pro dan kontra mengenai paham liberalisasi, ide liberalisasi perdagangan jasa di kawasan negara-negara ASEAN itu sendiri bermula dari hasil Pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok, Thailand 1995 yang melahirkan *Asean Framework Agreement on Service* (AFAS) sebagai landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia Jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan bidang jasa, telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand⁸.

Selain itu, juga ada penandatanganan *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, ada juga KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 yang telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" dan Pada

⁸ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7

KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, yang menyepakati *Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint)*.

Kesepakatan-Kesepakatan inilah yang selanjutnya sebagai latar belakang dari pembentukan aturan-aturan AFAS yang kemudian menjadi satu bingkai dalam suatu komunitas Ekonomi antara negara-negara ASEAN. AFAS sendiri merupakan salah satu bagian penting dari hasil pertemuan negara-negara Asean dalam rangka menuju cita-cita asean untuk mencapai integrasi regional dibidang ekonomi dan perdagangan dalam kerangka AEC (*Asean Economic Comuunity*). Hal ini disebabkan pertemuan-pertemuan sebelumnya lebih banyak berbicara dan membahas mengenai penghapusan hambatan-hambatan dibidang perdagangan barang. Begitupun dengan jumlah literatur-literatur ilmiah, lebih banyak menyoroti perdagangan yang menyangkut dengan barang, dibandingkan membahas mengenai penghapusan hambatan dibidang jasa.

Dalam lingkup yang lebih luas sebelumnya, telah ada instrumen yang mengatur mengenai penghilangan hambatan perdagangan atau liberalisasi dibidang jasa dalam konteks *World Trade Centre* (selanjutnya disingkat WTO). Instrument tersebut biasa dikenal dengan nama *General Agremeent Tarrif on Service* (selanjutnya disingkat GATS). Pengaturan mengenai GATS ini sendiri terdapat dalam Annex 1b dari Piagam WTO, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO itu sendiri. Karena itu, lingkup keberlakuan dari GATS tersebut mencakup negara-negara anggotanya dari seluruh dunia.

ASEAN kemudian memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai kerjasama di bidang jasa, terutama dalam menghadapi perdagangan di bidang jasa yang semakin mendunia, khususnya setelah Perundingan putaran Uruguay berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingannya yang bermuara pada disepakatinya GATS⁹.

Khusus di sektor Jasa, bidang ini memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sektor ini rata-rata menyumbang 40% - 50% Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN sehingga dinilai memiliki peran strategis dalam perekonomian ASEAN. Sektor ini juga merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan ASEAN. Gambaran singkat tadi tentang instrumen-instrumen yang dibuat untuk membentuk perdagangan bebas di dunia, maupun di ASEAN, memperlihatkan bagaimana begitu bersemangatnya negara-negara di dunia berusaha meliberalisasi sektor perdagangan.

Tentu saja telah menjadi polemik pro dan kontra, secara khusus bagi negara-negara ASEAN, bahwa benarkah liberalisasi perdagangan dapat memberikan manfaat terhadap neraca perdagangan negara-negara berkembang? Bagi negara-negara pelaku liberalisasi memberikan argumentasi bahwa liberalisasi dapat meningkatkan transaksi perdagangan dengan negara-negara lain, serta akan memperluas dan mempermudah pemasaran dari produk industri dalam negerinya yang kemudian dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyerahan proses perdagangan terhadap mekanisme pasar seperti ini akan bermanfaat terhadap peningkatan ekonomi

⁹ *Ibid*, hlm 6

negara. Tapi benarkah hal seindah itu yang akan terjadi? Jawabannya tentu saja iya, bila negara tersebut benar-benar siap bersaing, baik dalam hal sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya manusia. Namun skenario terburuk yang dapat terjadi adalah negara tersebut justru akan menjadi pasar dari produk-produk asing, dan industri dalam negeri akan mati secara perlahan karena produknya kalah bersaing dengan produk-produk impor dari negara lain.

Paham liberalisasi perdagangan berkembang dengan pesat di Eropa sejak abad 19. Pada priode perdagangan bebas 1815-1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan linberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif, bahwa suatu negara akan menghususkan diri pada produksi dan ekspor, sebab negara tersebut mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya¹⁰.

Teori yang di kemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*the wealth of nation*” membantah pendapat dari kaum merkantilistis yang mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara efesien, sehingga kesejahteraan yang akan di capai akan lebih optimal¹¹.

¹⁰ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.31

¹¹ *Ibid*, hlm 31-32

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa WTO, AFTA maupun AEC lebih cenderung mengarahkan sistem ekonomi ke arah liberalisme ala Adam Smith, meskipun hal ini tidak sepenuhnya, sebab dalam beberapa situasi masih diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan yang bersifat sementara. Namun lebih dari itu, tetap saja hal ini menuai pro dan kontra, optimis dan pesimis dalam menghadapi liberalisme perdagangan ini.

Pandangan pesimis ini timbul sebab adanya perbedaan kekuatan ekonomi antara negara-negara di dunia. Negara-negara maju mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Negara-negara maju melalui kegiatan yang bersifat multinasional telah menguasai teknologi, dana dan jaringan industri serta perdagangan dunia, sedangkan negara berkembang relatif masih tergolong miskin. Kesepakatan dikhawatirkan akan dapat merugikan negara berkembang terutama dalam masalah produksi dan perdagangan komoditi pertanian, industri dan jasa. Hal ini dapat terjadi karena produk-produk tersebut di negara berkembang masih merupakan masalah besar dan belum efisien, baik karena rendahnya kemampuan teknologi maupun karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Di sisi lain, perdagangan bebas akan menyebabkan penyerbuan produk negara-negara maju yang di pasarkan di negara-negara berkembang karena kualitasnya dan teknologinya baik, harganya lebih murah. Lebih lebih pemasaran tersebut dilakukan di Indonesia sebagai salah

satu negar yang sangat padat penduduknya dengan prilaku yang sangat konsumtif¹².

Dari pemaparan di atas, dalam konteks ASEAN, maka yang dapat kita pertanyakan adalah bagaimanakah kesiapan masing-masing negara untuk menghadapi liberalisasi ini? terkhusus mengenai bagaimana kesiapan Indonesia? Lebih khusus lagi bagaimana sektor jasa Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan bebas tersebut??

Dalam bentuk yang ideal, liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas untuk menjual jasa melampaui batas wilayah negaranya. Ini berarti termasuk didalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain dan bagi individu untuk bekerja di negara lain. Terlepas dari munculnya kekhawatiran akan munculnya “neo –liberalisme” dan neo-neo yang lainnya, liberalisasi perdagangan jasa muncul karena beberapa fakta¹³.

Pertama, perang Dunia I dan II terjadi akibat perang dagang antar negara. Perang dagang itu sendiri terjadi karena dianutnya doktrin merkantilisme yang mengajarkan bahwa kemajuan sebuah negara akan terjadi jika mampu meningkatkan ekspor semaksimal mungkin dan menekan impor seminimal mungkin. Doktrin ini mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang bersifat protektif.

¹² *Ibid*, hlm 253-254

¹³ Basuki Antariksa, “Pengaruh Liberalisasi perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makalah, 29 Juli, 2010,

Kedua, paham kapitalisme yang mendorong penumpukan kekayaan sebanyak-banyaknya. Paham ini melahirkan perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi usaha ke berbagai negara untuk meningkatkan keuntungan secara berkesinambungan. Lebih jauh lagi, fenomena ini kemudian melahirkan praktek *Foreign Direct Investment* (FDI).

Ketiga, negara sedang berkembang sendiri seperti Indonesia memiliki kebutuhan untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain, misalnya ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka negara sedang berkembang juga menghendaki agar negara mitra dagangnya menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan jasa.

Perdebatan mengenai seberapa besar manfaat dan kerugian liberalisasi perdagangan jasa hingga kini masih terus berlangsung. Para pendukung konsep ini berpendapat bahwa sebuah negara akan mendapat keuntungan dari liberalisasi perdagangan jasa melalui; peningkatan FDI, Kesempatan kerja dan berusaha di luar negeri dan mendorong terpeliharanya perdamaian dunia. Liberalisasi perdagangan jasa dianggap sebagai tenaga pendorong bagi setiap negara untuk melakukan spesialisasi di bidang perdagangan yang di kuasanya sehingga akan terjadi peningkatan volume perdagangan antar negara dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dunia. Konsep ini juga dianggap akan semakin meningkatkan saling ketergantungan diantara negara-negara, sehingga mencegah terjadinya konflik antar mereka.

Sementara itu, bagi para pendukung anti-globalisasi, liberalisasi perdagangan jasa dianggap sebagai “kendaraan” baru bagi negara maju untuk menjajah negara sedang berkembang. Mereka juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang absolute mengenai hubungan yang positif antara kebijakan liberalisasi perdagangan jasa dengan tingkat kemajuan sebuah negara. Beberapa diantara mereka, seperti Dani Rodrik, Ha-Joon Chang, dan Martin Khor, juga menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan justru semakin meningkatkan ketergantungan negara sedang berkembang kepada negara maju dan menghambat proses pembangunan.

Dari uraian dengan beberapa argumentasi, terlihat sekilas gambaran mengenai ASEAN dengan rencana-rencana ekonominya beserta proyek liberalisasi dengan pro dan kontra mengenai liberalisasi itu sendiri. Namun dengan semua perdebatan ini, Perdagangan Bebas tersebut tak dapat lagi di hindari. Indonesia telah menjadi bagian GATT sejak tahun 1950 hingga menjadi WTO serta Bagian dari . Dalam cakupan yang lebih khusus ASEAN, Indonesia adalah bagian dalam kesepakatan mengesahkan AFAS dalam KTT ke 5 ASEAN di Bangkok pada 15 Desember 1995, sehingga hal yang lebih esensial difikirkan saat ini adalah bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan (jasa) ASEAN, bagaimana menghadapinya dengan segala macam aturannya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan dalam bidang jasa ASEAN serta Kesiapan dalam hal ini AFAS perangkat hukum utamanya.

Bagi negara di wilayah Asia pasifik, termasuk Asean, masa depan yang lebih menguntungkan adalah sistem internasional yang tetap terbuka. Upaya untuk tetap menjamin keterbukaan sistem perdagangan merupakan pilihan yang paling mantap untuk menjamin masa depan negara Asia pasifik termasuk negara ASEAN, karena dengan demikian strategi untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dan strategi untuk mencapai tujuan program pembangunan yang mantap melalui kegiatan yang berorientasi ekspor akan terjamin¹⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status AFAS terhadap aturan GATS (*General Agreement on Trade Service*)/ WTO?
2. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip dan Mekanisme AFAS terhadap Negara-Negara ASEAN ?
3. Sejauh mana Liberalisasi perdagangan di bidang jasa melalui AFAS dapat meningkatkan Industri jasa dalam negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Negara-Negara Anggota AFAS memberlakukan negara-negara dalam lingkup GATS dan bagaimana implikasinya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana AFAS Dapat diterapkan efektif Terhadap Negara Negara Peserta, dalam Hal ini Negara-Negara Asean.

¹⁴ H.S Kartadjoemena, 1997, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 42

- c. Untuk mengetahui sejauh mana AFAS dapat mempengaruhi industri Jasa di Indonesia
2. Manfaat penelitian.
- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana hubungan antara GATS dalam konteks Global dengan AFAS dalam konteks Regional. Dari sini diharapkan kita dapat memahami titik temu maupun titik benturan aturan hukum antara kedua lembaga tersebut.
 - b. Dari penelitian ini kita dapat melihat bagaimana aturan dan mekanisme AFAS dijalankan negara-negara anggota, bagaimana pelaksanaan dan potensi penyimpangannya.
 - c. Kita dapat memberikan masukan dan antisipasi dari pengaruh pemberlakuan AFAS terhadap industri JASA dalam negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan atau transaksi Internasional pertama kali berkembang di negara-negara Eropa, kemudian Asia dan Afrika, yang kemudian memunculkan slogan-slogan seperti Pasar Bebas, perdagangan bebas, Deregulasi, Privatisasi, dan liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk beroperasi. Pada saat yang sama, menuntut minimalisasi campur tangan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

1. Konsep dan Latar Belakang Liberalisasi Perdagangan

Literatur yang membahas mengenai liberalisasi sering menyamakan liberalisasi dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara atau suatu negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar.

Maksud dari kebijakan liberalisasi ini adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-

rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor

Ada berbagai alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku perdagangan) melakukan perdagangan internasional, diantaranya karena perdagangan internasional adalah tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan dunia.

Liberalisasi perdagangan internasional mulai mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada abad ke-19 sehingga memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi di Eropa. Tetapi kebebasan perdagangan tersebut belum dapat dinikmati oleh bangsa lainnya diluar Eropa, terutama di Asia dan Afrika. Hal ini disebabkan karena waktu itu Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan negara-negara Eropa, sehingga dalam sektor perdagangan, bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama seperti bangsa Eropa. Dengan demikian yang memegang kekuasaan ekonomi maupun politik pada periode liberal ini adalah bangsa Eropa, sebaliknya bangsa Asia dan Afrika tidak mempunyai kekuasaan dan politik di negerinya sendiri.

Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham dan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul “*The Wealth of Nation*”, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith diatas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disadvantage*). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai lebih optimal. Namun dalam kenyataannya yang justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh atau petani miskin.¹⁵

¹⁵ Muhammad Sood, 2011, *Op.cit*, hlm. 4-5

Kebijakan dalam rangka liberalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang dilakukan secara global dan unilateral, dan yang dilakukan secara bilateral atau regional. Kebijakan yang berlaku global berkaitan dengan kesepakatan yang diputuskan di WTO dan yang unilateral adalah kebijakan yang secara sepihak dilaksanakan oleh negara tersebut. Kebijakan regional atau bilateral adalah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional

2. Perkembangan Liberalisasi Perdagangan

Dalam perjalanannya, perkembangan liberalisasi perdagangan melalui beberapa periode yang cukup panjang. Berikut ini adalah periodisasi dari proses perkembangannya.

a. Periode merkantilisme

Pola pikir yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 adalah merkantilisme, dimana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan (*wealth*) sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Dengan adanya kekuatan militer yang tangguh, pemerintah pusat (Raja) dapat dengan mudah melakukan ekspansi teritorial ke negara lainnya. Ekspansi ini dimaksudkan juga untuk menguasai sumber daya alam negara yang ditaklukkan, terutama untuk mendapatkan logam mulia (Emas dan Perak). Jadi menurut pola merkantilisme, kekayaan didefinisikan dalam bentuk logam mulia.

Untuk itu, perdagangan harus senantiasa mencapai surplus dalam bentuk emas guna membiayai kepentingan politik, militer dan ekspansi politik¹⁶.

Secara efektif, paham merkantilisme berpijak pada pangkal tolak bahwa kesejahteraan perekonomian suatu negara dapat dicapai bila negara tersebut memiliki cadangan emas yang besar, yang dapat dicapai dengan mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Dengan demikian maka surplus ekspor melalui peningkatan ekspor dan pembatasan impor, merupakan tujuan utama, dan bukan peningkatan pendapatan nasional atau kesejahteraan masyarakat¹⁷.

Paham merkantilisme ini pulalah yang memotivasi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi hingga Asia dan Afrika untuk memperoleh sumberdaya yang lebih besar dalam ekspor mereka.

Paham merkantilisme, telah banyak menghasilkan kemajuan ekonomi dan politik untuk negara-negara Eropa sebagai *Nation-State* dibawah raja. Kegiatan navigasi dan eksplorasi kontinental telah memperluas kekuasaan teritorial negara-negara tersebut. Tetapi pangkal tolak dari persepsi tersebut pada dasarnya bersifat konfliktual, sehingga walaupun terjadi peningkatan kekayaan dikalangan negara-negara utama di Eropa, sistem tersebut tidak stabil. Disinilah letak benih-benih kegagalan merkantilisme yang mencegah terwujudnya sistem perdagangan dunia yang koheren dan stabil¹⁸.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ H.S Kartadjoemena, 2002, GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibiidang Perdagangan), Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.16

b. Zaman keemasan perdagangan bebas 1815-1914

Dilihat dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberal yang mencakup masa sejak akhir perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya perang dunia I pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang dilihat dari segi perdagangan internasional. Selama satu abad, perdagangan dunia berjalan dengan bebas dengan rintangan dan pembatas yang minim. Periode ini merupakan periode perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal dimana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya dibidang dimana terdapat keunggulan komparatif.

Namun demikian, sisi lain yang perlu dikemukakan. Pada satu pihak perdagangan bebas pada abad ke 19 yang secara faktual menimbulkan laju pertumbuhan yang pesat, lebih banyak menguntungkan pihak Eropa. Kebebasan berdagang yang dinikmati orang Eropa tidak dinikmati oleh orang lain, terutama orang Asia. Dalam menulis sejarah ekonomi, para ilmuwan barat sering melupakan hal ini¹⁹.

Kebebasan perdagangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa lainnya diluar Eropa, terutama Asia maupun Afrika. Hal ini disebabkan karena Asia maupun Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa, sehingga dalam bidang perdagangan bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan sama seperti bangsa Eropa. Dengan demikian yang memegang kekuasaan ekonomi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20-21

maupun politik pada periode liberal ini adalah bangsa Eropa, sebaliknya bangsa Asia maupun Afrika tidak mempunyai kekuasaan maupun politik di negaranya sendiri²⁰.

Namun demikian, beberapa ahli berpendapat bahwa secara makro angka dan bukti empiris menunjukkan bahwa sistem perdagangan bebas mampu mengangkat laju pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat dalam kegiatan itu. Berkaitan dengan itu pula, melihat kepada perspektif masa depan secara makro, diharapkan pada tahun-tahun mendatang adalah terjadinya hal yang sama, tetapi kali ini orang Asia telah menjadi tuan rumah di negaranya masing-masing juga akan dapat turut menikmati hasil dari keterbukaan pasar dunia.

Secara skematis paham Liberalisme yang mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mencakup²¹:

1. Perubahan utama yang bersifat fundamentalis dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peran utama yang dipegang oleh mekanisme pasar sebagai penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang rasional “dikendalikan” oleh suatu “yangan tak terlihat atau *invisible hand* yang tak lain adalah kegiatan otonom yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku ekonomi untuk kepentingannya sendiri guna memenuhi penawaran dan permintaan yang otomatis mengendalikan kegiatan yang optimal bagi semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi.

²⁰ Muhammad Sood, *op.cit.*, hlm.31

²¹ H.S Kartadjoemena, *op.cit.*, hlm.23-24

2. Agar mekanisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan logika permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. Mengingat betapa ekstensifnya larangan dan regulasi yang berlaku dalam periode merkantilisme. Maka keinginan untuk menghapus regulasi merupakan tuntutan yang mendesak.
3. Kegiatan perdagangan antar bangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan, karena perbedaan struktur *cost* secara alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan perhatian dibidang ini dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan kata lain, bila masing-masing negara memusatkan kegiatan dibidang dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka setiap negara akan mencapai atau mendekati titik optimal.

Dengan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar dan landasan pemikiran, maka kebijaksanaan paham liberalisme ini dapat diidentifikasi dengan beberapa ciri²²:

1. Menghapus segala jenis larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang di berlakukan pada periode merkantilisme.
2. Mengadakan penurunan tarif atau bea masuk terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antar negara.

²² *Ibid*,

3. Membuat jaringan yang meningkatkan perdagangan antar semua pihak yang berminat untuk berdagang.
4. Menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menentukan nilai tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang pada waktu itu berarti memilih standar emas.
5. Membolehkan dan bahkan menganjurkan lalulintas dan peredaran modal keluar maupun kedalam negeri sesuai dengan permintaan dan penawaran.
6. Memperbolehkan lalulintas tenaga kerja dan sumber daya manusia.

Periode Zaman keemasan liberalisasi perdagangan mulai berakhir sejak meletusnya perang dunia pertama pada tahun 1914. Namun dibalik perang dunia pertama tersebut, ternyata telah mempercepat muncul fragmentasi dan disintegrasi ekonomi di negara-negara Eropa yang mengganggu kegiatan ekonomi.

c. Fragmentasi dan disintegrasi di Eropa

Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme, mulai mengalami fragmentasi selama satu abad setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal. Kebijakan distoratif yang mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar.

Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga berakhirnya perang dunia II tahun 1945 merupakan periode disintegrasi karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang lebih baik. Dalam perkembangannya, yang timbul adalah kebijaksanaan perekonomian nasional yang sempit dan semakin meningkatnya nasionalisme yang berbentuk negatif, bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif.

Selama perang dunia I (1914-1918), negara-negara Eropa telah melakukan langkah-langkah swasembada dalam segala bidang berkaitan dengan suasana ketegangan yang semakin meningkat. Untuk mengembangkan sektor pertanian, negara-negara Eropa menerapkan larangan impor, subsidi, dan peningkatan tarif. Hal ini menimbulkan distorsi perdagangan internasional disektor pertanian, sehingga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara mitra dagang, baik di Eropa maupun diluar Eropa.

Tahun 1922 hingga 1927 perekonomian dunia masih mengalami pertumbuhan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan investasi yang cukup besar di Amerika Serikat, terutama dibidang industri otomotif, perluasan penggunaan tenaga listrik disertai pengembangan proyek tenaga listrik, dan peningkatan yang pesat di bidang konstruksi di Amerika Serikat.

Pada 1929 terjadi krisis secara menyeluruh di Amerika Serikat yang diakibatkan situasi investasi dalam bidang-bidang penting mengalami kolaps atau kebangkrutan. Berbagai sektor kapasitas produksinya telah jauh melampaui permintaan, sehingga kelanjutan rencana investasi dibidang tersebut tidak diperlukan sebelum permintaan meningkat. Hal ini mengakibatkan penurunan kegiatan industrial pada 1929 yang disusul dengan terjadinya kolaps dibursa saham. Kejadian ini semakin meluas melanda Amerika Serikat, dan dalam waktu yang relatif singkat, perkembangan dalam investasi, produksi industri, kesempatan kerja semakin berkurang. Hal ini memberikan pengaruh buruk terhadap pendapatan nasional Amerika Serikat.

Akibat dari depresi tersebut menimbulkan reaksi kongres di Amerika Serikat, terutama dari sektor pertanian untuk menerapkan kebijaksanaan proteksi di sektor pertanian. Menurut pandangan anggota kongres dari sektor pertanian bahwa perkembangan industri di Amerika Serikat sebagai akibat dari adanya proteksionisme. Karena itu apabila dikehendaki pertumbuhan yang sama pesatnya di sektor pertanian, maka diperlukan pula tingkat bea masuk yang tinggi. Kebijakan proteksi tersebut tidak hanya disektor pertanian akan tetapi telah menjalar pula ke sektor-sektor lainnya yang mencakup sektor manufaktur. Adanya kebijaksanaan proteksi pada sektor-sektor penting di Amerika Serikat tentunya memberikan dampak yang kurang baik terhadap arus pergerakan

barang dan jasa, terutama dalam hal hubungan dengan negara-negara mitra dagangnya, baik di Eropa maupun di Asia²³.

Dari tahun 1930 hingga awal perang dunia II ada berbagai upaya untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka walaupun tidak seperti yang berhasil diterapkan pada abad ke 19. Ada berbagai upaya yang sifatnya *stop-gap measure* seperti legislasi AS untuk mengadakan perundingan agar negara-negara mitra dagang secara resiprokal dapat menurunkan bea masuknya dengan serangkaian perundingan bilateral. Untuk itu kongres AS menerapkan legislasi *Reciprocal Trade Agreemeent act* 1934. Sekurang-kurangnya langkah tersebut telah menanamkan benih upaya bagi penerapan sistem perdagangan yang lebih terbuka agar setelah perang dunia II berakhir, upaya tersebut dapat secara serius dimulai kembali. Namun penerapan hanya dapat dilakukan setelah perang dunia ke II berakhir²⁴.

d. Periode pasca perang dunia II²⁵

Pada akhir perang dunia II 1945, negara-negara sekutu sebagai pihak pemenang perang mulai mengambil upaya untuk membenahi sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Berbagai analisis telah dilakukan untuk mencegah terulangnya fragmentasi yang terjadi dalam sistem perekonomian dunia pada tahun 1930-an. Negara-negara sekutu menghendaki kembali penerapan elemen-elemen positif yang

²³ *Ibid*, hlm 36-37

²⁴ *Ibid*, hlm 32-33

²⁵ *Ibid*, hlm 33-34

terdapat pada periode zaman keemasan perdagangan internasional dengan menanamkan landasan-landasan yang memungkinkan peningkatan kegiatan perdagangan internasional yang lebih terbuka. Mereka bermaksud untuk menciptakan organisasi-organisasi internasional yang dapat secara aktif turut menciptakan aturan main dalam perdagangan internasional berdasarkan kerjasama antar negara.

Mereka sepakat untuk menerapkan sistem hubungan internasional yang lebih teratur dan lebih menjamin perdamaian dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Secara minimal yang ingin di capai adalah pencegahan eksese-eksese tindakan sepihak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dunia, seperti tindakan-tindakan negatif yang diambil dalam periode antara kedua perang dunia oleh banyak negara, yang akibatnya membawa sistem perekonomian kearah malapetaka ekonomi, politik, sosial. Dibiidang politik dan sosial telah diciptakan Perserikatan bangsa-bangsa, PBB, sengan serangkaian badan-badan dibawahnya.

Penanganan masyarakat internasional diibiidang keuangan dan moneter relatif cepat dengan di setujuiinya pembentukan International Monetary Fund atau IMF dalam waktu yang singkat dalam konfrensi Bretton Woods tahun 1944. Dalam waktu yang bersamaan, masih dalam rangka perjanjian di Bretton Wood, *masyarakat internasional juga berhasil mendirikan Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* yang bertujuan mangadakan

rekonstruksi bagi negara-negara yang mengalami kerusakan akibat perang dunia II.

Berbeda dengan bidang finansial dan keuangan, perkembangan institusional dibidang perdagangan internasional tidak terlampau lancar. Negara-negara peserta konvensi tidak berhasil mendirikan organisasi internasional. Rencana pendirian *International Trade Organization* (ITO) yang diharapkan akan menjadi wadah untuk menangani masalah perdagangan internasional pun tidak mencapai kata sepakat. Karena berbagai pertimbangan politis, utamanya karena penolakan kongres AS atas pendirian ITO mengakibatkan terjadinya kekosongan institusional di bidang perdagangan.

Dengan kekosongan institusional tersebut, maka GATT yang semula merupakan perjanjian interim menjadi satu-satunya perjanjian di bidang perdagangan yang telah mendapatkan disepakati. Maka pada tahun 1947, GATT menjadi satu-satunya organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional, sekurang-kurangnya bagi negara-negara yang menjadi anggota. Karena perdagangan antar negara anggota telah merupakan 80% dari perdagangan di seluruh dunia.

Pada periode antara tahun 1950-1973, sistem perdagangan internasional menjadi lebih terbuka dan telah banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi. Laju pertumbuhan ekspor lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PDB. Dengan demikian, perkembangan setelah tahun 1973 menimbulkan kekhawatiran dibandingkan periode sebelumnya.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran di negara maju menjadi sebuah kekhawatiran secara politis, bahwa akan ada pihak-pihak dari negara maju tersebut yang akan menghendaki proteksionisme, sehingga kemajuan dalam liberalisasi pada periode sebelum 1973 akan dirusak. Dari sinilah timbul upaya memperkuat sistem multilateral yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua negara di duni;unia. Upaya tersebut terwujudkan dalam serangkaian perundingan Uruguay round yang telah berhasil merumuskan serangkain perjanjian perdagangan multilateral.

e. Periode Pasca Perang Dingin

Pada awal tahun 1990-an pemikiran bahwa mekanisme pasar merupakan instrument yang efisien untuk melakukan kegiatan ekonomi semakin diterima secara global. Selain itu, semakin ada kesadaran mengenai terbatasnya kemampuan sektor pemerintah untuk memecahkan semua masalah ekonomi²⁶.

Dibidang ekonomi, perkembangan di Asia Timur telah mengubah peta dan berangsur pusat kegiatan ekonomi yang dinamis mulai semakin lebih terpusat di Asia, atau minimal di Asia pasifik dengan perkembangan hubungan ekonomi yang semakin intensif, baik hubungan transpasifik antar Asia pada satu pihak dan Amerika Utara pada pihak lain, maupun hubungan intra Asia–Pasifik yang juga semakin meningkat.

²⁶ *Ibid*, hlm 40

Di Eropa barat proses integrasi ekonomi dan politik yang berjalan sejak akhir perang dunia II telah mewujudkan masyarakat Eropa yang semakin terintegrasi dengan perjanjian Maastricht, yang membuat Eropa barat semakin mengarah kepada unifikasi politik maupun ekonomi. Eropa tengah, negara-negara yang pada periode perang dingin merupakan bagian dari Uni Soviet (Hongaria, Polandia, Cekoslovakia) juga semakin terintegrasi ke dalam sistem Eropa barat. Begitu pula dengan negara-negara di kawasan Baltik yang semakin masuk kedalam zona Deutsche mark kedalam kegiatan ekonominya²⁷.

Dengan demikian maka kekuatan ekonomi pada periode ini terpusat pada tiga kekuatan besar, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang yang pada gilirannya akan diimbangi oleh Cina. Pada periode ini, kemudian timbul rivalitas baru antara negara-negara, namun dalam bidang ekonomi.

Pada periode pasca perang dingin ini ada kesempatan sistem perekonomian dunia untuk dapat menikmati kebebasan transaksi yang pernah terwujud pada waktu zaman keemasan perdagangan dunia pada abad ke-19, dimana dunia menyaksikan kebebasan gerak dibidang: (a) Barang-barang, (b) Jasa-jasa. (c) Modal , (d) Teknologi dan, (e) Migrasi tenaga kerja. Terjadinya kebebasan gerak bagi berbagai faktor produksi

²⁷ *Ibid*,

untuk mencari kesempatan melakukan kegiatan yang rentable telah menimbulkan laju pertumbuhan perdagangan yang tinggi²⁸.

Sistem yang berkembang dalam GATT dan WTO akan menunjang upaya kearah perkembangan sistem perdagangan dunia yang bersifat global dengan aturan permainan yang ditentukan secara multilateral²⁹.

3. Pro Kontra Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan dunia menuai pro dan kontra dikalangan ahli hingga masyarakat internasional. Para pendukung tiap kubu, mengajukan pendapat dan argumentasinya untuk menunjukkan kebenaran mengenai apa yang mereka yakini terhadap akibat liberalisasi.

Sebagaimana yang disebutkan pada awal-awal tulisan ini, Adam Smith sebagai pendukung utama liberalisasi, menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru. Dampak dinamik ketiga dikemukakan oleh Mill yang menekankan bahwa diperkenalkannya perdagangan akan meningkatkan insentif bagi pemilik-pemilik faktor produksi di negara-negara berkembang untuk produksi lebih banyak lagi³⁰.

²⁸ *Ibid*, hlm 41

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Hata , 2006, Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO , *PT Refika Aditama*, Bandung, Hal 18-19

Kesimpulan–kesimpulan teori klasik dan neo klasik bahwa perdagangan bebas merangsang pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan telah ditentang oleh banyak sarjana. Mereka menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan di negara-negara ini yang telah cukup lama berpartisipasi dalam perdagangan Internasional.

Para sarjana yang berpandangan export pessimism berpendapat bahwa perdagangan internasional akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan negara-negara berkembang yang berperan serta didalamnya dan menghambat pembangunan³¹.

Para sarjana yang termasuk ke dalam kelompok *export pessimists* seperti Gunner Myrdal dan Prebisch, menekankan kegagalan pasar untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan structural di negara-negara berkembang lewat perdagangan internasional. Stagnasi di negara miskin, distribusi perolehan dari perdagangan yang tidak seimbang. Kritik Prebisch terhadap gagasan perdagangan akan mendorong pertumbuhan industrial antara lain didasari oleh penelitian seorang ekonom, Eugene Stanley, pada awal tahun 1960-an, telah meneliti statistik yang dikumpulkan oleh GATT dan menunjukkan bahwa nilai tukar barang yang diekspor negara-negara kurang berkembang semakin lama semakin merosot dibandingkan dengan barang industrial yang mereka impor. Berpuluh-puluh tahun mereka harus mengekspor barang yang jumlahnya semakin lama semakin besar hanya untuk membayar impor dalam volume

³¹ *Ibid*, Hal 19

yang sama. Diperkuat oleh statistik dari *British Board of Trade*, ilmuwan tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak 75 tahun sebelumnya nilai tukar komoditi primer terus merosot dibandingkan dengan barang manufaktur³².

Pemikiran-pemikiran para sarjana *export pessimistic* kemudian mendapatkan kritik balik dari para pendukung aliran liberalisasi perdagangan ini. mereka juga lalu mengajukan bukti-bukti empiris yang mengakibatkan perdebatan mengenai manfaat liberalisasi perdagangan terus berlanjut.

Hata dalam bukunya mengungkapkan data yang dikeluarkan oleh sekretariat WTO, bahwa negara-negara Berkembang sebagai kelompok telah meningkatkan pangsa pasar mereka di pasar dunia. Mereka kini memegang bagian 25% dari perdagangan dunia. Kunci keberhasilan ini adalah meningkatnya pangsa negara-negara berkembang di pasaran dunia dalam perdagangan produk manufaktur. Suatu kenaikan dua kali lipat dari satu dasawarsa yang lalu dan empat kali lipat dari tahun 1963.³³

Satu hal lagi yang perlu dikemukakan disini bahwa meskipun liberalisasi perdagangan kadang dikatakan menguntungkan negara-negara industri, namun negara-negara industri masih melakukan tindakan-tindakan proteksi terselubung. Negara negara maju senantiasa menerapkan isu-isu baru yang sangat memberatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, seperti standar ketenagakerjaan, isu

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*, Hlm 22

lingkungan hidup, dipertahankannya kuota tekstil, proteksi bidang pertanian, dan aturan investasi.

Terlepas dari semua hal itu liberalisasi perdagangan kini tak bisa dielakkan lagi dan Indonesia secara Khusus sebagai anggota WTO harus menghadapinya siap atau tidak siap. Meskipun negara-negara maju sebenarnya masih negara-negara berkembang masih

B. *World Trade Organization (WTO)*

Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General agreement on tariff and trade*) yang kemudian disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, yang tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif³⁴.

Keterbukaan pasar yang semakin luas akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing negara³⁵.

³⁴ Syahmin A.K, 2006, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 41

³⁵ *Ibid*,

1. Sejarah singkat GATT

Sebagai langkah untuk menangani masalah perdagangan internasional, pada bulan februari 1946, ECOSOC, suatu badan dibawah PBB, pada sidang pertamanya telah mengambil resolusi untuk mengadakan konfrensi guna menyusun piagam internasional dibidang perdagangan. Pada waktu yang hampir bersamaan, pemerintah AS mengeluarkan suatu draft atau konsep mengenai piagam untuk *Internasional Trade Organization* (yang selanjutnya disingkat ITO).³⁶

Pada tahun 1947, para perunding di Jenewa melaksanakan persiapan untuk merumuskan piagam ITO yang kemudian diserahkan kepada delegasi negara-negara peserta pada konfrensi Havana 1948. Disamping mempersiapkan teks piagam ITO (*International Trade Organization*), para perunding di Jenewa juga melakukan perundingan untuk menurunkan bea masuk atau tarif yang kemudian menjadi annex dalam perjanjian GATT dan secara formal merupakan bagian integral dari perjanjian GATT. Dapat ditambahkan bahwa hal ini berlaku untuk seterusnya dalam GATT bahwa setiap rangkaian perundingan di bidang tarif makan hasilnya menjadi bagian integral dari perjanjian GATT³⁷.

Secara struktur GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu “organisasi”. Dalam kata lain resminya GATT mempunyai status yang sama dengan berbagai perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya. Tetapi dilihat dari substansi, pada

³⁶ *Ibid*, hlm 64

³⁷ H.S Kartadjoemena, *op.cit.*, hlm.43

waktu perundingan diadakan untuk merumuskan perjanjian GATT, substansi, prinsip, dan sistem yang terkandung dalam perjanjian dibayangkan supaya kemudian beroperasi dibawah payung ITO³⁸.

Pada tahun 1948, piagam teks ITO selesai dirumuskan. Tetapi ITO tidak dapat terwujud karena kongres AS tidak dapat menyetujuinya ketika presiden AS menyerahkan teks kepada kongres untuk memperoleh persetujuan. Setelah berulang kali diusahakan oleh pihak eksekutif AS, maka pada tahun 1951, pertanda semakin menunjukkan secara jelas bahwa kongres tidak akan menyetujuinya. Dengan demikian maka presiden AS Harry Truman menarik kembali usulan ratifikasi piagam Havana³⁹.

Dengan tidak berhasilnya masyarakat internasional dalam mewujudkan ITO, maka GATT menjadi satu satunya instrument hukum yang menjadi lembaga utama dalam perdagangan internasional. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian GATT menjadi sebuah lembaga utama dalam perdagangan, sedangkan ia belum pernah secara sah diwujudkan sebagai organisasi internasional dan sebelumnya dirancang sebagai perjanjian interim?

Menurut H.S Kartadjoemena, bahwa jawaban terhadap pertanyaan itu adalah penempuhan jalan yuridis fiktif dengan *adanya protocol of provisional application* yang secara teknis dapat segera menerapkan perjanjian GATT secara provisional dan darurat. Dalam mekanisme penerapan ketentuan yuridis ini, dapat dikemukakan bahwa GATT,

³⁸ *Ibid*,

³⁹ *Ibid*,

sebagai suatu perjanjian, telah selesai perumusannya pada tahun 1947, sebelum perjanjian ITO yang di rencanakan sebagai patung dapat terwujud⁴⁰.

Pada waktu itu,terdapat perbedaan pandangan mengenai ratifikasi GATT dengan ITO sebagai payungnya di satu pihak dan urgensi untuk menerapkan dan meresmikan perjanjian bila telah selesai. Maka di terapkanlah *Protocol of provisional application* (PPA) bagi negara yang memerlukan GATT segera untuk disetujui dan bagi negara yang ingin meratifikasi GATT dan ITO secara bersamaan dapat menunggu hingga kedua perjanjian tersebut rampung.

Dalam kenyataanya, ITO akhirnya tak pernah berlaku dan GATT berdiri secara independen hingga terbentuknya secara resmi *World Trade Organisation* (WTO) pada 15 April 1994 sejalan dengan keberhasilan Uruguay round, sebagai pengganti ITO dan menjadi payung baru bagi GATT.

2. Sejarah WTO

Perjalanan WTO hingga terbentuk, tidak terlepas dari pertemuan *contracting parties* GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang pertama kali dilaksanakan tanggal 20 september 1986 di Punta Del Este, Uruguay untuk meluncurkan perundingan perdagangan multilateral. Perundingan tersebut dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga

⁴⁰ *Ibid*, hlm 44

selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan *World Trade Organisation* (WTO) yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan konprehensif dibidang perdagangan. Rangkaian perundingan ini kemudian biasa dikenal dengan nama perundingan Uruguay round.

Perundingan tersebut tidak hanya membahas mengenai hal-hal klasik seperti “*market acces*”, tetapi juga membicarakan mengenai hal-hal baru yang tumbuh dan berkembang sehubungan dengan semakin majunya perdagangan dan ekonomi yang tumbuh semakin pesat, seperti bidang investasi dan juga Jasa yang yang tidak tersentuh dalam pengaturan GATT.

Menurut H.S Kartadoemena, “..kali ini sekurang-kurangnya ada 3 hal yang membuat Uruguay round berbeda dari putaran GATT yang sebelumnya, yakni⁴¹:

- a. Substansi yang dirunding kali ini jauh lebih luas daripada substansi yang biasa ditangani dalam rangka putaran perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan oleh GATT
- b. Partisipasi negara berkembang kali ini jauh lebih terasa daripada dalam putaran perundingan multilateral sebelumnya.
- c. Perundingan kali ini juga mencakup perubahan institusional sehingga dari awal dibayangkan dapat mencapai kesepakatan agar GATT sebagai lembaga akan diperkuat secara berarti.

⁴¹ *Ibid*, hal 212

Inisiatif meluncurkan putaran Uruguay ini disebabkan karena tidak terlaksananya komitmen yang telah disepakati dalam putaran Tokyo (1979) dan GATT *Ministerial Meeting* tahun 1982 . Setelah putaran Tokyo diselesaikan tahun 1979, terlihat bahwa apa yang telah disepakati dalam rundingan tersebut banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu tidak memungkinkan negara-negara peserta putaran Tokyo untuk secara konsekuen melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dalam putaran Tokyo, terutama kesepakatan-kesepakatan mengenai *non-tariff barrier*⁴².

Putaran Tokyo dan GATT *ministerial meeting* ini sendiri bertujuan untuk membicarakan cara-cara untuk menghentikan gejala-gejala semakin luasnya proteksionisme perdagangan yang semakin cenderung dilakukan oleh negara-negara pada waktu itu akibat persaingan perdagangan. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Kemudian dalam rangka Uruguay round ini, sebagai pedoman untuk melakukan perundingan telah dirumuskan Deklarasi Punta Del Este yang merupakan suatu pegangan mengenai tujuan, substansi maupun cara-cara atau ”modalitas” perundingan⁴³.

Setelah putaran ini ditetapkan, para peserta segera membentuk suatu struktur perundingan (*Negotiating Structure*) guna menangani setiap aspek putaran ini. struktur ini pada pokoknya terdiri dari tiga badan utama,

⁴² Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 202

⁴³ H.S Kartadjoemena, *Op.cit*, hlm 202

yaitu (1) *The Trade Negotiations Committee* (TNC) yang bertujuan untuk mengawal seluruh jalannya putaran; (2) *The Group of Negotiations on Goods* (GNG) yang bertujuan untuk mengawasi semua subjek pembahasan kecuali Jasa; dan (3) *The Group of Negotiations on Service* (GNS), badan yang bertujuan untuk mengawasi perundingan bidang Jasa⁴⁴.

Perkembangannya, sejak putaran Uruguay pertama kali di laksanakan di Punta Del Este, Uruguay, selanjutnya diadakan kembali pertemuan tingkat menteri di Montreal pada bulan Desember 1988 untuk meninjau tahapan yang telah dicapai dalam perundingan (*Mid-term review*) dan di Brussel pada bulan Desember 1990, yang direncanakan sebagai akhir yang sukses untuk putaran Uruguay.

Namun akhir perundingan di Brussel ternyata tak sukses seperti yang diharapkan sebab tetap adanya perbedaan pendapat antara negara-negara khususnya antara masyarakat Eropa dan Amerika Serikat terhadap masalah produk pertanian, sehingga Uruguay round akhirnya berhasil di selesaikan dan kemudian ditandatangani di Marrakesh pada april 1994.

Pada pertemuan tingkat menteri di Montreal (*mid-term Review*) tahun 1988 gagal menyepakati seluruh pedoman yang telah disusun selama dua tahun perundingan. Dari 15 pokok bahasan, 4 masalah yang sama sekali ditolak oleh para menteri untuk disepakati, yaitu *safeguard, intellectual property, textile, and cloting* dan pertanian. Hal ini kemudian disepakati pada bulan April 1989 di Jenewa. Suatu keputusan dalam *mid*

⁴⁴ Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 204

term review tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang cukup baik adalah *Trade policy Review Mechanism* (TPRM) sebagai bagian dari hasil perundingan *functioning of the GATT system*. Mekanisme ini akan di terapkan terhadap setiap anggota GATT dan Indonesia telah mendapat giliran pada tahun 1990. TPRM ini diterapkan dua tahun sekali untuk Amerika Serikat, masyarakat Eropa, Jepang dan Canada. Sementara itu untuk negara-negara lainnya setiap empat atau enam tahun sekali.⁴⁵

Kemudian pada pertemuan lanjutan di Brussel, seperti yang telah dikemukakan, tidak mencapai hasil yang diinginkan sebagai perundingan tahap akhir dari seluruh rangkaian Uruguay round. Hal ini karena adanya pertentangan dan perbedaan antara masyarakat Eropa dengan Amerika Serikat mengenai komoditi pertanian, sehingga perundingan disemua bidang dibekukan dan putaran Uruguay tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal menurut deklarasi Punta Del Este.

Para menteri kemudian memutuskan untuk memperpanjang proses perundingan Uruguay round. Maka setelah berbagai sidang lanjutan, pada bulan Desember 1991 Arthur Dunkel, dirjen GATT selaku ketua *Trade Negotiation Commite* (TNC) tingkat Senior official kemudian menyampaikan suatu dokumen yaitu *Draft Final Act Embodying The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negosiation* (MTN.TNC/W/FA, 20 Desember 1991 atau dikenal dengan istilah *Draft Final act* (DFA).

⁴⁵ *Ibid*, hal 212

HS kartadjoemena mengatakan bahwa” Teks DFA merupakan kompromi maksimal yang secara politis dapat dicapai pada saat itu.⁴⁶

Dokumen DFA tersebut menyebutkan hal-hal sebagai berikut⁴⁷:

- a. Dokumen tersebut memberikan suatu paket hasil putaran Uruguay yang kongkrit dan komprehensif
- b. Satu unsur apapun dari DFA ini tidak dapat dianggap disepakati tanpa menyepakati seluruh paket perundingan.
- c. Perjanjian akhir mengenai rancangan perjanjian akhir ini bergantung pada hasil perundingan semua pihak mengenai akses pasar, termasuk negosiasi dalam bidang upaya-upaya tariff dan non tariff. Hal ini berlaku pula terhadap bidang-bidang lainnya seperti produk-produk alam, produk tropis, pertanian, tekstil dan pakaian.
- d. Perjanjian akhir berlaku juga terhadap perundingan yang masih berlangsung berkaitan dengan komitmen liberalisasi di bidang jasa.

DFA ini terdiri dari 28 teks rancangan hukum yang merupakan hasil perundingan Uruguay round secara menyeluruh (ditambah dengan tindakan arbitrase oleh para ketua kelompok perundingan dari masing-masing substansi)

Pada persidangan TNC 13 januari 1992, tidak ada satu negara pun yang menolak DFA meskipun dari perundingan tersebut tercermin kesulitan kesulitan dari berbagai bidang. Faktor penentu dari Uruguay

⁴⁶ H.S Kartadjoemena, 1997, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 28

⁴⁷ Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 213

round justru berasal dari sikap masyarakat Eropa yang menganggap substansi pada bidang pertanian mengenai subsidi dan sistem proteksi pertanian, sulit di terima tanpa modifikasi

Dengan situasi demikian, maka sejak Januari 1992, sistem perundingan yang diterapkan dilakukan melalui 4 jalur (*track*) kegiatan sebagai berikut⁴⁸:

- a. Negosiasi dibidang market akses, terutama dibidang tarif dibawah pimpinan duta besar Germain Denis (Kanada) selaku ketua kelompok perundingan. Jalur ini dikenal dengan *Track I*.
- b. Negosiasi dibidang *Trade in Service* atau perdagangan Jasa-jasa, Bertujuan untuk merundingkan daftar komitmen masing-masing negara mengenai sektor dan subsektor dan transaksi yang akan dibuka. Negosiasi dilakukan dibawah pimpinan duta besar Filipe Jaramillo (Colombia) dan duta besar David Hawes (Australia). Jalur tersebut dikenal sebagai kegiatan *Track II*
- c. Perundingan *Legal Drafting Group* untuk mengadakan penyempurnaan teks *Draft Final Act* agar memenuhi keperluan konsistensi yuridis teks tersebut. Jalur ini dikenal sebagai *Track III*
- d. Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam teks yang merupakan perubahan yang bersifat *substantive* dan memerlukan suatu kesepakatan politis, maka disediakan forum tempat negara-negara peserta, setelah mencapai suatu konsensus, dapat mengusulkan

⁴⁸ H.S Kartadjoemena, *Op.cit*, hlm 29

perubahan *Draft Final Act*. Apabila terdapat cukup banyak negara yang menghendaki perubahan tersebut, maka perubahan yang dimaksud dapat dilakukan. Jalur ini dikenal sebagai Track IV.

Hingga saat terakhir jalur ini tidak dibuka, kecuali untuk dua kekuatan raksasa, Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa untuk bidang pertanian. Penyesuaian tersebut juga akhirnya tidak merubah teks perjanjian karena yang dicapai adalah perjanjian khusus antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa dalam Blair House Agreement⁴⁹.

Para delegasi negara peserta mengharapkan agar perundingan dapat di selesaikan dalam kurun waktu Oktober 1992 hingga April 1993. Dalam pemikiran direktu Jenderal GATT maupun delegasi negara-negara peserta apabila terdapat kemelesetan dari jadwal tersebut, dapat di perkirakan bahwa sebagian besar dari perundingan dapat diselesaikan pada bulan april 1993, sehingga hal-hal yang memerlukan keputusan politis sebagian besar dapat diselesaikan pada bulan April tersebut, dan hal-hal yang secara teknis dapat diteruskan setelah bulan April 1993⁵⁰.

Kemacetan negosiasi dibidang pertanian antara Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat, ikut mempersulit kemajuan dibidang lain yang juga tidak kalah kontroversial.

Dibidang Jasa-jasa atau *Trade in Service*, walaupun kerangka perjanjian yang terurai secara lengkap dalam bentuk *Framework Agreement* dan beberapa perjanjian sektoral telah diselesaikan, perundingan

⁴⁹ *Ibid*, hal 29

⁵⁰ *Ibid*, hal 31

masih tetap harus dilangsungkan untuk menentukan secara spesifik komitmen negara masing-masing dalam proses liberalisasi sektor jasa-jasa⁵¹.

Khusus dalam menyusun komitmen untuk mengadakan liberalisasi dibidang jasa, masing-masing negara peserta harus merinci komitmen yang akan diterapkan dan selanjutnya akan didaftarkan dalam *Schedule of Commitment* negara masing-masing. Berkaitan dengan ini, dapat pula dikemukakan bahwa pihak negara-negara maju telah mengemukakan permintaannya terhadap Indonesia mengenai liberalisasi dibidang jasa-jasa yang merupakan kepentingan mereka. Indonesia berupaya mengakomodasi permintaan tersebut. Hal tersebut di Jakarta diselesaikan oleh Dirjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, selaku kordinator dari instansi-instansi yang berwenang dibidang jasa-jasa⁵².

Pada tanggal 15 desember 1993 semua perbaikan teks perjanjian dapat di selesaikan termasuk kesepakatan untuk mendirikan organisasi baru, *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO), WTO sebagai lembaga penerus GATT. Sisa waktu hingga 15 April 1994 digunakan untuk menyelesaikan perundingan tarif dan menyelesaikan penyusunan daftar komitmen final. Pada tanggal 15 April, 1994 di Marrakesh, Maroko, para menteri menandatangani hasil perjanjian Uruguay Round. Selanjutnya perjanjian yang ditandatangani oleh para menteri tersebut diserahkan kepada pemerintah masing-masing untuk

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*,

diratifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku pada masing-masing negara. Indonesia Meratifikasi perjanjian tersebut pada bulan November 1994.

3. Struktur Organisasi WTO

Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. Berikut ini adalah Struktur Organisasi WTO:

- a. ***Ministerial Conference*** (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun
- b. ***General Council*** (Dewan Umum), badan dibawah Ministerial Conference yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan baik untuk kegiatan dibawah *Multilateral Trade Agreements* maupun *Plurilateral Trade Agreements*;
- c. ***Council for Trade in Goods*** (Dewan Perdagangan Barang), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan barang;
- d. ***Council for Trade in Services*** (Dewan Perdagangan Jasa), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan jasa;

- e. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), badan di bawah General Council yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan dibidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), badan di bawah Ministerial Conference yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara anggota;
- g. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), badan dibawah Ministerial Conference yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan dibidang perdagangan

4. Fungsi WTO

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka fungsinya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu:

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay dibidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif.

- b. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
- c. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara- negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay.
- e. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi dibidang perdagangan guna mengulangi hambatan perdagangan dunia.

5. Aturan Hukum perdagangan Pasca Uruguay round WTO

Perjanjian utama yang berhasil disepakati adalah perjanjian pembentukan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Sebagaimana Juga GATT 1947, para pendiri WTO menempatkan standar hidup sebagai tujuan utama melalui cara-cara yang serupa dengan GATT 1947 tersebut. Namun demikian, agenda putaran Uruguay sangat luas sehingga menjadikan putaran perundingan ini yang paling ambisius dalam sejarah GATT. Ia tidak hanya meliputi perdagangan barang (termasuk didalamnya perdagangan tekstil dan hasil pertanian yang sering menimbulkan sengketa) akan tetapi juga meliputi

berbagai jenis Jasa, *trade-related aspects of intellectual property rights*, *trade related investment measures* dan juga persoalan *safeguard* yang cukup pelik. Semua ini merupakan topik penting dan sebagian besar sifatnya sangat teknis dan mengandung perubahan-perubahan yang cukup mendasar⁵³.

Indonesia telah meratifikasi WTO *agreement*. Dengan diundangkannya Undang-undang no 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Akan membawa konsekuensi yang lebih besar terhadap peraturan perundangan nasional dibandingkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT sejak Februari 1950, termasuk dalam cara Indonesia menyelesaikan sengketa dagangnya. Misalkan sebagai anggota WTO, praktis Indonesia terikat oleh seluruh annex perjanjian WTO (*Multilateral Trade Agreement*) yakni Annex 1,2 dan 3⁵⁴.

Namun hal yang juga penting untuk dicatat dalam hal ini adalah keseluruhan perundingan tersebut terdapat prinsip yang menjadi pegangan dalam Deklarasi Punta del Este yaitu perlakuan khusus yang menguntungkan negara berkembang atau *special and Differential Treatment* yang lebih dikenal dengan perlakuan S & D

⁵³ Hata , 2006, Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO , PT Refika Aditama, Bandung, hal 5-6

⁵⁴ *Ibid*, hal 8

Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tariff dan jasa⁵⁵.

Keempat annex tersebut yaitu : Annex 1 memuat “persetujuan persetujuan multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semua sifatnya “memaksa”. Artinya peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua anggota WTO. Annex 1 ini terdiri dari 3 bagian: (1) Annex 1A terdiri dari GATT 1994 yang intinya adalah GATT 1947 yang telah diubah dan diperbaiki, perjanjian mengenai topik-topik khusus (Berjumlah 12), yaitu pengaturan mengenai pertanian sampai “tindakan pengamanan” (*safeguard*); serta *schedule of tariff concessions*.

Annex 1b memuat perdagangan Jasa (*General Agreement Tarriif And Service* atau GATS), serta Annex 1c memuat *The General Agreement on Trade-Related Aspec of Intellectual Property rights* (TRIPS) atau perdagangan hak atas kekayaan intelektual.⁵⁶

Annex 3 mengatur pembentukan *The Trade policy review Mechanism* (TRIPM). Melalui mekanisme ini WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya. Tujuan utama dari peninjauan ini adalah

⁵⁵ Huala Adolf, 2005???, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119

⁵⁶ *Ibid*,

untuk mengkaji dampak-dampak secara umum kebijakan-kebijakan perdagangan suatu negara serta dampaknya terhadap mitra dagang negara lainnya.⁵⁷

Annex 4 memuat perjanjian yang sifatnya opsional (pilihan), yakni perjanjian-perjanjian plurateral. Keempat perjanjian ini adalah *Governing Procurement* (Pengadaan barang-barang pemerintah); *Trade in Civil Aircraft* (perdagangan Kapal / pesawat udara sipil); *Bovine Meat* (daging hewani); dan *Dairy Products* (Produk-produk Susu). Menurut Prof Jackson, annex 4 ini memungkinkan WTO untuk fleksibel serta untuk memungkinkan dapat berkembang dimasa depan⁵⁸.

Isi perjanjian putaran Uruguay terbagi dalam lima belas kelompok. Empat dari perjanjian tersebut berupa ketentuan baru dalam GATT. Teks Hukum Tersebut adalah Pengaturan Perdagangan Penanaman Modal (*Trade Related Investment Measures* atau *TRIMs*), Perdagangan Jasa (*Trade in Service*), Perdagangan Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Organisation*). Sedangkan teks perjanjian lainnya seperti *Rules of origin*, *Pre-Shipment Inspection*, anti dumping, subsidi, halangan-halangan teknis lainnya dalam perdagangan dan lainnya sifatnya memperkuat ketentuan GATT yang sudah ada⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ *Ibid*, hal 119-120

⁵⁹ Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 215-216

Kartadjoemena dalam bukunya merangkum beberapa elemen penting yang dihasilkan oleh Uruguay Round yang telah di tandatangani di Marakesh, Maroko yaitu⁶⁰:

- a. Perkembangan baru yang cukup dramatis adalah kesepakatan dibentuknya suatu organisasi baru sebagai penerus GATT, Yakni World Trade Organisation atau WTO. Organisasi ini akan mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan akan merupakan organisasi internasional secara penuh, tidak lagi seperti GATT sebelumnya yang secara formal merupakan organisasi interim.
- b. Negara anggota bersedia untuk menurunkan tingkat bea masuk sebesar rata-rata sekitar 30 % dari tingkat semula, khususnya dibidang manufaktur.
- c. Untuk dua sektor tradisional yang aturan permainannya masih banyak untur sepihak yang penuh distorsi yang bentuknya *Non Tarif*, yakni Tekstile dan Pertanian. Perjanjian dalam Uruguay round telah menimbulkan kesepakatan untuk secara bertahap menempatkan aturan permainan dalam sektor tersebut dalam naungan GATT.

Dengan adanya perjanjian dalam dua sektor penting tersebut maka aturan permainan yang berlaku akan semakin lebih non diskriminatif, semakin transparan dengan sistem perlindungan yang semakin berpijak pada tariff, dan tidak pada pembatasan kuantitatif dalam bentuk kuota dan perlindungan non-tarif lainnya.

⁶⁰ H.S Kartadjoemena, *Op.cit*, hlm 41

- d. Perjanjian umum dibidang Jasa-Jasa atau *Trade in Service*, telah disepakati sebagai kerangka umum, atau *Framework Agreement*. Untuk menentukan aturan permainan yang berlaku untuk perdagangan Jasa.

Perlu di tekankan bahwa sektor jasa-jasa, (yang termasuk jasa perbankan, jasa telekomunikasi, keuangan, konsultasi, pariwisata, angkutan laut, udara, dan darat dan sebagainya) termasuk dalam naungan perjanjian ini. Estimasi kasar secara konservatif waktu itu menunjukkan bahwa nilai dagang internasional di bidang jasa tidak kurang dari USD 800 miliar.

- e. Perjanjian yang sangat kompleks juga telah disetujui untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual atau *Agreement on Intellectual Property Rights*, atau disingkat TRIPs. Pada satu pihak memang dapat diakui bahwa banyak penemuan teknologi yang diperoleh dengan biaya penelitian yang mahal yang dibajak. Tetapi pada lain pihak apabila aturan main tersebut terlalu berpihak kepada pemilik hak milik intelektual maka akan terjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan tersebut dapat terjaga, masih perlu dilihat. Namun untuk sementara, dengan adanya perjanjian dibidang TRIPs, perusahaan multinasional yang memiliki teknologi tinggi akan merasa lebih lega untuk bergerak dalam penanaman modalnya di negara-negara yang menjadi peserta perjanjian karena hak milik intelektualnya mendapatkan perlindungan.

f. Disamping hal-hal baru, perjanjian Uruguay round juga telah menyempurnakan serangkaian aturan permainan GATT yang sifatnya sangat teknis tetapi tidak kalah pentingnya untuk menunjang kelancaran perdagangan dunia yang lebih terbuka. Perbaikan aturan permainan yang sifatnya teknis tersebut termasuk antara lain: (i) Aturan perbaikan mengenai anti dumping; (ii) Perbaikan aturan mengenai subsidi; (iii) Perbaikan aturan mengenai langkah pengamanan darurat atau *safeguards*; (iv) Perbaikan aturan mengenai subsidi atau *countervailing duties* ; (v) Perbaikan aturan mengenai langkah darurat yang diperbolehkan apabila suatu negara apabila mengalami masalah neraca pembayaran; (vi) Perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang prosedurnya telah di sempurnakan untuk mempercepat proses penilaian.

Peter van den Bossche Dkk menyebut hasil Uruguay round dalam hal sebagai pembentuk WTO dalam buku mereka sebagai *WTO Agreement*. Disebutkan bahwa *WTO Agreement* hanya memiliki 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian yang singkat itu juga terlampir Sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*. Perjanjian ini terdiri dari⁶¹:

⁶¹ Peter van Den Bossche (dkk) , 2010, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization) , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hal 3-4

- a. Perjanjian-perjanjian Multilateral atas perdagangan Barang (lampiran IA) terdiri dari: *General Agreement on Tariffs and Trade 1944* (perjanjian umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1944, yang selanjutnya disebut GATT 1994).
- b. Dua belas perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan Barang, seperti
- *Agreement on Agriculture* (Perjanjian dalam bidang pertanian)
 - *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan sanitasi dan Phytosanitasi) yang selanjutnya disebut SPS agreement
 - *Agreement on Technical Barriers to Trade* (perjanjian mengenai Hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan) selanjutnya disebut dengan TBT Agreement)
 - *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Perjanjian Mengenai Penerapan Pasal IV GATT 1994) selanjutnya disebut Anti-Dumping Agreement.
 - *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian Mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan) selanjutnya disebut SCM Agreement.
 - *Agreement on Safeguards* (perjanjian mengenai Safeguards)
- c. *General Agreement on Trade in Service* (Perjanjian Mengenai Perdagangan dibidang jasa, selanjutnya disebut GATS, lampiran 1b.

- d. *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Perjanjian mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan Hak Kekayaan intelektual) Selanjutnya disebut TRIPS Agreement, lampiran 1c.
- e. *Understanding on rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (pengertian mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa), selanjutnya disebut DSU, lampiran 2,
- f. *Trade Policy review Mechanism* (Mekanisme Penilaian kebijakan Perdagangan), selanjutnya disebut TPRM, Annex 3.
- g. Dua perjanjian *Plurilateral* mengenai pengadaan Pemerintah (*Government Procurement*) dan Perdagangan Pesawat sipil (*Trade in Civil Aircraft*), Lampiran 4

Perjanjian pada Lampiran 1,2 dan 3 adalah perjanjian Multilateral dan mengikat seluruh anggota WTO. Lampiran 4 berisi dua perjanjian plurilateral yang mengikat anggota WTO yang secara tegas menyetujuinya. WTO Agreement terdiri dari 25.000 halaman, termasuk lampiran-lampirannya. 95 persen dari itu berisi *schedules of concession* (jadwal konsesi dalam perdagangan barang) dan *schedule of specific commitments* (jadwal komitmen-komitmen khusus dalam perdagangan Jasa)⁶².

⁶² *Ibid*, hlm 5

C. *General Agreement on Trade in Service (GATS)*

Salah satu hasil penting yang dihasilkan oleh Uruguay round adalah kesepakatan tentang kerangka kerja dibidang jasa.

Perjanjian disektor Jasa-Jasa ini merupakan hal baru dan memiliki cakupan yang sangat luas, maka selain *Framework*, terdapat pula *Sectoral Agreements*, yang pada satu pihak, mengandung unsur-unsur pada *Framework agreement* namun dipihak lain juga mengandung beberapa pengecualian dari prinsip-prinsip tersebut, karena karakteristik dari sektor tersebut memerlukan pengecualian.

1. Ruang Lingkup GATS

Perjanjian dibidang jasa-jasa yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay round terutama terurai didalam *General Agreement on Trade in Service (GATS)* yang merupakan kerangka Utama atau *Framework Agreement*. Dokumen utama ini mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor dibidang jasa-jasa. Dalam GATS sebagai *Framework Agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional dibidang jasa-jasa. Perjanjian umum ini sangat diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum⁶³.

⁶³H.S Kartadjoemena, *Op.cit*, hlm 232

Perjanjian dibidang jasa-jasa merupakan salah satu hasil utama dari putaran Uruguay, perjanjian ini merupakan perjanjian baru yang secara khusus dan lengkap yang menentukan aturan main dibidang perdagangan jasa-jasa. Perjanjian ini mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan perjanjian dibidang *Trade in Goods* yang terurai di dalam perjanjian GATT yang dirumuskan pada tahun 1947 dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian pada periode selanjutnya. Dibidang *service*, pada akhir Perundingan Uruguay Round hasil yang dikeluarkan adalah⁶⁴.

- a. *Framework Agreement*
- b. *Initial Commitments*.
- c. *Sektoral Annex*, yang terdiri dari: *annex untuk Article II Exemption*, *annex untuk Movement of Natural persons supplying Service*, *annex untuk financial Service*, *annex untuk Telecommunication*, *annex untuk air Transportation Service*, dan *annex Mengenai Negotiations on Basic Telecommunications*.
- d. *Ministerial Decisions dan Understanding*, yang terdiri dari *Decision of institutional arrangements for the GATS*, *Decisions on Certain Dispute settlement Procedures for GATS*, *Decisions concerning Pharagraph (b) of Article XIV*, *Decicion on Negotiation on Basic Telecommunications*, *Understanding on commitments in Financial Sevice*, *Decisions Concerning*

⁶⁴ *Ibid*, hlm 234

Professional Service, dan Decision on Movement of Natural Persons.

ke wilayah negara Sebagai perjanjian yang juga mempunyai cakupan yang sangat luas, maka prinsip-prinsip umum yang ada didalam GATT untuk *Trade in Goods* berlaku pula untuk *Trade in Service* atau perdagangan jasa-jasa yang tercantum secara eksplisit didalam perjanjian GATS. Prinsip-prinsip utama yang terurai dalam GATS yaitu: MFN atau *Progresif Liberalisation* atau liberalisasi secara bertahap, disamping aturan umum lainnya.

Namun tidak semua sektor-sektor dibidang jasa dapat mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum pada *Framework Agreement* sepenuhnya. Pada sektor-sektor tertentu, diperlukan berbagai penyesuaian yang pada dasarnya menyimpang dari prinsip umum yang ada dalam *Framework Agreement*.

Untuk dapat mengakomodasi hal-hal khusus yang berlaku dalam sektor-sektor tertentu, yang dalam istilah teknisnya, dikenal sebagai sektoral specificity telah disepakati adanya sektoral Agreement yang masuk sebagai Annex dari perjanjian GATS. Sektor-sektor yang memerlukan sektoral Agreement tersebut adalah: telekomunikasi; keuangan ; maritim; *air transportation*; dan *movement of personnel*. Dalam *sectoral Agreement* untuk sektor-sektor tersebut yang

dirumuskan adalah pengecualian dari prinsip-prinsip yang berlaku pada *Framework Agreement*⁶⁵.

Kemudian untuk penerapan secara konkret hasil dari perjanjian tersebut dalam bentuk langkah-langkah untuk menerapkan liberalisasi, diperlukan adanya *Schedule of Commitments* (SOC) yang dibuat oleh masing-masing negara peserta, yang secara eksplisit menyatakan komitmen negara-negara peserta pada sektor Jasa-jasa. SOC yang merupakan bagian integral dari perjanjian, menyantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *Foreign Service Provider* atau pemasok jasa asing⁶⁶.

Kartadjoemena menjelaskan proses pengisian *schedule of Commitments* bahwa dalam perumusan SOC, tahap pertama adalah mencantumkan sektor-sektor dimana negara peserta bersedia melakukan komitmen. Setiap negara peserta bersedia melakukan komitmen. Setiap negara-negara peserta wajib menegaskan sektor-sektor yang akan dibuka atau telah dibuka terhadap pihak asing. (Prinsip yang berlaku dalam teknik pengisian SOC adalah prinsip *positive list*)⁶⁷.

Dengan demikian pada sektor dimana negara yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuka dalam rangka perjanjian putaran Uruguay, maka sektor tersebut tidak termasuk dalam daftar

⁶⁵ *Ibid*, hlm 244

⁶⁶ *Ibid*, hlm 244-245

⁶⁷ *Ibid*, hlm 245

yang akan diliberalisasikan pada tahap itu. Dengan kata lain penunjukan mengenai sektor sektor yang akan dibuka menerapkan prinsip *positive list*.

Hal tersebut berarti sektor yang tidak tercantum dalam *Schedule of Commitment* merupakan sektor yang sementara tidak atau belum terbuka untuk pemasok jasa asing dalam rangka perjanjian putaran Uruguay. Namun secara riil, suatu negara dapat membuka sektor lebih banyak dari apa yang tercantum dalam *Schedule of Commitment*. Akan tetapi untuk sektor tersebut, negara yang bersangkutan tidak terikat oleh perjanjian Putaran Uruguay sehingga dapat mengubah aturan tanpa kontroversi dalam WTO.

Tahap kedua setelah negara-negara peserta menyatakan sektor-sektor yang prinsipnya akan dibuka untuk pihak asing dan tunduk pada aturan permainan putaran Uruguay, negara yang bersangkutan tersebut kemudian mencantumkan dalam *Schedule of Commitment* transaksi dan ruang gerak yang boleh dilakukan oleh *Foreign Service Providers* atau pemasok jasa asing dalam sektor yang ditentukan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemasok jasa asing menjadi bahan negosiasi untuk saling tukar menukar konsesi.

Apabila negara yang bersangkutan akan menentukan batasan ruang gerak bagi pemasok jasa asing, maka batasan tersebut harus secara eksplisit dicantumkan dalam *Schedule Of Commitments*. Apabila pembatasan kegiatan transaksi dalam sektor ini tidak

tercantum, perjanjian menganggap tidak ada pembatasan atau larangan. Dengan kata lain dalam tahap kedua penyusunan *Schedule Of Commitments*, pembatasannya diterapkan dengan sistem negative list.

Pelanggaran dalam pelaksanaan komitmen yang telah dijanjikan dalam SOC akan menimbulkan sengketa. Apabila suatu negara, melalui mekanisme penyelesaian sengketa dianggap melanggar, maka terbuka untuk negara lain untuk melakukan *retaliasi* yang dibenarkan oleh perjanjian. Apabila negara yang merasa dirugikan adalah negara yang memiliki kekuatan besar dibidang ekonomi dan perdagangan, bentuk *retaliasi*-nya juga terasa besar⁶⁸.

Ruang lingkup jenis perdagangan jasa GATS yang disebutkan oleh Syahmin AK ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) GATS yang berbunyi : “ *This Agreement applies to measures by member affecting trade in service*”. Pasal ini mencoba memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Trade in Service* adalah perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara⁶⁹.

- a. Jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara lainnya (*cross-border*) misalnya jasa yang mempergunakan media telekomunikasi;

⁶⁸ *Ibid*, hlm 246

⁶⁹ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm 1780-180

- b. Jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada suatu konsumen dari negara lain (*consumption abroad*) misalnya turisme;
- c. Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah negara lain (*commercial presence*) misalnya pembukaan kantor cabang bank asing;
- d. Jasa yang diberikan oleh warga negara suatu negara dalam wilayah negara lain (*presence of natural person*) misalnya jasa konsultan, pengacara dan akuntan.

Dengan demikian , tampak bahwa cakupan perdagangan jasa yang diatur oleh GATS ini relatif luas dan universal. Sementara itu pengertian jasa meliputi semua sektor jasa, kecuali jasa yang ditentukan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, artinya setiap jasa yang dilaksanakan tidak dengan maksud komersial atau akan bersaing dengan pemasok jasa lainnya, misalnya otoritas moneter dalam menetapkan *exchange rates* (pasal 1 (b) dan (c) GATS)

⁷⁰

Secara lebih rinci menurut Syahmin, GATS terdiri dari 6 bagian, 29 Pasal dan 8 lampiran (annex) yang dikelompokkan kedalam 6 kelompok, yaitu⁷¹ :

- a. Kewajiban umum yang berlaku bagi semua anggota

⁷⁰ *Ibid*, hlm 180

⁷¹ *Ibid*, hlm 173-174

- b. Kewajiban khusus yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SOC) masing-masing anggota.
- c. Ketentuan pengecualian terhadap kewajiban
- d. Isu-isu untuk perundingan mendatang
- e. Annex dan keputusan menteri yang menjelaskan berbagai aspek GATS
- f. Masalah-masalah teknis, prosedural, dan administratif.

Lalu selanjutnya Syahmin menjelaskan dalam bukunya tentang kedudukan dan daya mengikat GATS⁷². Pasal 2 konvensi wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian menyatakan bahwa *treaty* merupakan suatu perjanjian dimana dua atau lebih negara mendirikan atau berusaha membangun suatu hubungan diantara mereka berdasarkan Hukum internasional. Bertolak dari itu, dapat ditegaskan bahwa perjanjian WTO merupakan salah satu bentuk dari *treaties* sehingga mengikat negara yang meratifikasinya. Sementara itu, GATS merupakan salah satu *annex* dari perjanjian WTO, yaitu *annex IB*. Pasal 1 ayat (2) Perjanjian WTO menegaskan bahwa “*the agreements and associated legal instruments included in annexes 1, 2 and 3 are integral part of this agreement, binding on all members*”. Dengan demikian, bila suatu negara menandatangani dan mengesahkan

⁷² *Ibid*, hlm 175

perjanjian WTO, dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATS juga mengikat negara tersebut⁷³.

Sebagaimana telah ditegaskan dimuka, GATS sendiri terdiri dari beberapa instrumen yang menggunakan nama yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu *Agreement* untuk GATS *Decision* untuk *Ministerial Finacial Services*. Meskipun demikian, baik *Agreement*, *ministerial decision* maupun *understanding* mengikat (*binding*) dengan alasan⁷⁴ :

- a. Pasal xxix GATS yang menetapkan bahwa “lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian in,
- b. Final act yang menyatakan bahwa ketiga instrument itu “ *embody the result of their negotiations and form integral part of this final act,*”
- c. Dalam *Informal Note by The Chairman Group Negotiations on Service (GNS) Perihal MFN Exemption an Negotiations of Initial Commitments*, tanggal 30 Januari 1992 di jelaskan bahwa” *The Adobtion of the GATS means the adobtion of the articles of the agreement, its annexes, decicions and understanding and the national schedules of commitments*”.

⁷³ *Ibid*,

⁷⁴ *Ibid*,

2. Aturan Pokok GATS

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengaturan dibidang jasa sangatlah luas seperti halnya pengaturan dibidang *Trade in Goods*. Oleh karena itu beberapa asas-asas yang ada dalam GATT juga diterapkan dalam konteks perdagangan Jasa-jasa yang tercantum dalam GATS. Semisal prinsip MFN, liberalisasi secara bertahap dsb.

Berikut ini beberapa aturan-aturan pokok dalam liberalisasi jasa yang terdapat dalam GATS :

a. *Most Favoured-Nation Treatment* (MFN)⁷⁵

Prinsip MFN merupakan sebuah asas bahwa bila ada kemudahan yang diberikan kepada suatu negara, maka kemudahan tersebut juga harus di berikan kepada negara lainnya. Ini juga merupakan prinsip utama dalam perdagangan barang yang ada dalam GATT yang juga di gunakan dalam perdagangan jasa (GATS).

MFN atau dikenal juga dengan prinsip non diskriminasi merupakan suatu kewajiban umum (*General obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditionally*).

Dalam pengaturan mengenai MFN pada pasal II paragraph 1 GATS dipergunakan Rumusan “ *...Each member shall accord immediately and unconditionally to service and service supplier of any*

⁷⁵ *Ibid*, hlm 184-185

other member, "treatment no less favourable" than it accord to like service and service supplier of any other country". Istilah "*treatment no less favourable*" juga digunakan dalam pasal XVI tentang *market acces* dan pasal XVII tentang *national treatment*.

Perbedaannya ialah dalam MFN *treatment no less favourable* yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *service supplier* dari suatu negara dengan negara lainnya, sedangkan dalam *national treatment* yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *domestic service supplier* dengan *foreign service supplier*. Sementara itu, dalam *market acces* pengertiannya adalah perlakuan yang diberikan terhadap *foreign service supplier* oleh suatu negara harus sesuai dengan persyaratan dan pembatasan yang tercantum dalam *schedule of commitment* (SOC) negara itu.

Meskipun demikian, sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Oleh karena itu, suatu anggota dapat saja memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada suatu atau beberapa anggota dibanding dengan yang diberikan kepada anggota lain sepanjang anggota lain tersebut diperlakukan minimal sesuai dengan yang dicantumkan dalam SOC. Akan tetapi, suatu negara tidak dibenarkan untuk memberikan perlakuan yang lebih sedikit dari yang dicantumkan dalam SOC kepada suatu atau beberapa anggota (misalnya berdasarkan prinsip *resiprositas*).

b. *Protecting Through Specific Commitments*⁷⁶

Dalam hal proteksi, perdagangan jasa berbeda dengan barang. Dalam perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan tarif tersebut tidak bisa dilaksanakan karena jasa-jasa itu sendiri, mengingat sifatnya yang abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melalui pelabuhan (*Customs*) sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan dalam perdagangan jasa adalah dalam bentuk SOC yang dibuat masing-masing negara sesuai dengan keadaan negara tersebut yang kemudian dirundingkan dengan mitra dagangnya.

SOC pada hakikatnya mengandung suatu “*reservation*”, artinya negara yang membuat SOC tersebut tunduk pada ketentuan GATS dengan disertai kondisi, pembatasan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam komitmennya tersebut.

SOC ini diatur pada bagian III yang terpisah dari bagian II GATS yang merupakan *general obligation*. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *Schedule of Commitment* bukan merupakan *automatic obligation*, tapi merupakan *specific obligation*. Artinya yang menjadi kewajiban adalah sesuai dengan yang tercantum dalam SOC negara yang bersangkutan.

Dalam bagian III GATS (*specific commitments*) dikenal tiga macam komitmen, yaitu:

⁷⁶ *Ibid*, hlm 186-188

1. Komitmen market acces
2. Komitmen *national treatment*; dan
3. *Additional commitments*.

Tiga macam komitmen ini digabung jadi satu dalam SOC dari masing masing negara.

SOC dari masing-masing negara sesuai dengan pasal XX paragraph 3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS. Dengan demikian SOC tersebut mengikat bagi negara yang membuatnya. Dengan SOC ini, tercermin juga suatu prinsip, yaitu prinsip liberalisasi dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap (*progressive liberalization*) sesuai dengan keadaan dan kemampuan negara masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal XIX GATS.

c. Transparansi⁷⁷

Prinsip Transparansi ini diatur dalam pasal III GATS yang mewajibkan semua anggota mempublikasikan semua peraturan perundangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS. Disamping itu, juga diwajibkan untuk memberitahukan *Council For the Trade and Service* (salah satu “badan” dalam WTO) atas setiap perubahan atau dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru yang berdampak

⁷⁷ *Ibid*, hlm 191-192

terhadap perdagangan jasa yang dicantumkan dalam SOC. Pemberitahuan ini minimal dilakukan sekali dalam setahun.

Kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh semua anggota adalah pembentukan “*enquiry point*”. *Enquiry point* ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan informasi spesifik bagi setiap anggota mengenai seluruh masalah tentang perdagangan Jasa. *Enquiry point* ini sudah harus berdiri paling lambat 1 Januari 1997

d. Peningkatan partisipasi negara yang sedang berkembang (*Developed Country*)⁷⁸

Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu kepada negara-negara berkembang diberikan perlakuan khusus. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang dalam penyampaian SOC. Penyampaian SOC ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi *original member* WTO (pasal 11 WTO). Kepada negara sedang berkembang (*least developing country*), Indonesia tak termasuk kriteria ini, diberikan waktu sampai dengan April 1995, sedangkan untuk negara lainnya batas waktu penyerahan adalah 15 Desember 1993.

Disamping itu, kepada negara sedang berkembang juga diberi kemudahan dalam rangka meningkatkan partisipasinya melalui perundingan SOC yang menyangkut:

⁷⁸ *Ibid*, hlm 192-194

1. Peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efisiensi serta daya saing sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi secara komersial;
2. Perbaikan akses terhadap jaringan distribusi dan informasi; dan
3. Liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (pasal IV(1) GATS.

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara yang sedang berkembang adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk membuka pasar. Kepada mereka diberikan fleksibilitas yang cukup untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunannya. (pasal XIX ayat (2). GATS

Selanjutnya, dalam rangka membantu negara sedang berkembang, negara maju diwajibkan untuk mendirikan “*contact point*” untuk membantu negara berkembang dalam mengakses informasi mengenai pasar masing-masing negara maju. Informasi tersebut meliputi :

1. Aspek komersial dan teknis dari pemasok jasa;
2. Pendaftaran, pengakuan dan cara memperoleh kualifikasi profesional; dan
3. Tersedianya teknologi jasa (pasal IV (2) GATS.

e. Integrasi Ekonomi⁷⁹

Kerja sama regional telah lama dipandang sebagai pengecualian dari klausula MFN dalam perjanjian perdagangan. Meskipun demikian, WTO secara prinsip tidak melarang anggotanya untuk bergabung dengan organisasi kerjasama ekonomi regional seperti NAFTA (*Nort America Free Trade Agreement*), atau mengadakan perjanjian liberalisasi perdagangan jasa antara dua atau lebih negara, asal saja memenuhi beberapa kriteria yang rinci dan kompleks sebagaimana diatur dalam pasal V GATS.

f. Liberalisasi bertahap

Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua anggota WTO untuk melakukan putaran negosiasi yang berkesinambungan yang dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya perjanjian WTO (sejak 1 januari 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan *measures* yang dapat berdampak buruk terhadap perdagangan Jasa. Meskipun demikian, proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing (Pasal XIX ayat(1) GATS). Ketentuan dalam pasal XIX dapat digunakan oleh negara maju untuk menekan negara berkembang untuk melakukan perundingan selanjutnya⁸⁰.

Dalam pada itu, komitmen yang telah diberikan dalam rangka perundingan putaran Uruguay, dan telah menjadi annex dari GATS, pada

⁷⁹ *Ibid*, hlm 194-195

⁸⁰ *Ibid*, hlm 195

prinsipnya tidak boleh ditarik, diubah dan/atau dikurangi. Perbaikan hanya dimungkinkan apabila dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan komitmen. Penarikan dan/atau perubahan komitmen yang diberikan hanya dapat dilakukan dengan pembayaran kompensasi kepada anggota yang dirugikan (Pasal XXI GATS)⁸¹.

g. Keadaan darurat

Escape Clauses merupakan ketentuan yang penting dalam semua perjanjian internasional, yang hanya diberlakukan dalam kondisi atau kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

Secara umum, *escape clause* membolehkan suatu anggota dalam kondisi tertentu, untuk sementara menghindar dari satu aspek perjanjian tanpa merusak tujuan dari perjanjian tersebut secara keseluruhan. *Escape Clause* dalam suatu perjanjian memberikan kepastian bagi penandatangan bahwa dalam situasi darurat, mereka dibenarkan untuk sementara menghindar dari komitmen yang telah diberikan⁸².

Dalam GATS anggota dalam keadaan darurat juga dibenarkan untuk melakukan penyimpangan sementara dari komitmen yang diberikannya. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan dalam hal kesulitan Negara pembayaran. Dalam kondisi seperti ini anggota diperkenankan melakukan pembatasan-pembatasan didalam perdagangan jasa yang telah

⁸¹ *Ibid*, hlm 196

⁸² *Ibid*,

dicantumkan dalam SOC-nya. Pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat⁸³:

1. Tidak menimbulkan diskriminasi diantara sesama anggota;
2. Konsisten dengan ketentuan-ketentuan *International Monetary Fund* (IMF)
3. Menghindarkan kerugian komersial, ekonomi dan keuangan anggota lainnya;
4. Tidak melebihi hal-hal yang perlu untuk mengatasi keadaan;
5. Harus bersifat sementara dan harus dihapuskan secara bertahap.

Tindakan pengamanan darurat, selain masalah kesulitan neraca pembayaran yang dapat dilakukan anggota, masih akan dirundingkan secara multilateral. Perundingan tersebut sudah harus dimulai paling lambat tiga tahun setelah berjalannya WTO. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk mempelajari kesulitan apa saja yang mungkin timbul setelah berjalannya GATS, mengingat perdagangan jasa belum diatur sebelumnya⁸⁴.

3. Implikasi Pelaksanaa GATS

Dalam GATS terdapat sejumlah persyaratan dengan implikasi kelembagaan yang pada umumnya berhubungan dengan aspek transparansi, notifikasi dan pertukaran informasi. Terdapat persyaratan bahwa setidaknya sekali dalam satu tahun negara anggota harus

⁸³ *Ibid*, hlm 197-198

⁸⁴ *Ibid*, hlm 198

menyampaikan informasi kepada *Services Council* tentang adanya peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada, dimana hal-hal tersebut berakibat terhadap perdagangan jasa yang dicakup dalam komitmen akses pasar dan perlakuan nasional negara anggota tersebut.

Setiap negara anggota harus membentuk satu atau lebih *enquiry points* untuk menyampaikan informasi semua tindakan yang berkaitan atau berakibat terhadap beroperasinya GATS. Sebagai ketentuan umum, *enquiry points* dimaksud harus terbentuk dalam waktu 2 tahun sejak diberlakukannya persetujuan pembentukan WTO.

Negara anggota harus membentuk *judicial, arbitral* atau *administrative tribunals/procedures* yang atas permintaan penyedia jasa dapat memberikan tinjauan yang tepat, obyektif dan netral atas keputusan-keputusan administratif yang berakibat pada perdagangan jasa.

Dalam rangka melaksanakan berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perijinan (*licensing*) agar berdasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai.

4. Penyelesaian Sengketa

sistem dan prosedur penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau lebih dikenal dengan singkatan DSU (*Disputes settlement Understanding*) yang merupakan annex 2 dari perjanjian WTO.

Understanding ini berlaku untuk seluruh sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian WTO beserta Annexnya.

Sama halnya seperti dengan GATT, tujuan utama dari penyelesaian sengketa berdasarkan WTO adalah menyelesaikan sengketa secara damai diantara para pihak tanpa mengikutsertakan keterlibatan pihak ketiga. Para pihak bebas untuk menggunakan cara-cara penyelesaian apa pun tanpa menyerahkannya kepada badan panel. Menurut Pasal 3 para.7 DSU: '*...A solution mutually acceptable to the parties to a dispute and consistent with the covered agreements clearly to be preferred.*'⁸⁵

Dalam GATS, apabila suatu anggota merasa dirugikan akibat tindakan anggota lain meskipun tindakan anggota lain tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan GATS (*Nonviolation*), anggota yang dirugikan dapat meminta agar diselesaikan berdasarkan DSU(*Nonviolation Complaints*). Dalam sistem WTO, jenis Complaint yang dapat diajukan sebagai pengaduan adalah⁸⁶:

1. *Violation complaint*. Diajukan oleh salah satu pihak terhadap anggota lain akibat pelanggaran aturan WTO yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang mengajukan complaint yang secara sadar atau tidak telah dilakukan oleh pihak yang melanggar adalah suatu Violation complaint.

⁸⁵ Huala Adolf, 2005, *Penyelesaian Sengketa dagang Dalam WTO*, Cv Mandar Maju, Bandung, hlm 77

⁸⁶ H.S Kartadjoemena, 2000, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 204-205

2. *Non-violation complaint*. Dapat diajukan apabila terjadi kerugian yang dihadapi oleh pihak lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu pihak dalam perjanjian, walaupun tindakan tersebut tidak melanggar WTO. Dengan demikian maka, dalam hal ini sengketa timbul akibat tindakan yang tidak melanggar aturan tetapi merugikan pihak lain dan dikenal sebagai *non-violation complaints* karena keuntungan yang telah diraih dari perjanjian telah ditiadakan akibat tindakan yang diambil salah satu anggota.
3. *Situation complaint*. Anggota dapat mengajukan komplain apabila suatu “situasi” yang tidak tercakup dalam kategori *non-violation complaint* tetapi menimbulkan *nullification* (dimana keuntungan yang telah diraih oleh negara anggota “ditiadakan” oleh anggota lainnya) atau *impairment* (keuntungan yang telah diraih oleh negara anggota “dirusak” dan “diganggu” oleh anggota lainnya) dari keuntungan yang telah diperoleh melalui negosiasi.

Selanjutnya secara ringkas, ada beberapa tahapan prosedur menurut aturan WTO yaitu⁸⁷ :

- a. Tahap I, yaitu Konsultasi. Pihak yang mempunyai masalah akan melakukan konsultasi. Hal tersebut dilakukan secara bilateral antara kedua pihak yang bersangkutan. Proses ini dapat dilakukan dalam suasana yang tidak terlalu formal. Namun pihak yang diadukan harus

⁸⁷ *Ibid*, hlm 193-194

member jawaban dalam waktu 10 hari terhadap permintaan untuk konsultasi

- b. Tahap II, Pada tahap ini, prosesnya menjadi lebih formal dan mengikuti suatu prosedur yang lebih ketat, dengan mewajibkan membentuk sebuah panel. Namun sebelum mekanisme yang otomatis tersebut berjalan, ada tahapan sebelumnya yang dapat ditempuh diluar mekanisme panel.
- c. Tahap II(a), penyelesaian diluar panel. Pihak yang tidak berhasil menyelesaikan sengketa dengan konsultasi mempunyai pilihan untuk tidak menyerahkan perkaranya langsung ke *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disingkat DSB). Jalur lain yang dapat dipilih adalah menyetujui jalur *good office*, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Jalur diluar panel yang lebih normal adalah melalui arbitrase sebagai jalur alternatif. Namun bila masih belum berhasil, maka lembaga panel dapat diminta untuk dibentuk menangani masalah tersebut.
- d. Tahap II(b), penyelesaian sengketa melalui panel. Mengharuskan adanya panel selambat-lambatnya pada sidang (DSB) yang diadakan setelah permintaan penyelesaian sengketa diajukan, kecuali ada consensus DSB memutuskan lain. Perjanjian juga menentukan jadwal untuk merumuskan kerangka acuan maupun komposisi panel.
- e. Tahap III, yaitu Naik Banding melalui *Appellate Body*. Setelah panel dibentuk dan melakukan tugasnya dan memberikan pandangan, terdapat pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak

yang tidak puas dapat mengajukan permohonan untuk naik banding kepada *Appellate Body*. Setelah pihak yang bersengketa menempuh jalur tersebut, maka keputusan badan banding tersebut menjadi mengikat.

- f. Tahap IV, notifikasi tentang implementasi. Setelah laporan *Appellate Body* diadopsi oleh pihak yang tersangkut sengketa harus menotifikasikan niatnya mengenai implementasi dari keputusan yang telah diadopsi. Apabila ada kesulitan dalam melaksanakan keputusan DSB, maka pihak yang bersangkutan diberi waktu yang dianggap wajar.
- g. Tahap V, Retaliasi sebagai pelaksanaan keputusan. *Understanding* atau DSU menentukan bahwa dalam kurun waktu yang ditentukan, pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang diberikan apabila pencabutan tindakan yang melanggar aturan WTO tidak dapat dilakukan. Bila kompensasi tidak berhasil disetujui, pihak penggugat dalam sengketa dapat meminta otorisasi DSB untuk menanggukkan konsesi yang pernah diberikan kepada pihak pelanggar yakni mengambil tindakan retaliasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO merupakan tameng hukum bagi negara sedang berkembang untuk melindungi hak-haknya berdasarkan perjanjian WTO. 3 Mekanisme penyelesaian sengketa dagang dalam WTO mensyaratkan semua sengketa atau perbedaan dibidang

masalah perdagangan untuk diselesaikan sesuai dengan cara-cara yang ada di perjanjian-perjanjian WTO⁸⁸.

Hal tersebut berarti bahwa cara-cara sepihak seperti melalui retaliasi sepihak, penjatuhan sanksi sepihak atau ancaman perdagangan sepihak, secara praktis dan hukum adalah haram. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di WTO, telah memberikan derajat prediktabilitas terhadap sistem perdagangan dunia⁸⁹.

D. *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*

Dari sisi kerja sama, diawal pembentukan ASEAN (Association of South East Asian Nation) pada tahun 1967, ASEAN lebih di tujukan kepada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN Terdiri dari sepuluh negara yang begrgabung kemudian, yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999). Kerjasama regional ini semakin diperkuat dengan smangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai. Namun, kerjasama regional ASEAN memiliki karakteristik tersendiri antara lain

⁸⁸ Huala Adolf, 2005 *Op.cit*, hlm 168-169

⁸⁹ *Ibid*,

tercermin dari baru dibentuknya secretariat ASEAN hamper 10 tahun setelah pendiriannya (1976) dan komitmen kerjasama yang lebih didasarkan pada “ASEAN Way”⁹⁰.

Kerjasama ekonomi antarnegara ASEAN dan Kerjasama ASEAN dengan kawasan lain adalah bentuk lain dari Aktifitas ASEAN sebagai organisasi regional. Kerjasama ekonomi bukanlah target utama ASEAN, Tetapi kebutuhan ekonomi masing-masing negara mendorong perlunya pemikiran tentang kerjasama regional dalam bidang ekonomi sebagai salah satu pusat aktifitas. Sekalipun harapan sangat tinggi, dalam kenyataannya kerjasama ekonomi tidak semudah yang dibayangkan para pelaku ASEAN⁹¹.

Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerjasama regional – termasuk krisis ekonomi 1997- para pimpinan negara ASEAN kembali memformulasikan “ASEAN vision 2020” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu : “...as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bounded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies”⁹².

Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN *Economic Community* (AEC atau

⁹⁰ Aida s Budiman (Dkk) , 2008, Masyarakat Ekonomi Asean 2015 , *PT Elex Media Komputindo*, Jakarta hlm 1

⁹¹ Bambang Cipto , 2010, Hubungan Internasional di Asia Tenggara , *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm 243

⁹² Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 1

masyarakat ekonomi ASEAN-MEA), ASEAN *Security Community* (ASC) dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan dikawasan. Konsep pelaksanaan dalam enam tahun pertama dipandu dalam *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada 1998⁹³.

Dalam perkembangan realisasi konsep MEA selanjutnya, dirumuskan tujuan akhir integrasi ekonomi, yakni mewujudkan ASEAN Vision 2020 pada Deklarasi Bali concord II, oktober 2003. Pencapaian dilakukan melalui lima pilar, yaitu aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Berbagai kerjasama ekonomi dilakukan, khususnya dibidang perdagangan dan investasi, dimulai dari *preferential Trade Arrangement* (PTA 1977), ASEAN *Free Trade Area* (AFTA 1992), ASEAN *Framework Agreement on Service* (AFAS, 1995) dan ASEAN *Investment Area* (AIA, 1998), kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerjasama dibidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mencapai MEA⁹⁴.

1. Struktur Organisasi ASEAN

Dari segi struktur proses pembuat kebijakan, Sejak awal pembentukannya, sidang menteri-menteri luar negeri (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) merupakan badan penentu kebijaksanaan dan

⁹³ *Ibid*, hlm 2

⁹⁴ *Ibid*,

pengambilan keputusan tertinggi dan bertanggung jawab atas perumusan garis-garis kebijaksanaan dan kordinasi semua kegiatan ASEAN. Kegiatan ASEAN diantara sidang menteri luar negeri yang diadakan sekali setahun (dank arena itu juga disebut sidang tahunan) dilanjutkan ASEAN *Standing Commite* (ASC) yang terdiri dari menteri luar negeri negara tuan rumah sebagai ketua dan para duta besar negara-negara anggota yang ditempatkan di negara tuan rumah itu sebagai anggota.⁹⁵

Setelah Piagam ASEAN, struktur organisasi ASEAN mengalami banyak perubahan. Struktur organisasi ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN adalah sebagai berikut⁹⁶:

- a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang melakukan pertemuan 2 kali setahun termasuk KTT ASEAN dan KTT ASEAN lainnya.
- b. Dewan Koordinasi ASEAN yang terdiri atas para menteri luar negeri ASEAN. Dewan ini bertugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN
- c. Dewan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilar komunitas ASEAN
- d. Badan-badan sektoral tingkat menteri
- e. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari wakil tetap negara ASEAN pada tingkat duta besar. Komite ini berkedudukan di Jakarta.

⁹⁵ C.P.F Luhulima, 1997, ASEAN Menuju Postur BARu , *Centre for Strategic and International Student*, Jakarta, hlm 47

⁹⁶ *ASEAN Selayang Pandang*, 2011, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hal 14

- f. Sekretaris Jendral ASEAN yang dibantu oleh 4 orang wakil sekretaris jendral dan sekretariat ASEAN.
- g. Sekretariat nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal dimasing-masing negara ASEAN.
- h. Badan HAM ASEAN yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara.
- i. Yayasan ASEAN yang akan membantu sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN termasuk pembentukan identitas ASEAN.
- j. Entitas yang berhubungan dengan ASEAN

2. Tujuan dan Prinsip ASEAN⁹⁷

Tujuan ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.
- b. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.
- c. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari segala senjata pemusnah massal.

⁹⁷ ASEAN *Selayang Pandang*, 2011, *Op.cit*, hlm 10-13

- d. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
- e. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat aliran bebas barang, jasa, dan investasi; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.
- f. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.
- g. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan dan aturan hukum yang baik, dan memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN.
- h. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara, dan tantangan lintas-batas.
- i. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.

- j. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN.
- k. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
- l. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang bagi rakyat ASEAN.
- m. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang didalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari proses integrasi dan komunitas ASEAN.
- n. Memajukan intensitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.
- o. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan para mitra eksternal dalam akstektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Dalam proses mencapai tujuan tersebut negara-negara *ASEAN* berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN.
- b. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lain dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional.
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
- e. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN
- f. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
- g. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
- h. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial.
- j. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui negara-negara ASEAN.
- k. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk penggunaa wilayahnya yang dilakukan oleh

negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara ASEAN.

- l. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dan keanekaragaman
- m. Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan keluar, inklusif, dan nondiskriminatif.
- n. Memegang teguh prinsip berpegang teguh pada aturan perdagangan multilateral dan rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar

3. Asean Economic Community (AEC) 2015

Pada pertemuan puncak ASEAN di Bali Tahun 2003 para pemimpin ASEAN mendeklarasikan langkah-langkah awal menuju ASEAN Economic Community (AEC) yang direncanakan akan tercapai pada 2020. AEC adalah satu dari tiga pilar utama ASEAN *Community* (terdiri dari ASEAN *Security Community*, ASEAN Economic Community, dan ASEAN *Socio-Cultural Community*). AEC diharapkan akan menjadi

dasar bagi perdagangan barang, jasa, investasi, teknologi dan sumberdaya manusia antar negara ASEAN⁹⁸.

AEC dibentuk sebagai reaksi ASEAN terhadap agresifitas Cina dan India yang sangat efektif dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Disamping itu, Cina dan India yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar manusia jelas jauh lebih menarik investor barat daripada ASEAN. AEC sangat diharapkan akan membuat ASEAN mampu menarik kembali arus investasi asing langsung yang mulai mengarah ke kedua negara raksasa tersebut⁹⁹.

Pada pertemuan menteri ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Ministers/AEM*) ke 39 tahun 2007 disepakati mengenai naskah cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN beserta jadwal strategis yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC tahun 2015¹⁰⁰.

Berkaitan dengan disepakatinya konsep cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN, pertemuan ke-39 AEM menyepakati peta jalan untuk integrasi sektor jasa logistik ASEAN (*Roadmap for ASEAN Integration of the Logistic Service Sektor*) sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan untuk menandatangani protokol untuk mengamandemen pasal-3 perjanjian kerangka kerja ASEAN untuk sektor integritas prioritas (*Protocol to amend article 3 of the ASEAN Framework Agreement for the*

⁹⁸ Bambang Cipto, *Op.cit*, hlm 248

⁹⁹ *Ibid*,

¹⁰⁰ *ASEAN Selayang Pandang*, 2011, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hal 24

integration of the Priority sector). 12 sektor prioritas yang dimaksud adalah produk-produk yang berbasis pertanian, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tekstil, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistic.¹⁰¹

Cetak biru MEA memuat empat kerangka kerjasama atau pilar MEA, yaitu¹⁰² :

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil dan aliran modal yang lebih bebas.
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian Global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 25

¹⁰² Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 15-16

ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antar individu anggota. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota harus diperkecil sehingga *playing field* antar negara anggota menjadi setara. Hal ini perlu dilakukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global yang menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antar negara anggota ASEAN¹⁰³.

Secara teknis pencapaian MEA 2015 menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang akan diperkuat dengan penguatan institusi dan inisiatif yang terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. sebagai contoh, untuk elemen aliran bebas barang, inisiatif penurunan tarif dan non tarif serta fasilitas perdagangan menuju aliran bebas barang MEA 2015 didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan mekanisme yang ada mulai dari *Preferential Tariff Arrangement* (PTA), *ASEAN Free Trade Area* dan

¹⁰³ *Ibid*, hlm 16

dilanjutkan oleh konsep cetak biru MEA. Hal yang sama juga terjadi pada elemen-elemen lainnya didalam pilar ini¹⁰⁴.

Kemudian dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun ASEAN *baseline Report* (ABR) yang berperan sebagai *scorecard* dengan indicator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun oleh sekretaris jendral ASEAN kepada para menteri dan kepala negara /pemerintahan semua negara ASEAN. ABR memuat kondisi dasar yang menjadi acuan evaluasi implementasi tiga pilar Masyarakat ASEAN (Keamanan, Ekonomi dan Sosial-Budaya), ukuran kerjasama regional, dan panduan dalam mempersempit gap pembangunan antar negara anggota. Tahun dasar yang digunakan adalah kondisi dan situasi ASEAN pada 2003, saat Bali Concord II dideklarasikan. Dengan ABR, antisipasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pencapaian ASEAN Community dapat dilakukan sedini mungkin¹⁰⁵.

E. ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)

Di area Jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dan kebebasan perdagangan dibidang jasa melalui pengimplementasian ASEAN Framework Agreement on service (AFAS). Perjanjian ini khususnya berusaha meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang Jasa antar anggota

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 17-18

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 19

ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan scope dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS (*General Agreement Trade in Service*) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas dibidang jasa¹⁰⁶.

Dalam proses perundingan, sektor jasa memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan proses perundingan liberalisasi sektor barang. Disektor barang, perundingan liberalisasi dilakukan dengan penurunan tarif dan non tarif. Sementara di perdagangan jasa, perundingan dilakukan untuk melakukan pengurangan atau penghilangan hambatan dalam empat cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (*mode of supply*). Keempat mode of supply dalam perdagangan jasa adalah sebagai berikut¹⁰⁷.

1. Mode I (*cross-border supply*) merupakan jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia Jasa luar negeri dengan pengguna didalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.
2. Mode 2 (*consumption Abroad*) merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia Jasa diluar negeri kepada konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia Jasa. Contohnya pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di Singapura.

¹⁰⁶Hadi Soesastro (ed), 2000, A New ASEAN in a New Millenium,*Centre for Strategic and International Student*, Jakarta, hlm. 215

¹⁰⁷ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 128

3. Mode 3 (*commercial Presence*) merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia Jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen. Contoh : pendirian rumah sakit milik Singapura di Indonesia.
4. Mode 4 (*movement of individual service providers*) merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen, contohnya dokter Singapura melakukan praktik di Indonesia.

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk ¹⁰⁸:

- a. Meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efesiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN.
- b. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
- c. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.

¹⁰⁸ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm 7

1. Cetak biru Sektor Jasa MEA¹⁰⁹

Sebagai tindak lanjut dari disepakatinya cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC *Blueprint*) pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura pada November 2007, putaran perundingan AFAS selanjutnya didasarkan pada parameter dan target waktu sebagaimana ditetapkan dalam cetak biru KEA. Cetak biru tersebut memuat langkah langkah liberalisasi perdagangan jasa

Untuk sektor jasa keuangan, cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN harus mengijinkan upaya-upaya liberalisasi sektor jasa keuangan dari negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosial ekonomi.

Negara-negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Liberalisasi melauai formula ASEAN minus X dimana negara-negara yang telah siap dapat terlebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan.
- b. Proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta sektor keuangan di setiap negara anggota.

Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN memuat langkah-langkah untuk liberalisasi sektor Jasa keuangan:

¹⁰⁹ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 10-13

- a. Secara progresif meliberalisasi hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda sebagaimana telah diidentifikasi oleh setiap negara anggota pada tahun 2015; dan
- b. Secara progresif meliberalisasi hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan “fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya”, pada tahun 2020.

2. Prinsip-Prinsip AFAS¹¹⁰

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan Prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- a. *Most Favoured Nation* (MFN) Treatment- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain.
- b. *Non discriminative*-pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian;
- c. *Transparency*- setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- d. *Progressive liberalization*- liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 8-9

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara-negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS/WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, sehingga AFAS dikenal juga dengan istilah GATS Plus.

Proses liberalisasi bidang Jasa dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi negara anggota ASEAN. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (Pre-Agreed Flexibility) dan penerapan formula ASEAN minus X. disamping itu, untuk memberikan keputusan liberalisasi, negara anggota tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmennya yang telah disepakati.

3. Mekanisme AFAS¹¹¹

Mekanisme liberalisasi perdagangan Jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*, yang didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada ASEAN *Economic Meeteng (AEM)* melalui *Senior Officials Meeting (SEOM)*. CCS mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak

¹¹¹ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 130-131

1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-masing kementrian yang menangani sektor tersebut, sebagai contoh sektor transportasi melalui *Air Transport Working Group* (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui *Working Committee on Financial Service Liberalisation* (WC-FSL) under AFAS.

Perundingan liberalisasi jasa ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (*Request and Offer Approach*). Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan dinegara masing-masing.

Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi *Common subsektor Approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu sub-sektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka diseluruh negara anggota dengan memberlakukan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan *Modified Common sub-sector Approach*. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan *Common subsektor approach* tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari empat negara menjadi tiga negara. pada

putaran kali ini ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani “*Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment on Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement on Service*” pada The 12th ASEAN *financial Minister meeting* (AFMM) di Danang, Vietnam tanggal 4 April 2008

4. Perkembangan Liberalisasi empat sektor Jasa Prioritas ASEAN

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dibidang Jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN *Framework Agreement on Service* (AFAS) pada tanggal 15 desember 2005 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibentuklah sebuah komite yang disebut dengan *Coordinating Committee on Service* (CCS) yang bertugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS¹¹².

Kemudian dalam komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu¹¹³:

- *None*, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.

¹¹² *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, *Op.cit*, hlm 23

¹¹³ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 131

- *Bound with limitations*; artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, dimasa yang akan datang, pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.
- *Unbound*, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan pasar.
- *No commitment*, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Pada tahun 2003, para menteri ekonomi ASEAN telah mengidentifikasi 11 sektor prioritas (*Wood-Based Products, automotives, agroo-based product, fisheries, rubber based products, textiles & apparels, electronics, e-ASEAN, healthcare, air travel and tourism*) dan ditambah satu sektor (*logistic*) pada tahun 2006 sehingga genap menjadi 12 sektor Prioritas. Dari 12 sektor yang dimaksud, ASEAN telah menetapkan lima sektor jasa prioritas yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan komunitas ekonomi ASEAN 2015, yaitu : jasa pariwisata, perhubungan udara, kesehatan, e ASEAN dan logistik¹¹⁴

a. Kerjasama pariwisata¹¹⁵.

Kerjasama dibidang pariwisata saat ini telah berjalan dan semakin diperkuat melalui pertemuan berbagai gugus tugas dan kelompok kerja dibawah koordinasi ASEAN *National Tourism Organisation* (NTOs)

¹¹⁴ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa , Op.cit, hlm 24*

¹¹⁵ *Ibid, hlm 24-26*

Pada tanggal 8 Januari 2009 telah ditandatangani persetujuan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) dibidang professional Pariwisata oleh wakil-wakil negara-negara ASEAN, kecuali Thailand. Menteri pariwisata Thailand belum dapat menandatangani MRA saat itu dan masih menunggu formalitas domestiknya.

Untuk lebih mengintegrasikan sektor jasa pariwisata, pertemuan menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Minister/AEM) ke-41 di Bangkok, 13-14 Agustus 2009 telah mengesahkan sebuah inisiatif sebuah kerjasama baru untuk sektor pariwisata ASEAN yaitu “ *initiative of the ASEAN National Tourism Organisations*” yang ditujukan untuk memformulasikan *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) yang merupakan sebuah rencana strategis pariwisata ASEAN 2001-2015 sebagai lanjutan dari *Roadmap for Integration of Tourism Sector* (RITS).

ASEAN juga telah menyepakati alokasi anggaran sebesar US\$5.000,- untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam ATSP serta meminta sekretariat ASEAN untuk mencari kemungkinan bantuan perdanaan dari Mitra Wicara ASEAN termasuk ASEAN *Competiveness and Enchancement* (ACE) Project.

Pertemuan menteri pariwisata ASEAN plus 3 Bulan Januari mencatat walaupun perekonomian dunia memburuk di tahun 2008 dengan adanya krisis keuangan global, jumlah turis internasional yang

berkunjung ke negara ASEAN *plus Three* pada tahun 2008 meningkat 7,29 % dari tahun 2007 dengan jumlah 93 Juta. Jumlah kunjungan turis internasional dari negara *plus Three* ke ASEAN mencapai angka 9,1 Juta orang, atau 19,01 % dari total turis internasional yang berkunjung ke ASEAN.

b. Kerjasama Perhubungan Udara¹¹⁶

ASEAN telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan dalam upaya liberalisasi dibidang jasa melalui serangkaian negosiasi ASEAN *Framework Agreement on Service*, yang telah berhasil menyelesaikan *7th Package of AFAS Commitments* pada tanggal 16 Desember 2008. Selain itu juga Telah ditandatangani ASEAN *Multilateral Agreement on The Full Liberalization of Air Freight Service and The ASEAN Multilateral Agreement on Air Service* pada pertemuan ke-14 ASEAN Transport Ministers Meeting, Mei 2009

Negosiasi Kerjasama perhubungan udara ASEAN diwadahi oleh sebuah kelompok kerja yang disebut dengan *Air Transport working Group* (ATWG) dan *Air Transport Sektoral Negotiations* (ATSN). ATWG/ATSN akan melaporkan hasil negosiasi kepada *Senior Transport Official Meeting* (STOM) yang kemudian akan diserahkan kepada ASEAN *Transport Minister* (ATM).

Saat ini ASEAN telah menandatangani ASEAN *Multilateral Agreement on Air Services* (AMAAS) di Manila, 20 Mei 2009.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 26-28

Perjanjian ini merupakan payung kerjasama ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan sipil, meningkatkan kualitas jasa penerbangan udara serta jasa-jasa terkait lainnya serta mencapai tujuan pembentukan pasar tunggal dalam bidang penerbangan pada tahun 2015 melalui berbagai upaya bertahap dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Pemberlakuan perjanjian ini masih menunggu notifikasi minimal tiga negara anggota mengenai telah selesainya proses ratifikasi atas perjanjian yang dimaksud.

Kemudian ASEAN *Single Aviation Market* (ASAM) juga sedang dikembangkan. Pengembangan ASAM merupakan pekerjaan besar dan memerlukan pembahasan menyeluruh para ahli dari seluruh negara anggota ASEAN. Tujuan akhir ASAM adalah kesepakatan *Open-Sky Policy* pada tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, AMS sepakat untuk mengaktifkan kembali *Air Transport Technical Cooperation* dan *Air Transport Economic Cooperation sub-working Group* untuk mengkaji dan memfinalisasi ASAM..

Kemudian pada kerjasama meskapai penerbangan ASEAN , diwadahi oleh sebuah pertemuan rutin yang disebut dengan ASEAN *Airlines meeting* (AAM). Perkembangan terkini dari kerjasama tersebut adalah dikeluarkannya keputusan bersama pada pertemuan ke-16 AAM bulan Juli 2009 untuk menyampaikan surat resmi kepada otoritas diseluruh bandara ASEAN agar menurunkan ongkos / tarif

bandara guna mengurangi beban keuangan yang dialami oleh meskapai penerbangan negara-negara ASEAN.

Untuk upaya finalisasi *Draft Protocol to Implement the 6th Package of the Air Transport Service Commitment Under ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS) berikut lampirannya, telah dilakukan pada pertemuan perundingan putaran ke-5 *ASEAN Air Transport Sectoral Negotiation* (ATSN) yang diselenggarakan di Penang, Agustus 2009. Hasil akhir perundingan atas draft tersebut akan disampaikan kepada STOM Guna mendapatkan persetujuan dan Selanjutnya akan disampaikan kepada ATM ke-15.

Terkait dengan perundingan subsektor ini, negosiasi untuk putaran berikutnya akan dilakukan setiap dua tahun sekali : paket ke-7 (2010-2011) dan paket ke-8 (2012-2013). Negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Modified Common Sub-sektor* yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal 3 Negara.

c. e-ASEAN

Kemajuan teknologi dan informasi telah mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi pemerintah, swasta dan masyarakat, mulai dari proses produksi sampai dengan proses pemasaran, terutama pada industri-industri yang sangat bergantung pada pengetahuan dan teknologi seperti penerbangan, kesehatan, perbankan, angkutan Laut, dan logistik. Bagi pemerintah, kemajuan teknologi informasi dan

Komunikasi membantu dalam hal pemberian pelayanan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana publik yang transparan dan menjangkau seluruh masyarakat. Untuk masyarakat dan pelaku bisnis manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah proses yang lebih cepat dan murah melalui e-Commerce, pelayanan pemerintah yang lebih transparent melalui e-Government, dan kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka suatu negara dapat membuat produksi lebih efisien, melakukan inovasi pada proses kerja yang pada akhirnya akan mengakselerasi perekonomian¹¹⁷.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003 dan perjanjian Priority Integration Sektors (PIS) pada tahun 2004 yang mencakup 11 sektor prioritas antara lain e-ASEAN, Negara anggota menandatangani ASEAN *sektoral integration Protocol for e-ASEAN* pada Tahun 2005¹¹⁸.

Protokol e-ASEAN mencakup lampiran yang terdiri dari sebuah peta jalan (*Roadmap*) yang memuat 53 langkah/rekomendasi yang menyangkut isu-isu bersama yaitu: perdagangan barang (*Non tariff Barriers, Ruler of Origin, Customs Cooperation, Promote Outsourcing, alleviate , anti dumping action*), investasi, *Intellectual Property rights* (IPR); statistik untuk perdagangan dan investasi.

¹¹⁷ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 160-161

¹¹⁸ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa , Op.cit*, hlm 28

Sedangkan yang menyangkut isu-isu khusus untuk e-ASEAN adalah; perdagangan barang (*Tarrifs*); perdagangan jasa; investasi; *movement of business personnel; skilled persons and talents; standards and conformity; ASEAN Information infrastructure (AII); capacity building; e-Government*; dan *e-Commerce*¹¹⁹.

d. Kerjasama Kesehatan

Dalam kawasan ASEAN, peranan perdagangan jasa kesehatan intra-kawasan terhadap perekonomian cukup menjanjikan mengingat kedekatan budaya dan bahasa. Faktor kedekatan tersebut akan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam proses pengobatan. Semua Mode of supply jasa kesehatan memiliki peluang bisnis dikawasan dan sangat terkait dengan perkembangan sektor jasa lain. Contohnya, dalam mode *cross border supply (Telemedicine)*, perdagangan jasa kesehatan dalam mode ini sangat terkait dengan akses terhadap perkembangan teknologi komunikasi terkini, dan membutuhkan kerja sama antara penyedia jasa telekomunikasi dan jasa kesehatan. Pengembangan pelayanan kesehatan ini akan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja medis dibidang analisis hasil-hasil labolatorium dan foto kesehatan dan mendatangkan devisa karena hasil analisis tersebut dikirim kembali

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 28-29

kepada pasien yang berada di luar negeri dengan menggunakan sarana jasa telekomunikasi¹²⁰.

Jasa pelayanan kesehatan memiliki cakupan yang luas mulai dari pendirian rumah sakit, teknologi kesehatan sampai dengan kualitas dokter dan tenaga medis lainnya., serta perlindungan pasien. Oleh karena itu upaya liberalisasi jasa kesehatan di ASEAN meliputi berbagai aspek, yaitu : investasi, penetapan standar, pengembangan kapasitas dan pergerakan pasien. Aspek investasi meliputi liberalisasi pendirian layanan jasa kesehatan di ASEAN melalui pendirian instansi yang berwenang mengurus perizinan jasa kesehatan di setiap negara ASEAN¹²¹.

Dibidang kesehatan, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, saat ini sudah ditandatangani tiga buah MRA yaitu *MRA of Nursing* yang ditandatangani pada tahun 2006, *MRA on Dental Practitioner* dan *MRA on Medical Practitioner* yang keduanya ditandatangani pada tahun 2009¹²².

Dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan *MRA on Medical Practitioners* dan *MRA on Dental Practitioners*, saat ini Indonesia melalui Konsil kedokteran Indonesia (*The Indonesian Medical Council*), yang merupakan badan Otonom, mandiri, non-struktural dan independen yang terdiri dari konsil kedokteran dan

¹²⁰ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 143

¹²¹ *Ibid*, hlm 144

¹²² *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, *Op.cit*, hlm 29

konsil kedokteran gigi, menyusun Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter gigi warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pelayanan bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.¹²³

e. Kerjasama Logistik¹²⁴

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan ASEAN *Sectoral Integration Protocol for the Logistic Service* Sektor pada 24 Agustus 2007, sektor logistik telah ditentukan menjadi sektor yang diprioritaskan untuk integrasi sesuai dengan tahapan yang harus dipenuhi menuju liberalisasi logistik diseluruh lini pada 2013. Sesuai dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN, upaya liberalisasi di sektor logistik adalah sebesar 49% pada tahun 2010-2011 dan 70% pada 2013.

Capaian terhadap target pada tahapan-tahapan tersebut akan selalu dilaporkan kepada pihak sekretariat ASEAN per-semester untuk dimasukkan kedalam *Scorecard* yang merupakan skema/mechanisme penilaian capaian masing-masing negara anggota ASEAN atas pelaksanaan cetak biru disektor terkait.

¹²³ *Ibid*, hlm 29-30

¹²⁴ *Ibid*, hlm 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilakukan penulis adalah penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan, dan akan melakukan penelitian diberbagai tempat yang menyediakan literatur-literatur yang diperlukan, Seperti Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta tempat-tempat lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tempat-tempat tersebut dipilih oleh penulis dikarenakan kemudahan akses dan tersedianya berbagai literatur yang diperlukan penulis ditempat-tempat tersebut. Selain itu juga penulis juga mengkaji makalah-makalah dan lainnya yang diakses dengan internet yang tentusaja berasal dari sumber yang kredible dan terpercaya.

B. Jenis dan sumber data

Data yang akan dikumpulkan oleh penulis bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dapat berupa data sekunder (data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, dokumen, buku, dan literatur lain) yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, juga berupa data Primer berupa hasil wawancara dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang

yang diteliti penulis, serta berbagai data dan informasi dari media elektronik, media cetak, maupun internet.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti adalah penelitian kepustakaan atau *library research* (penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku, hasil seminar, surat, bahan-bahan dari internet, serta bahan kepustakaan lain) serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas penulis.

D. Analisis data

Data yang diperoleh selama penelitian, baik itu data primer, maupun sekunder yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif untuk kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Status AFAS terhadap aturan aturan GATS

Berbicara mengenai perdagangan jasa, memang merupakan sesuatu yang baru menjadi perhatian dalam dunia perdagangan internasional, sehingga bila dibandingkan dengan perdagangan barang, memang masih jauh tertinggal dalam hal regulasi dan pengaturan sebagai suatu bidang yang sedang berada dalam usaha untuk diliberalisasi, utamanya dalam konteks GATS/WTO.

Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa sektor jasa merupakan sektor yang sama sekali berbeda dengan sektor barang, sehingga pemberlakuan regulasi yang tepat juga memerlukan pemikiran dan langkah yang tepat, sementara disisi lain, industri pada sektor jasa terus berkembang pesat seiring jalannya waktu dan bergerak semakin kompleks.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi karakteristik pokok jasa yang membedakannya dengan barang, meliputi¹²⁵ :

- a. *Intangibility*, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli.
- b. *Inseparability*, berbeda dengan barang, jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan cirri khusus dari perdagangan jasa ini.

¹²⁵ Fandy Tjiptono, 2006, Manajemen Jasa, *Andy*, Yogyakarta. hal 4

- c. *Variability*, yaitu jasa bersifat variable karena merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.
- d. *Perishability*, yaitu jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang kosong dsb, akan berlalu begitu saja/ hilang karena tidak dapat disimpan.

Dalam usaha untuk memberlakukan liberalisasi perdagangan dibidang jasa antara negara-negara ASEAN, setidaknya ada dua instrumen hukum yang menjadi pedoman, yaitu AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*) yang berfungsi sebagai instrument pengatur utama liberalisasi perdagangan jasa dalam konteks regional untuk negara-negara ASEAN, dan GATS (*General Agreement on Trade in Service*) sebagai instrument yang mengatur liberalisasi perdagangan Jasa yang berada dalam cakupan perjanjian WTO, sehingga keberlakuan Gats juga mencakup seluruh anggota WTO. Dalam hal ini, negara negara ASEAN yang juga sebagai anggota WTO sehingga pada dasarnya mereka memiliki kewajiban menghormati dan menjalankan komitmen mereka di WTO.

Kedua instrument ini diciptakan dengan tujuan utama memperlancar dan menghilangkan hambatan terhadap perdagangan bebas jasa, dimana AFAS kemudian menjadi acuan bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan akses pasar secara progresif dan menjamin perlakuan nasional yang setara bagi para penyedia jasa di kawasan ASEAN. Seluruh

isi kesepakatan dalam AFAS pada dasarnya konsisten dengan kesepakatan internasional bagi perdagangan jasa yang ditetapkan dalam GATS – WTO. Karena keberadaan AFAS mendorong negara-negara ASEAN untuk membuat komitmen melebihi apa yang telah diberikan dalam GATS.

Namun bagaimanakah sebenarnya hubungan antara kedua instrument tersebut, serta bagaimana letak interaksi keterkaitan antar keduanya serta bagaimana pengaruh kesepakatan regional AFAS tersebut dengan komitmen mereka di GATS?

1. AFAS sebagai bagian regionalisme ekonomi

Dari segi struktural antara GATS dan AFAS sama sekali tidak berhubungan. Memang kita dapat kita lihat disini adalah bahwa aturan-aturan AFAS yang ditetapkan tidak pernah lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan oleh GATS. Namun pada dasarnya hal semata-mata untuk menghormati aturan GATS, dimana negara-negara Asean sendiri merupakan anggota dari GATS/WTO. Selain itu, memang pembentukan AFAS juga didasari dengan tekad untuk melakukan liberalisasi perdagangan jasa yang lebih dalam dibandingkan dengan komitmen yang ada di dalam GATS. Hal ini pun dikarenakan komitmen dalam GATS tentunya lebih sulit dilakukan, karna mencakup skala yang sangat luas, dibandingkan bila komitmen diberikan pada skala regional. Dalam hal ini, lebih tepatnya AFAS membawahi dirinya dalam kerangka

aturan GATS. hal ini dapat kita lihat dalam salah satu tujuan AFAS dalam artikel I ayat 3:

“to liberalise trade in service by expanding the depth and scope of liberalization beyond those undertaken by member states under GATS with aim to realizing a free trade area in service”

Oleh karena itu, Pembahasan dalam bab ini kemudian menitik beratkan bagaimana bentuk hubungan aturan GATS dan AFAS sebagai aturan regional dalam untuk penerapannya. Hal ini, mengingat bahwa instrument jasa yang akan di bahas yaitu AFAS merupakan aturan regional yang dalam penerapannya hanya dalam satu area tertentu saja yang jumlah negaranya lebih kecil dengan liberalisasi yang lebih dalam. Sedang dalam waktu yang sama negara tersebut terikat dalam aturan GATS yang bersifat global.

Sebuah isu penting yang mewakili apa yang akan kami bahas pada bagian ini mengenai yaitu mengenai *economic regionalism*. ASEAN sebagai induk dari AFAS merupakan sebuah organisasi yang berbasis kawasan yaitu Asia Tenggara, dan dalam menerapkan liberalisasi perdagangan dalam hal ini jasa dilakukan dengan cakupan daerah regional mereka sendiri ASEAN. Sedangkan dalam tingkat yang lebih luas, mereka terikat terhadap GATS yang berada dalam naungan WTO.

Inti dari isu ini adalah bagaimana status hukum antara aturan-aturan liberalisasi WTO yang berlaku terhadap Negara-negara ASEAN sebagai anggota WTO, terhadap kebijakan ekonomi regional ASEAN yang hanya diterapkan diantara para anggota organisasi

regionalnya, dimana pemberlakuan kebijakan tersebut berbeda antara negara anggotanya dan non anggota.

Beberapa diantara isu-isu terkait berupa bagaimana efektifitas regionalism ekonomi tersebut, hingga isu mengenai penerapan keberlakuan prinsip-prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) untuk liberalisasi secara regional tersebut, dengan negara diluar mereka.

Pembahasan mengenai organisasi ekonomi regional ini sebenarnya mulai hangat dibicarakan sejak terbentuknya organisasi-organisasi regional yang mulai mengkhususkan dirinya pada liberalisasi ekonomi baik itu barang, jasa, maupun investasi di daerah regional mereka yang terdiri dari beberapa negara di area tertentu. Hal ini dilakukan karena mereka ingin melakukan liberalisasi dan lebih memperlancar perdagangan diantara mereka lebih dalam dibandingkan apa yang telah diatur didalam WTO. Mulailah terbentuk organisasi semacam NAFTA, AEC (*Asean Economic Community*) ASEAN, hingga Uni Eropa.

Kami kemudian mencoba melakukan perbandingan beberapa aturan-aturan dasar perdagangan jasa pada kedua instrument tersebut, yang kemudian nantinya akan menuntun kita untuk melihat bagaimana status hukum negara ASEAN dengan AFAS sebagai aturan regionalnya menerapkan aturan perdagangan jasanya terhadap negara diluar lingkup AFAS namun berada dalam Lingkup GATS.

Terkait regionalisme ekonomi terhadap perdagangan jasa, setidaknya ada tiga asas dalam GATS yang akan kami jadikan sorotan, hal

ini karena asas tersebut menjadi titik paling rentan untuk terjadinya potensi benturan aturan liberalisasi perdagangan antara GATS sebagai aturan yang bersifat global terhadap penerapan AFAS yang menjadi aturan perdagangan jasa regional. Asas dasar tersebut diterapkan secara umum oleh GATS, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan dengan apa yang ada didalam aturan AFAS, antara lain :1) MFN (prinsip non diskriminasi) yang diatur dalam artikel II; 2) Transparansi (artikel III); 3) bagian pengkajian procedural berkaitan dengan ketentuan peraturan domestic (artikel IV ayat 2); dan 4) pengakuan (artikel VII). Disamping empat ketentuan lain GATS tersebut, perlu dipahami pula dua ketentuan GATS lainnya, yaitu : Artikel XIX yang merupakan ketentuan liberalisasi progresif dan artikel IV ayat 4 berkaitan dengan kewajiban untuk mengembangkan disiplin tentang regulasi domestik.

Sedangkan dalam AFAS sendiri terdapat empat prinsip utama, yaitu: a) MFN (*Most Favoured Nation*) ; b) *Non Discriminative* ; c) *Transparency* ; d) *Progressive Liberalisation*.

Dari sini terlihat, prinsip-prinsip antara AFAS dan GATS terdapat beberapa kesamaan. berikut ini kita akan membahas mengenai beberapa prinsip terkait dengan isu yang akan kami bahas seperti prinsip *Most Favoured Nation*, *Transparency*, serta tambahan isu penting yaitu *National Treatment* atau perlakuan nasional, berikut ini kita akan membahas mengenai beberapa prinsip terkait dengan isu yang akan kami bahas.

a. Prinsip *Most Favored Nation* (MFN)

Dalam perdagangan barang, prinsip ini merupakan prinsip utama yang sangat penting. Namun berbeda halnya dalam perdagangan jasa, prinsip ini masih sulit untuk dijalankan sepenuh hati, pada kenyataannya, perdagangan jasa masih sangat longgar dalam hal penerapan prinsip MFN sehingga masih belum sepenuhnya bisa diliberalisasi, masih tergantung pada kesepakatan bidang mana yang akan dibuka oleh negara yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilihat dari aturan-aturan pengecualian MFN yang terdapat dalam GATS

Dalam GATS, prinsip *Most Favored Nation* yang diatur dalam article II pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya sehingga dikatakan juga sebagai prinsip non diskriminasi. Sesuai dengan pengertiannya

*Each member shall accord immediately and unconditionally to service supplier of any other member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country*¹²⁶
“

Artikel II tersebut diatas menyatakan perlakuan yang sama antara negara-negara anggota WTO. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap suatu negara bila dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan pada dasarnya prinsip resiprositas pun tidak diperbolehkan.

¹²⁶ Lihat GATS article II ayat 1. Text Gats sendiri diakses dari <http://www.worldtradelaw.net/uragreements/gats.pdf>, dan http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm, diakses pada rabu, 2 januari 2013, pukul 23.35 wita.

Meskipun demikian, untuk sektor jasa ini, seperti yang diungkapkan tadi bila dibandingkan dengan sektor barang memang masih sangat jauh dalam liberalisasinya. Misalkan saja pada sistem liberalisasi yang digunakan, yaitu *schedule of commitment* (SOC) dengan prinsip *positive list*. Bahwa yang diliberalisasikan hanyalah bidang-bidang jasa yang dicantumkan dalam SOC tersebut dan bidang yang tidak disebut tidak teliberalisasi. Ini dilakukan dengan alasan liberalisasi secara progresif, atau bertahap untuk memberikan waktu kepada negara negara dalam mempersiapkan sektor jasanya untuk diliberalisasi lebih lanjut.

Bagaimana dengan prinsip MFN didalam AFAS? pada dasarnya prinsip ini sama dengan apa yang ada didalam GATS, namun pada penerapannya dilapangan agak berbeda. Itu dikarenakan cara-cara yang ditetapkan dalam liberalisasi bidang jasa berbeda. Dalam GATS sektor yang diliberalisasi hanya sektor yang dinyatakan terbuka oleh negara tersebut, tanpa adanya prinsip resiprositas yang berlaku.. Sedang dalam AFAS, proses liberalisasi dinegosiasikan oleh negara negara asean hingga memenuhi syarat untuk diberlakukan dalam skala regional ASEAN, Selain itu banyak dikarenakan ruang lingkup GATS sangat luas, dan negara-negara yang masuk dalam cakupan GATS sangat beragam sumber dayanya.. Hal ini mengakibatkan GATS memberlakukan cukup banyak kelonggaran berupa pengecualian pengecualian terhadap MFN ini, bergantung kepada situasi dan kondisinya.

b. Transparansi

Terkait dengan transparansi dalam GATS, dalam artikel III disebutkan bahwa ketentuan ini menyatakan bahwa semua tindakan tindakan (*Measures*) nasional (pemerintah) yang relevan harus dipublikasikan seperti hukum, peraturan-peraturan pedoman administratif (*Administrative Guidelines*). Para anggota memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada dewan perdagangan jasa mengenai tindakan nasional yang dapat mempengaruhi *specific commitment* menurut part III (*Market Acces dan National Treatment*)¹²⁷.

Sedangkan dalam AFAS pun transparansi merupakan salahsatu prinsip utama, dimana setiap negara wajib untuk mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, dan semua keputusan/ ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah¹²⁸. Secara umum, penerapan prinsip transparansi oleh kedua lembaga tersebut sama, dengan mengharuskan mempublikasikan semua kebijakan-kebijakan dalam negeri yang berpengaruh terhadap perdagangan jasa antar negara anggota yang bersangkutan.

c. *National Treatment.*

Artikel XVII GATS merupakan ketentuan yang mengatur perlakuan nasional. Jika sebuah negara telah memasukkan sektor khusus,

¹²⁷ Joko Priyono, 2010, hukum perdagangan Jaasa (GATS/WTO), Universitas Diponegoro Press., Semarang, Hal 102

¹²⁸ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta hal 8

seperti misalkan sektor jasa perbankan, kedalam *Schedule of Specific Commitmentnya*, maka negara tersebut telah setuju untuk memberikan perlakuan nasional berkaitan dengan sektor tersebut, tunduk pada pembatasan yang dituangkan dalam *Schedule of specific Commitment*.

Namun yang perlu pula diketahui bahwa Artikel XVII menyatakan bahwa negara-negara dapat menentukan persyaratan “*National Treatment*” baik dengan perlakuan sama secara formal maupun perlakuan berbeda secara formal. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perlakuan secara formal baik sama ataupun berbeda akan dianggap diskriminatif bila perlakuan tersebut menyebabkan kondisi persaingan lebih menguntungkan jasa domestik.¹²⁹

Selanjutnya, sebagaimana yang telah kami bicarakan sebelumnya terkait organisasi regional, maka pembahasan kali ini tak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai regionalism. Asean sebagai organisasi regional yang melahirkan AFAS, yang kemudian menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap aturan yang telah ada yang bersifat global.

Berkembangnya organisasi regional di berbagai kawasan selama ini memang telah menjadi perhatian para ahli. Berbagai pendapat muncul mengenai organisasi regional ini. mulai dari yang melihat potensi bahwa regionalism ekonomi ini telah melanggar prinsip-prinsip pasar bebas yang tentunya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi, hingga disisi lain yang menganggap regionalisme ekonomi ini sendiri merupakan jalan keluar

¹²⁹Joko Priyono, *op.cit* Hlm 113-114

untuk terhindar dari persaingan pasar dunia yang tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi mereka, maka negara-negara dalam suatu kawasan membentuk kerjasama ekonomi regional yang kemudian menerapkan aturan-aturan perdagangan yang dikenal dengan FTA (*preferential Trade Area*)

Adapun tujuan utama dari pembentukan suatu blok atau integrasi ekonomi (perdagangan) regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya industri dan investasi antara negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berbeda dengan pembentukan Uni Eropa atau NAFTA, pendirian organisasi ASEAN pada awalnya sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan politik luar negeri, bukan ekonomi, setelah ancaman komunis berangsur hilang, ASEAN mulai memfokuskan pada hal-hal ekonomi¹³⁰

Namun semestinya proses perkembangan suatu organisasi regional, tidak terjadi begitu saja, sebagaimana yang disebutkan oleh pelkman (2001) pendekatan tahapan integrasi yang digunakan secara luas, adalah tahapan integrasi oleh Balassa. Balassa membagi tahapan integrasi kedalam enam tahap, yang kemudian oleh Molle dan Emerson (Crowly 2001). Mengacu pada tahapan versi Ballassa, Molle mengemukakan tahapan integrasi sebagai berikut : *Free trade Area, costum Union, Common Market, economic Union, Monetery Union, Political Union.*

¹³⁰ Tulus TH.Tambunan, 2004, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia .,Bogor, hal. 275

Perluasan tahapan integrasi Ballassa dapat dilihat dalam table. 1. Terlihat bahwa tahapan integrasi FTA (A) dan *Custom Union* (B) dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk integrasi lebih lanjut yaitu *common market* (C). dengan kata lain pembentukan common market perlu memulai terbentuknya A dan B. Namun dari pengalaman pembentukan *moterey union* (E), di beberapa kawasan terlihat bahwa terbentuknya *Monetary Union* tidak perlu melalui tahapan integrasi bentuk lain. Dolarisasi di beberapa negara di amerika latin seperti Ekuador, Argentina dan Panama, yang merepresentasikan bentuk *monetary union*, tidak didahului dengan penghapusan tarif dan kuota dengan Amerika serikat. selain itu pengalaman negara-negara Eropa timur dan Eropa tengah (*Central And Eastern European-CEE*) saat bergabung dengan EU, dimana negaran-negara tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi kriteria *common market* (pergerakan tenaga kerja tidak sepenuhnya bebas), menjadi contoh lain dari adanya dinamika baru dalam pola integrasi yang berbeda dari yang dipahami sebelumnya¹³¹

¹³¹ Aida s Budiman (Dkk) , 2008, Masyarakat Ekonomi Asean 2015 , *PT Elex Media Komputindo*, Jakarta hlm 35-36

Level integrasi	Deskripsi	Tahapan integrasi yang lebih rendah	Contoh
C	<i>Common Market</i>	FTA (A) atau <i>Custom Union</i> (B)	EU atau NAFTA
D	<i>Economic Union</i>	Tidak dipersyaratkan	<i>Competition Policy</i> di UE
E	<i>Monetary Union</i>	Tidak dipersyaratkan	Reunifikasi di Jerman, Adopsi USD di Hawaii
F	<i>Fiscal Union</i>	Tidak dipersyaratkan (namun diperlukan Harmonisasi). Mensyaratkan sebagian dari tahapan <i>Political Union</i> (G) untuk <i>fiscal Sovereignty</i>	EU pada kasus tertentu
G	<i>Political Union</i>	F diperlukan	Swiss, Amerika Serikat, Kanada

Tabel. 1
Pra kondisi integrasi ekonomi

Pendapat lain yang lebih sederhana, T. May Rudy dalam bukunya “*Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional* “ membagi tahapan integrasi kedalam 4 tahapan, yaitu¹³² :

¹³² T. May Rudy, 2002, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional*, Refika Aditama., Jakarta, hlm 43. (Lihat juga) Donald A. Ball, dkk, 2004, *Bisnis Internasional*, Salemba Empat., Jakarta, hlm 205, dan Ade Manan Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi*

1. Areal perdagangan bebas/*free trade area/FTA*

Yaitu proses integrasi mulai terjadi antara anggota secara interen, sesama negara anggota menghapuskan pemberlakuan tarif (bea cukai), tetapi masing-masing negara anggota tetap memberlakukan tarif sendiri-sendiri dalam perdagangan dengan negara non anggota

2. Kesatuan pabean/*custom union*

Custom union merupakan kelanjutan dari kawasan perdagangan bebas (FTA). Selain pembebasan tarif sesama anggota, juga terhadap non anggota diperlukan tarif yang sama besarnya, kemudian penggabungan anggota ke dalam kesatuan tunggal dengan satu masalah saja yaitu administrasi bea dan cukai contoh *Central America Common Market* (CACM).

3. Pasar bersama/*common market*

Tahap ketiga perkembangan regional dan merupakan lanjutan dari custom union. Negara anggota saling melakukan kebijakan liberalisasi arus faktor-faktor produksi sekaligus menjalankan perdagangan. Dalam hal ini tetap sama dengan *custom union* ditambah dengan penghapusan segala macam pembatasan terhadap mobilitas faktor (tenaga kerja boleh bekerja di tempat lain).

4. Integrasi ekonomi sepenuhnya/*economic union*

Yaitu merupakan bentuk integrasi yang paling sempurna dan semua negara anggota telah menyatukan serta mengharmonisasikan kebijakan ekonomi nasionalnya dan bahkan diikuti dengan kebijakan sosial. Suatu lembaga supra nasional untuk mengatur ekonomi dengan berbagai kaitannya seperti moneter, perpajakan, fiskal, sosial, industri, perdagangan, pertanian dan sebagainya

Hal yang menarik dalam hubungannya perkembangan regional ekonomi ASEAN bahwa ia tidak melewati satu fase penting dalam integrasi Balassa yaitu *Costum Union* (CU)¹³³. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kebijakan *common External Tarriff* (CET) terhadap negara bukan anggota ASEAN¹³⁴. *Costum Union* merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar anggota tetapi menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota¹³⁵.

Globalisasi memang telah menciptakan perdagangan bebas dimana negara-negara tidak berangkat dari level ekonomi yang tidak sama. Adanya kecenderungan pasar didominasi oleh negara negara maju seperti AS dan Jepang mengakibatkan negara-negara berkembang sulit untuk ikut serta dan cenderung tereksplorasi dalam kompetisi pasar. Oleh karena itu untuk memperkuat posisi mereka maka negara-negara dalam satu kawasan

¹³³ Aida S. Budimana ,op,cit Hlm 39

¹³⁴ Penetapan tariff bersama atau Common External Tarriff (CET) yang diberlakukan terhadap negara bukan anggota merupakan defenisi penting dalam Costum Union (CU)

¹³⁵ (Lihat) Arifin, R. Winantyo (dkk) (ed), 2007, Integrasi keuangan dan moneter di Asia Timur: peluang dan tantangan bagi indonesia, Elex media komputindo., Jakarta, hlm 15-35.

membentuk kerjasama regional yang kemudian menerapkan aturan-aturan perdagangan yang dikenal dengan PTA.

Preferential Trade Area atau PTA yang merupakan kebijakan untuk mengurangi hambatan perdagangan bagi negara anggota. Arvind Panagaria mendefinisikan PTA sebagai *a union between two or more countries in which goods produced within the union are subject to lower barriers than the goods produced outside the union*¹³⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan aturan-aturan perdagangan secara regional tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara yang tergabung didalamnya, bukan hanya dalam konteks perdagangan jasa, namun juga sektor lain seperti sektor perdagangan barang. Arus lalu lintas perdagangan antar negara-negara regional itu menjadi lebih lancar hingga memberikan proteksi dari fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimanakah perjanjian perdagangan dalam hal ini perdagangan jasa regional memberikan dampak terhadap negara-negara lain yang berada dalam konteks WTO, tetapi diluar dari konteks perjanjian regional perjanjian? *Does it serve as building block or stumbling Block to Global Free trade?* Dengan membatasi arus barang hanya dalam kewasannya saja bukankah sama saja dengan menutup kesempatan bagi sebagian besar negara di dunia?

¹³⁶ (lihat) Arvin panagariya "the regionalism debate": an overview", The World Economy journal, Volume 22, Issue 4 June 1999, Hlm 455–476

Namun, integrasi regional juga memiliki potensi risiko. *Pertama*, dapat menimbulkan kerugian kesejahteraan jika "efek penciptaan perdagangan" dibayangi oleh "efek pengalihan perdagangan", yaitu jika penghapusan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota menyebabkan perdagangan lebih efisien dengan negara-negara non-anggota dibandingkan jika dialihkan ke negara anggota yang kurang efisien. *Kedua*, akan menyebabkan "pengalihan efek investasi" dimana investasi sumber daya yang terbatas dialihkan ke pasar terpadu dengan skala yang lebih besar. Ketiga, ada kekhawatiran terhadap "efek mangkuk mie" ("*noodle bowl effect*"), mengacu pada potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kurangnya koherensi antara perbedaan perjanjian yang tumpang tindih. Tumbarello mengutip perjanjian bilateral yang dinegosiasikan oleh beberapa anggota dari masing-masing negara ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN, bahkan ASEAN sendiri sedang melakukan negosiasi dengan negara yang sama

Pemberlakuan PTA ini sendiri pada dasarnya secara umum telah melanggar prinsip MFN yang telah diatur oleh WTO. Melalui MFN, WTO telah menetapkan bahwa perdagangan haruslah adil tanpa adanya diskriminasi atas tarif yang dikenakan pada setiap negara. dalam menciptakan perdagangan bebas, WTO menerapkan aturan terkait perjanjian regional, demi mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi, namun pada kenyataannya perjanjian perdagangan regional tersebut telah

memberikan keistimewaan bagi negara anggotanya disatu sisi, namun kerugian disisi lain bagi negara luar .

Terkait bagaimana interaksi aturan regional FTA AFAS dibawah ASEAN dengan negara lain diluar regional ASEAN namun dibawah WTO, kita dapat melihat dua konsep utama dalam analisis Teori Vinerian, yaitu *trade creating* dan *trade diverting*.¹³⁷

Dalam regionalism *trade creating* merujuk pada kondisi ketika PTA membentuk suatu pasar internal yang besar dimana setiap anggota bisa berspesialisasi pada produk-produk berdasarkan faktor-faktor keunggulan yang dimilikinya. Jika prinsip ini dilakukan oleh semua negara anggota dan semua sumber daya produksi yang ada digunakan secara *full employment* (proses produksi mencapai titik optimal atau skala ekonomis), maka akan tercipta perdagangan dalam kawasan tersebut . Misalnya dalam ASEAN, untuk mencapai skala ekonomis, Indonesia berspesialisasi pada karet sementara Malaysia pada minyak sawit. Dengan adanya PTA maka akan lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk mengimpor minyak sawit dari Malaysia daripada memproduksi sendiri, demikian pula sebaliknya, Malaysia akan mengimpor karet dari Indonesia. Hal ini tentunya akan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara anggota.

¹³⁷ Penjelasan Terkait *trade creating* dan *trade diverting* lihat: Sjamsul Arifin(dkk), 2004, Kerja sama perdagangan Internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia,,Elex media komputindo,Jakarta, hal 45

Disamping itu, *Trade Creating* ini juga akan memberikan keuntungan bagi negara outsiders, ketika spesialisasi produksi juga melibatkan impor produk yang lebih murah tidak hanya dari negara-negara anggota saja. Sehingga walaupun masih diberlakukan hambatan tarif, perdagangan masih dapat berlangsung secara global.

Selanjutnya istilah *trade diverting* mengacu pada kondisi ketika perdagangan dalam blok-blok ekonomi akan memberikan kerugian tidak hanya bagi negara outsiders namun juga kepada negara-negara anggota blok regional itu sendiri. Hal dikarenakan negara-negara anggota yang saling meningkatkan volume perdagangan akibat rendahnya biaya impor, namun pada kenyataannya negara-negara outsider menyediakan barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Misalnya dalam hal impor teknologi ramah lingkungan. Karena tergabung dalam ASEAN dan menerapkan PTA, maka Indonesia lebih memilih untuk mengimpor produk tersebut dari Malaysia. Namun pada kenyataannya Australia yang tidak terikat perjanjian regional dengan Indonesia menyediakan produk yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya perdagangan menjadi tidak efisien dan tentunya justru akan menimbulkan kerugian baik bagi Indonesia maupun Australia.¹³⁸

Dengan menggunakan analisis Vinerian ini kita dapat melihat melihat bahwa regionalisme itu sendiri memang memiliki kelemahan-

¹³⁸ <http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-liberalisme/189-critical-review--regionalisme-ekonomi>.

kelemahan yang seringkali diabaikan oleh banyak negara. Namun pada dasarnya potensi kerugian akibat kelemahan tersebut dapat minimalisir. Negara-negara yang tergabung dalam suatu organisasi regional tentunya harus lebih “bijak” dalam memilih mitra dagang dan tidak hanya terpaku pada negara-negara se-regionnya saja.

Namun dalam menganalisis *trade creating* dan *trade diverting* tidak hanya sampai di sini. Dalam banyak organisasi regional pada kenyataannya tidak serta merta berjalan se-ideal yang diharapkan. Proteksi terutama dalam tarif tetap menjadi penghambat dan tentunya menimbulkan *trade diverting* pada produk dari negara outsider. Salah satu contoh dapat kita lihat pada organisasi regional Uni Eropa yang bahkan telah menghilangkan hambatan tarif perdagangan bagi negara anggotanya (*Free Trade Area*). Ketika misalnya, Indonesia sebagai negara di luar Uni Eropa melakukan kegiatan perdagangan, akan sangat terkendala oleh tingginya tarif impor. Belum lagi ketika komoditi Indonesia tidak mampu memenuhi standard yang ditetapkan misalnya dari segi kesehatan dan lingkungan hidup.

Adapun ketika komoditi Indonesia berhasil masuk ke pasar Uni Eropa, meski memiliki kualitas yang sama, akan tetapi masih harus bersaing dengan produk dari negara-negara anggota Uni Eropa yang sebagian besar ditawarkan dengan harga yang lebih murah karena adanya penghilangan biaya impor serta biaya transportasi yang juga lebih kecil.

Dapat diilustrasikan bahwa misalnya produk Indonesia ditawarkan seharga €100, yang kemudian dikenakan tarif impor sebesar €30 sehingga menjadi €130. Sementara produk dari Polandia ditawarkan dengan harga €110 dan tidak dikenakan tarif. Otomatis dengan sendirinya akan menciptakan trade diverting sehingga barang Indonesia akan sangat sulit untuk merebut pasar. Oleh karena itu kecil kemungkinan bagi Indonesia dan juga negara di luar Uni Eropa pada umumnya untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan regional tersebut

Dalam kaitan dengan perdagangan jasa di Asia Tenggara, maka AFAS dalam hal ini adalah sebagai FTA yang berada dalam cakupan regional ASEAN. Disisi lain negara-negara Outsiders merupakan negara-negara di dunia yang berada dalam cakupan perjanjian perdagangan Jasa WTO yaitu GATS.

Dari teori-teori yang telah kami kemukakan sebelumnya, AFAS sebagai FTA tentu saja juga tak lepas dari isu-isu diskriminasi terhadap negara-negara outsiders, dan isu mengenyampingkan bahkan ada yang mengatakan melanggar prinsip MFN. Dan mempertanyakan bagaimana bagaimana bersinkronisasi dengan GATS/WTO. Memang dalam kasus regionalisasi perdagangan jasa, perlu telaah dan kajian lebih lanjut yang berbeda, hal ini dikarenakan bentuk dari Jasa itu sendiri, dan tentu saja mengakibatkan instrumen pengaturannya berbeda sehingga proses liberalisasinya lebih rumit. Misalkan bila pada perdagangan barang GATS,

liberalisasi dilakukan secara menyeluruh, hanya dengan mengurangi tarif dan bea impor, maka sector jasa seperti dilakukan hanya berdasarkan kerelaan negara-negara yang bersangkutan dengan mengajukan sector yang dia anggap mampu bersaing, atau paling tidak dengan request dari negara tertentu tanpa adanya prinsip resiprositas.

2. Analisis posisi AFAS sebagai bagian regionalisme ekonomi terhadap aturan GATS/ WTO

Isu krusial yang difikirkan berkaitan dengan proses integrasi ekonomi adalah kemungkinan diskriminasi terhadap negara yang berada diluar anggota integrasi tersebut. Apalagi integrasi semisal ASEAN yang tidak melalui fase *Custom Union*. Sehingga terjadi diskriminasi tariff terhadap negara outsiders. Dalam perdagangan barang, hal ini memang hampir mutlak terjadi, Namun, hal ini dapat kita tinjau lebih jauh dalam sektor perdagangan jasa. Mengingat bentuknya, maka jasa ketika memasuki wilayah suatu negara, mode suplai nya tidaklah melalui bea cukai atau pelabuhan pengiriman seperti barang, tetapi melalui 4 moda seperti yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya¹³⁹. Terlebih dahulu kita melihat, Bagaimana negara-negara ASEAN memberlakukan tariff perdagangan jasa, kemudian akan kita bandingkan dengan pemberlakuan tariff oleh GATS/WTO.

¹³⁹ (Lihat) Fandi Tjiptono, *Op.cit*, hal 2-20

Dalam melakukan liberalisasi terhadap perdagangan jasa di ASEAN, AFAS memberikan pendekatan liberalisasi yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati sesuai dengan kondisi setiap negara. negosiasi dalam peliberalisasian sektor-sektor jasa dilakukan oleh negara-negara ASEAN dilakukan dalam bentuk putaran yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun untuk menyepakati sejumlah paket komitmen.

ASEAN telah melaksanakan negosiasi putaran ke-6 yang menghasilkan 8 paket komitmen. Dalam rangkaian negosiasi tersebut, setidaknya ada tiga metode pendekatan yang pernah digunakan. Pada putaran pertama (1996-1998), dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran (*Request and Offer approach*). Mengingat ini adalah putaran pertama, maka pendekatannya dimulai dengan pertukaran informasi antara negara ASEAN tentang komitmen yang telah mereka buat dalam GATS dan rezim perdagangan yang telah mereka berlakukan di negara masing masing ¹⁴⁰. Kemudian pendekatan *Common sub-sector approach*, yakni pendekatan yang didasari pada komitmen yang telah disepakati oleh minimal 4 negara ASEAN, baik dalam GATS maupun AFAS. jika subsektor tersebut telah disepakati oleh minimal 4 negara ASEAN, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka dengan memberlakukan prinsip *Most Favoured Nation*. Pendekatan ini digunakan pada negosiasi putara kedua (1999-2001)

¹⁴⁰ Integrasi ekonomi asean dibidang jasa, *Op.cit*, hal 10

Kemudian *Modified Sub Sector Aproach*, pendekatan ini pada dasarnya sama dengan *Common Sub-sector Approach*. Pendekatan ini pada dasarnya sama dengan *common subsector approach*. Pendekatan ini pada dasarnya sama dengan *common subsector approach* tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari minimal 4 negara menjadi 3 negara. Pendekatan ini mulai digunakan pada negosiasi putaran ke 3 (2002-2004) dan digunakan pada negosiasi putaran selanjutnya. Dalam putaran ke 3 tersebut, ASEAN juga telah mulai menggunakan pendekatan atau formula ASEAN minus X, yaitu 2 negara atau lebih dapat melakukan liberalisasi atas sektor jasa yang telah disepakati bersama, sementara negara-negara lain dapat menyusul setelah mereka siap.

Dari sistem pendekatan liberalisasi bidang jasa oleh AFAS yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa liberalisasi jasa merupakan sesuatu yang lebih mutlak bila dibandingkan dengan sistem liberalisasi yang dibangun oleh GATS, bila telah ada minimal 3 negara yang menyepakati untuk meliberalisasi sebuah subsektor bidang jasa, maka mau tidak mau sector tersebut harus terbuka diseluruh anggota.

Selanjutnya kita akan melihat sistem liberalisasi jasa yang dibangun oleh GATS/WTO, dimana sistem ini merupakan sistem yang berlaku di hamper seluruh dengan cakupan yang sangat luas, karena mencakup seluruh anggota WTO.

Dalam sistem GATS/WTO, kita mengenal istilah *Schedule of Commitments* (SOC). SOC ini dibuat oleh masing-masing negara peserta,

yang secara eksplisit menyatakan komitmen negara-negara peserta pada sektor jasa tertentu. SOC yang merupakan bagian integral dari perjanjian, menyantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *Foreign Service Provider* atau pemasok jasa asing.

Dalam hal ini, setiap negara memiliki kewajiban untuk mencantumkan sektor-sektor mana saja yang ingin diliberalisasi oleh negara tersebut kedalam SOC yang mereka ajukan ke WTO tanpa adanya pemberlakuan prinsip resiprositas. Olehnya dikenal istilah *positive list*. Yaitu hanya bidang bidang yang diajukan saja yang dianggap disetujui untuk dibuka atau akan dibuka terhadap pemasok jasa asing sedang sektor yang tidak diajukan dalam SOC dianggap tidak disetujui oleh pihak untuk dileberalisasi dalam rangka perjanjian GATS ini. begitupun jika suatu negara ingin melakukan pembatasan-pembatasan terhadap pemasok jasa asing, maka negara tersebut wajib untuk mencantumkan secara eksplisit pembatasan-pembatasan tersebut kedalam SOC nya. Bila pembatasan tersebut tidak dicantumkan dalam SOC, maka dianggap tidak ada pembatasan atau larangan.

Namun secara riil, suatu negara dapat membuka sektor lebih banyak dari apa yang tercantum dalam *Schedule of Commitment*. Akan tetapi untuk sektor tersebut, negara yang bersangkutan tidak terikat oleh perjanjian putaran Uruguay sehingga dapat mengubah aturan tanpa kontroversi dalam WTO.

Dari pemaparan mengenai dua sistem diatas, kita dapat melihat bahwa regulasi yang ditetapkan dalam AFAS sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan AFAS sebagai aturan perdagangan jasa regional. Pendekatan regulasi untuk meliberalisasi sektor-sektor jasa di ASEAN terlihat lebih dalam. Aturan AFAS terlihat lebih menekan negara-negara yang ada di ASEAN untuk lebih membuka sektor jasa mereka, meskipun pada dasarnya dalam membuka bidang-bidang jasa terkait masih mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan negara-negara. Sedang dalam GATS, regulasi yang diterapkan lebih lunak, hal ini kita lihat dari sistem *schedule of Commitment*. Praktis tidak ada tekanan yang berarti untuk suatu negara dalam konteks WTO untuk membuka sector jasa mereka baik itu tekanan dari segi target tenggang waktu membuka sektor tertentu, maupun target lainnya. Semua bergantung terhadap bagaimana keinginan dan kerelaan negara tersebut membuka sektor jasa tertentu terhadap penyedia jasa asing pada perdagangan mereka.

Dalam konteks umum dan dalam konteks barang pada khususnya, telah banyak dibahas mengenai perkembangan regionalisasi ekonomi yang mengarah pada berkembangnya FTA pada regional-regional ekonomi, sehingga memunculkan kondisi terjadinya diskriminasi terhadap negara-negara yang berada diluar anggota regional ekonomi yang bersangkutan atau disebut sebagai negara outsiders. Hal ini karena perbedaan tarif yang ditawarkan antara sesama negara dalam suatu daerah regional bila

dibandingkan negara diluar perjanjian regional dianggap tak terhindarkan. Dalam tulisan ini telah kami kemukakan sebelumnya teori-teori mengenai hal tersebut.

Kini Pertanyaan utamanya adalah benarkah sistem perdagangan jasa yang dibangun melalui AFAS berpotensi atau dapat memberikan dampak diskriminasi terhadap negara-negara lain yang berada diluar lingkup ASEAN, utamanya negara yang berada tergabung dalam WTO.

Terlebih dahulu kita melihat bagaimanakah negara-negara ASEAN memberlakukan tarif terhadap bidang jasa, mengingat bentuk jasa yang berbeda. Karena bentuknya pemberlakuan tarif terhadap jasa berbeda dengan barang dikarenakan bentuknya. Ketika penyedia jasa asing masuk kedalam pasar suatu negara, melalui 4 moda bergantung dari jenisnya, sehingga sulit untuk melakukan pemberlakuan tarif.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sistem hambatan perdagangan yang ada dalam perdagangan jasa karna bentuknya berbeda dari perdagangan barang. Bila barang yang masuk dalam suatu wilayah negara, maka ia melewati sebuah *destination port* dan bisa dikenakan tarif. Namun untuk perdagangan jasa karna bentuknya, maka sistem penghambat akses pasar dilakukan dengan pembatasan jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja. Juga hambatan dalam bentuk perlakuan nasional, seperti peraturan yang dianggap diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka

waktu menetap, perizinan, standar kualifikasi, kewajiban pendaftaran, serta batasan kepemilikan property dan lahan.¹⁴¹

Mari kita melihat bagaimana negara-negara ASEAN berinteraksi dalam perdagangan jasa dibawah AFAS.

Sebagaimana contoh, kita akan mulai melihat bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dalam menjalankan komitmennya di AFAS dan GATS. Dalam AFAS, komitmen negara-negara Asia Tenggara terhadap perdagangan jasa dapat dilihat melalui paket skedul komitmennya yang dicapai pada setiap putaran negosiasi¹⁴². Namun yang perlu dimengerti bahwa Skedul komitmen perdagangan jasa lebih sulit dimengerti daripada skedul tarif yang ada di perdagangan barang. Jika skedul tarif hanya mencantumkan satu tingkat tarif bagi masing-masing produk, maka skedul komitmen mencantumkan sedikitnya delapan item untuk setiap sektor: komitmen untuk akses pasar dan *national treatment* (perlakuan nasional) bagi empat moda penyediaan jasa¹⁴³.

Saat ini negosiasi bidang jasa di ASEAN telah memasuki menyelesaikan paket 7 pada 2009, dan saat ini pada tahap penyelesaian akhir pada beberapa negara tersisa untuk menyelesaikan negosiasi paket 8 AFAS. Untuk Indonesia sendiri, salah satu sektor yang diajukan pada negosiasi paket 7 adalah sektor telekomunikasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan sektor yang sama pada negosiasi paket 6 sebelumnya

¹⁴¹ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, Hal 29

¹⁴² Saat tulisan ini ditulis, negosiasi Paket 7 Skedul Komitmen AFAS telah dicapai pada Putaran Kelima Negosiasi AFAS yang berjalan antara tahun 2007 hingga 2009, dan paket 8 sedang disusun dan dinegosiasikan

¹⁴³ The ASEAN Secretariat, 2009, *ASEAN Integration in Services*, ASEAN Secretariat, Jakarta hal 13

untuk lebih ditingkatkan komitmennya. Untuk lebih jelasnya, maka kami akan membahas skedul komitmen Indonesia dibidang telekomuniikasi pada paket 7 AFAS¹⁴⁴.

3. Perbandingan Komitmen Negara ASEAN untuk AFAS dan GATS

Untuk keperluan perbandingan, maka kami mengambil Indonesia yang merupakan salah satu Negara ASEAN dan juga terdaftar sebagai anggota WTO sebagai sampel

Kominten spesifik Indonesia pada putaran perundingan paket 7 AFAS total mengajukan 10 sektor yaitu :

- a. *Sector Bussines service*
- b. *Telecommunication services*
- c. *Construction and related engineering services*
- d. *Distribution services*
- e. *Education services*
- f. *Environmental services*
- g. *Healthcare services*
- h. *Tourism and travel related services*
- i. *Transport services*
- j. *Energy services*

Untuk keperluan perbandingan, maka pada kami hanya akan membahas mengenai sektor telekomunikasi saja sebagai sampel

¹⁴⁴ Data diakses dari <http://www.aseansec.org/6636.htm>, rabu, 17 oktober 2012 pukul 14;15.

perbandingan. Untuk sektor telekomunikasi ini, sejak mengikuti komitmennya pada AFAS paket 2, Indonesia terus memperbaharui komitmennya termasuk pada perundingan AFAS paket 7 ini.

Dalam komitmen spesifik yang diajukan negara-negara ASEAN pada setiap paket perundingan AFAS setiap subsektor yang diajukan untuk diliberalisasi, maka subsektor tersebut akan dilihat dari empat moda, apakah akan dibuka pada moda 1, 2, 3 atau moda 4 pada setiap item. Kemudian setiap item moda mengenai akses pasar maupun perlakuan nasional dapat berbentuk komitmen *none*, *bound with limitations* dan *unbound*. Secara singkat, *None* berarti tidak ada hambatan dalam artian dibuka sepenuhnya, *bound with limitation*, yaitu liberalisasi tapi dengan pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen dan hanya bersifat sementara, dan *unbound* yaitu sektor yang masih tertutup bagi penyedia jasa asing.

Total terdapat 18 kolom subsektor dari sektor telekomunikasi yang diajukan oleh Indonesia pada afas paket 7 kali ini., yaitu :

- a. *Voice Telephone Services*
- b. *Packet-switched data transmission services*
- c. *Circuit-switched data transmission services*
- d. *Telex Services, Telegraph Services, Facsimile*
- e. *Private leased circuit services*
- f. *Electronic mail services, Electronic mail box*

- g. Voice mail services*
- h. On-line information and database*
- i. Electronic data interchange (EDI)*
- j. Enhanced/ value added facsimile services, including store and forward, store and retrieve*
- k. Code and protocol conversion*
- l. On-line information and or data processing (including transaction processing)*
- m. Local services: Teleconferencing Services*
- n. Long Distance and International: Services:Teleconferencing Services*
- o. Regional and National Paging Service*
- p. Internet Access Services*
- q. Computer time sharing services, Video text services*
- r. File transfer services, Home telemetering alarm, Entertainment services, Management information services.*

Sedangkan SOC bidang telekomunikasi yang diajukan Indonesia ke WTO sendiri setidaknya ada 20 kolom subsektor yang diajukan oleh Indonesia, sebagai berikut:

- a. Local service: Public switched telephone service, Circuit switched public data network services Teleconferencing services*
- b. Long distance: Public switched telephone service, Circuit switched public data network services, Teleconferencing services*

- c. *International: Public switched telephone service), Circuit switched public data network services, Teleconferencing services.*
- d. *Packet-switched public data network services.*
 - X. 25
 - Frame relay
 - Local
 - Local distance
 - International
- e. *Telex services*
- f. *Telegraph services*
- g. *Domestic: Mobile cellular telephone services.*
- h. *Domestic: Personal Mobile Cellular Communication Services*
- i. *Internet Access Services*
- j. *Domestic: Regional and National Paging Services.*
- k. *Public payphone services*
- l. *Voice mail service.*
- m. *Electronic mail services*
- n. *Computer time sharing Services.*
- o. *Video text services.*
- p. *Electronic mail box*
- q. *File transfer services*
- r. *Home telemetering alarm*
- s. *Entertainment services.*

t. Management information services

Dari pemaparan diatas, terdapat beberapa subsektor identik antara apa yang dikomitmenkan Indonesia, baik itu GATS maupun WTO. Pada pembahasan kali ini, sektor sektor identik tersebutlah yang akan kami pilih enam diantaranya menjadi objek perbandingan:

a. Management information service

b. Entertainment service

c. Home telemetering alaram

d. File transfer service

e. Electronic mailbox

f. Video text service

g. Computer time sharing Services

h. Electronic mail services

i. Voice mail service

j. Internet Access Services

k. Telegraph services

l. Telex services

m. Teleconferencing services (Local service)

n. Teleconferencing services (Long distance)

o. Teleconferencing services (international)

p. Circuit switched public data network services (Local service)

q. Circuit switched public data network services (Local service)

r. Circuit switched public data network services (Local service)

s. *Domestic: Regional and National Paging Services*

Dari 19 jenis subsektor yang dikomitmenkan yang menurut kami identik diantara kedua *schedule of commitment* tersebut, kami akan memilih 6 subsektor yaitu : *File transfer service, Electronic mail services, Voice mail service, Internet Access Services, Telegraph service, Teleconferencing services (Local service)*. Kemudian untuk keperluan sistematika perbandingan, kami telah membuat tabel perbandingan antara 6 item subsektor dari sektor telekomunikasi antara skedul komitmen GATS dan AFAS 7 ini

Dari table perbandingan yang kami sajikan, kita dapat melihat bahwa secara umum, Indonesia masih berat untuk melakukan liberalisasi secara penuh terhadap subsektor perdagangan jasa moda 3 dan 4. Untuk sektor pada moda 1 dan 2, komitmen di AFAS 7 sudah mayoritas mengajukan komitmen *none*, dalam artian sektor itu telah dibuka seluas-luasnya, Tetapi pada komitmen GATS sector moda 1 dan 2 masih terdapat komitmen yang *unbound* pada beberapa subsektor.

Dari perbandingan 1 diatas kemudian, kita dapat melihat bahwa komitmen yang diajukan oleh Indonesia terhadap sektor telekomunikasi sub sector *File Transfer Service relative* sama, baik itu pada moda 1, moda 2, moda 3 dan moda 4.

Komitmen Indonesia terhadap subsector *File Transfer service*, baik di GATS, maupun AFAS 7, untuk Moda 1 dan moda 2, telah membuka sektor untuk kedua moda tersebut secara penuh dengan mengajukan

komitmen “None” baik itu secara *market acces*, maupun MFN limitation, sedangkan pada moda 3 dan moda 4 masih dengan pembatasan pembatasan . Untuk moda 3 dan 4 pada subsektor ini juga sama antara komitmen GATS dan AFAS . sedangkan komitmen yang diajukan pada moda 3 baik itu *market acces* dan *MFN limitation*, masih bersifat *bound with limitation*, liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan yang bersifat sementara. Pada moda 4, masih dengan *bound with limitation* pada *market acces limitation*. Sedangkan pada *limitation on national treatment*, aturannya dinyatakan sama seperti komitmen masing-masing *horizontal commitment*

Secara keseluruhan terlihat dua subsektor yang menjadi sampel yaitu subsektor *File Transfer Service* (Tabel 3) dan subsektor *voice mail service* (Tabel 8), masing-masing merupakan komitmen yang identik bila dibandingkan antara komitmen di GATS dan AFAS 7

Namun pada 4 subsektor lain yang penulis ambil sebagai sampel, yaitu *Sub sector Electronic Mail Service* (Tabel 4), *Internet Acces Service* (Tabel 3), *Telegraph Service* (tabel 6), *Telecomfrencing Service (Local)* (Table 7), hanya memiliki komitmen yang identik pada moda moda tertentu saja, utamanya moda 1 dan moda 2. Namun ternyata pada moda 3 dan moda 4, komitmen-komitmen yang diajukan oleh Indonesia ternyata berbeda antara komitmen yang diajukan di GATS dan AFAS. Pada beberapa sampel subsektor terlihat bahwa komitmen untuk membuka pasar yang diajukan Indonesia terhadap AFAS 7 lebih dalam daripada apa

yang dikomitmenkan di GATS. sebagai contoh, pada subsektor *Internet Acces Service* (Tabel 5), pada *Market acces limitation* Moda 1, indonesia telah memberikan komitmen liberalisasi penuh (*None*) terhadap komitmen mereka pada AFAS 7, tetapi pada komitmen di GATS untuk moda yang sama, Indonesia masih memberikan komitmen *bound with limitations*. Indonesia masih mengeksklusifkan ijin untuk *international acces* terhadap dua perusahaan yaitu PT Indosat dan PT Satelindo hingga tahun 2005. Hal yang berbeda pun terlihat pada moda 1 dan moda2 untuk *Limitation on National Treatment*, bahwa untuk komitmen di AFAS 7 Indonesia telah memberlakukan liberalisasi penuh terhadap *Limitation on National Treatment* moda 1 dan 2. Namun hal sebaliknya justru pada komitmen *limitation on National Treatment* moda 1 dan 2 di GATS, justru pada bagian ini, Indonesia masih memberlakukan komitmen *Unbound* pada *MFN limitation* untuk kedua moda ini, dalam artian Indonesia masih belum memberikan komitmen dan masih tertutup dari penyedia jasa asing terhadap kedua moda tersebut. Begitu pula terhadap subsector *Telegraph service*(Tabel 6) *market acces limitation* pada moda 3 misalkan, pada komitmen di AFAS mensyaratkan bahwa partisipasi modal asing terhadap sector ini diperbolehkan hingga 51 persen, berbeda dengan bidang dan moda yang sama pada komitmen di GATS, penyertaan modal asing pada bidang dan moda ini hanya diperbolehkan hingga 31 persen saja.

Dari perbandingan dan pemaparan diatas kita dapat melihat bagaimana negara-negara Asean dengan aturan regional AFAS nya tetap

saja sulit untuk memperlakukan sama antara penyedia jasa domestik negara-negara asean dengan negara-negara yang berada dibawah GATS diluar cakupan AFAS ASEAN. Dari pengamatan kami tentu saja sulit untuk menyeragamkan apa yang dikomitmenkan di AFAS dan GATS bukan saja karena keduanya dipayungi oleh aturan perdagangan bebas yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan komitmen, namun tentu saja juga hal ini sebagai umum dari regionalisasi ekonomi yang terjadi.

Dengan adanya perbedaan komitmen sebagaimana diatas, maka berdasarkan teori-teori regionalisasi ekonomi (FTA) serta analisis Vinerian yang kami paparkan sebelumnya, maka secara sederhana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sektor perdagangan jasa Asean dengan payung hukum GATS pun sebenarnya tidak luput dari pelanggaran prinsip umum WTO yaitu MFN. Selain itu, AFAS sebagai perjanjian regional pun pada beberapa sektor membedakan perlakuan pada bidang dan moda yang sama antara penyedia jasa asean di lingkup GATS/WTO dan lingkup AFAS/ASEAN, sehingga bukan hal yang dapat disalahkan ketika dikatakan bahwa pemberlakuan AFAS di ASEAN pun mengakibatkan pemberlakuan yang diskriminatif antara penyedia jasa ASEAN dengan penyedia jasa dari negara-negara diluar ASEAN, dan sebagaimana teori tentang regionalism ekonomi yang dipaparkan sebelumnya bahwa hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan regionalisme ekonomi.

Namun mengenai pelanggaran umum tentang prinsip-prinsip MFN dan diskriminasi oleh GATS masih dapat dibantahkan dengan beberapa argumentasi.

Tak dapat dipungkiri, sebagai bidang yang pengaturannya masih sangat muda, bidang jasa masing sangat terbelakang dalam hal regulasi perdagangan. Hal yang paling mencolok yang mengindikasikan masih jauhnya liberalisasi perdagangan jasa untuk teliberalisasi secara penuh, atau minimal mendekati perdagangan bebas barang dapat dilihat dari adanya penerapan *MFN Exemption* dalam pengajuan komitmen-komitmen baik di GATS maupun AFAS.

Secara umum, memang AFAS telah melanggar prinsip-prinsip umum dalam WTO, semisal prinsip non diskriminasi MFN. Namun secara aturan berbagai pengecualian pengecualian yang dibuat oleh aturan GATS terhadap perdagangan jasa, semisal penerapan *MFN Exemption* menjadikan pengesampingan prinsip non Diskriminasi terhadap perdagangan jasa menjadi hal yang legal untuk dilakukan. Meskipun secara umum, hal ini memang tidak lepas dari kritik dimana John Jackson (1994: 134-135) mengkritik bahwa ketidak jelasan dalam pemberian pengecualian bagi beberapa negara anggota untuk tidak mematuhi ketentuan tertentu – terutama dalam soal pemberian status MFN (*Most Favoured Nation*), GSP (*Generalized Standart Of Preferences*), tarif

khusus dan lain lain¹⁴⁵, sebagai salah satu kelemahan dari WTO itu sendiri.

Pada dasarnya pengecualian-pengecualian dalam sistem MFN dalam perdagangan jasa seperti yang disebutkan sebelumnya sebagai akibat luas dan rumitnya pengaturan perdagangan jasa dalam aturan GATS, yang artinya prinsip ini pun tidak berlaku mutlak. Dari dari pengecualian inilah kemudian kemudahan-kemudahan didapatkan dalam menjalankan liberalisasi perdagangan secara terpisah yang dilakukan oleh negara-negara dalam tingkat pesatuan ekonomi regional.

Bila kita kemudian berbicara dalam konteks perdagangan jasa Asean dalam konteks regional, terkait dengan prinsip MFN tersebut, maka diskriminasi dalam sector perdagangan jasa memang sulit untuk dihindari.

Dalam Pasal 24 GATT dijelaskan bahwa mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas, yaitu mengakui pengelompokan-pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum MFN¹⁴⁶, dan dalam aturan GATS sendiri, ada tiga keadaan dimana prinsip MFN ini tidak perlu diterapkan, pertama, beberapa negara mengecualikan prinsip ini (*annex on article II exemption*). Kedua, artikel VII GATS membolehkan negara anggota WTO melakukan negosiasi mengenai *Mutual Recognition Agreement* (persetujuan pengakuan bersama) dengan

¹⁴⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, Politik Bisnis Internasional, Kanisius media, Yogyakarta, hlm 73

¹⁴⁶ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1995, Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada., Jakarta, hlm 20

negara lain dan WTO harus diberitahu pada awal negosiasi. Setiap negara harus memiliki kemauan untuk menawarkan “*Mutual Recognition Agreement* (MRA) kepada seluruh anggota WTO lainnya. Ketiga, Artikel V GATS membolehkan adanya perlakuan berbeda berkaitan dengan perjanjian integrasi ekonomi seperti misalkan Uni Eropa dan persetujuan NAFTA (*North American Free Trade Area*).¹⁴⁷

Kriteria yang diatur oleh pasal V GATS tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan setiap kemungkinan yang dapat merugikan sebagai akibat dibentuknya kerjasama ekonomi regional. Secara umum, ketentuan tersebut dimaksudkan agar tingkat tarif dan *non tariff Barrier* yang rendah di antara sesama anggota kerjasama regional tersebut tidak merugikan yang bukan anggota. Hambatan ekonomi sesudah kerjasama ekonomi regional tersebut terbentuk tidak boleh lebih tinggi dari sebelum kerjasama tersebut dibentuk.

Persyaratan yang ditentukan oleh pasal V GATS tersebut adalah sebagai berikut¹⁴⁸.

1. Harus meliputi banyak sektor
2. Penghapusan ketentuan diskriminatif yang ada dan/atau pelarangan tindakan baru yang diskriminatif;

¹⁴⁷ joko priyono, *Op.cit*, hlm 102

¹⁴⁸ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm 195

3. Tidak meningkatkan hambatan perdagangan jasa secara keseluruhan pada sektor atau subsektor dibandingkan dengan tingkat hambatan yang ada sebelum diadakannya kerjasama;
4. Pemasok jasa yang berbentuk badan hukum milik negara bukan anggota kerjasama yang berusaha dibanyak sektor harus diperlakukan sama dengan ketentuan kerjasama;
5. Apabila kerjasama regional tersebut dibentuk antara sesama negara berkembang, kepada mereka harus diberikan fleksibilitas sesuai dengan tingkat pembangunannya.
6. Apabila suatu negara memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama regional yang dibentuk, anggota kerjasama tersebut tidak boleh meminta kompenisasi dari anggota yang memperoleh keuntungan itu.

Dari sini kita dapat melihat bahwa negara-negara dalam lingkup AFAS serta organisasi-organisasi ekonomi lainnya mendasari regionalisasi ekonomi mereka serta akibatnya pada artikel V GATS bahwa selama hal itu berkaitan dengan pembentukan perjanjian integrasi ekonomi, maka prinsip MFN dapat dikesampingkan. Selain itu adanya pengaturan tentang MRA (*Mutual Recognition Agreemen*) antara dua negara atau lebih merupakan hal yang diperbolehkan dalam WTO (Artikel VII) GATS. sehingga perlakuan yang berbeda dengan negara diluar perjanjian MRA tersebut dapat diberlakukan dengan legal dalam aturan GATS.

Artikel II GATS mengatur mengenai MFN. Artikel tersebut mensyaratkan bahwa setiap negara anggota WTO untuk memperlakukan sama terhadap semua negara anggota WTO berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa. Dengan kata lain melarang adanya persetujuan resiprositas¹⁴⁹

Namun demikian, pada saat GATS ditandatangani, negara anggota WTO berhak untuk menempatkan sector atau subsektor jasa pada daftar pengecualian MFN (*MFN Exemption List*). Dalam suatu hal negara anggota menginginkan untuk tidak melakukan kewajiban umum MFN,¹⁵⁰ maka pengecualian ini harus disampaikan pada akhir putaran Uruguay dari negosiasi-negosiasi perdagangan multilateral atau melalui negosiasi-negosiasi lanjutan dan harus memperoleh persetujuan. Jika suatu negara melakukan tindakan ini, maka ia tidak perlu untuk tunduk pada persyaratan atau ketentuan MFN.

Dari pemaparan diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun pada dasarnya proses penerapan Aturan-aturan perdagangan jasa regional dilakukan dengan menabrak prinsip-prinsip umum yang biasa berlaku di WTO, seperti prinsip Non diskriminasi dan *National Treatment*, pengesampingan aturan seperti ini menjadi legal dalam perdagangan jasa. Hal ini disebabkan karna aturan yang dibuat di GATS yang memayungi perdagangan jasa dibuat dengan memperlonggar pemberlakuan prinsip tersebut. Banyak pengecualian-pengecualian yang dibuat oleh GATS

¹⁴⁹ Ibid hal 105

¹⁵⁰ Artikel II ayat 2 GATS

untuk boleh mengenyampingkan prinsip *Non Diskriminasi* dan *National Treatment* dalam berbagai moment dan situasi yang dalam sektor barang tidak dapat dilakukan. Namun mengingat sektor jasa masih sangat muda, maka tentu saja sector jasa sangat sulit mencapai kesepakatan bila tidak melonggarkan beberapa prinsip prinsip dasar tersebut.

B. Penerapan prinsip dan mekanisme AFAS terhadap negara-negara ASEAN

AFAS pada awalnya juga hanya diperuntukkan bagi kalangan industri jasa dari negara-negara anggota ASEAN (disebut AMS – *ASEAN Member States*). Disepakati oleh para menteri ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Tujuan-tujuan AFAS adalah: (a) Meningkatkan kerjasama dalam sektor jasa di antara negara-negara anggota ASEAN (AMS) guna memperbaiki efisiensi dan daya saing industri-industri jasa ASEAN, memberagamkan kapasitas produksi dan suplai, serta distribusi sektor jasa; (b) Menghapus hambatan substansial dalam perdagangan jasa-jasa; (c) Meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas cakupan dan kedalaman liberalisasi di atas yang telah disepakati di GATS-WTO – disebut juga prinsip GATS-plus; (d) Menyediakan pengakuan akan pendidikan atau pengalaman, persyaratan, lisensi atau sertifikat yang akan diatur dalam pengaturan tersendiri (disebut *Mutual Recognition Arrangement/MRA*). Di dalam AFAS, diadakan putaran-putaran perundingan berkelanjutan untuk terus meliberalisasi perdagangan jasa guna mencapai komitmen yang lebih

tinggi. Hasilnya berupa jadual komitmen spesifik (*schedules of specific commitments*) yang menjadi lampiran dari kerangka perjanjian. Jadwal tersebut kemudian yang disebut sebagai paket komitmen jasa (*packages of Services commitments*). ASEAN telah menyelesaikan lima putaran perundingan yang menghasilkan tujuh paket, dan terakhir yang merupakan paket ke-8 di tahun 2012. Keseluruhan komitmen tersebut mencakup liberalisasi jasa bisnis, jasa profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, jasa lingkungan, pelayanan kesehatan, transport maritim, telekomunikasi dan turisme. Ada lagi tambahan tiga paket komitmen mengenai jasa keuangan yang ditandatangani oleh para menteri keuangan ASEAN, serta dua paket tambahan mengenai transportasi udara yang ditandatangani oleh para menteri perhubungan ASEAN

1. Penerapan prinsip AFAS

Dibagian awal ini selanjutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana penerapan prinsip AFAS terhadap pelaksanaan mekanisme AFAS itu sendiri

Mengenai penerapan prinsip AFAS, pada pembahasan masalah sebelumnya kita telah menyebutkan mengenai prinsip-prinsip AFAS, bahwa dalam AFAS sendiri terdapat empat prinsip utama, yaitu:

- a. MFN (*Most Favoured Nation*) *Treatment*- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain

- b. *Non Discriminative* - pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian;
- c. *Transparency* - setiap negara anggota wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah
- d. *Progressive Liberalisation* – liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Pada bagian masalah pertama kita telah membahas mengenai konflik yang terjadi dalam penerapan prinsip prinsip GATS terhadap regionalism perdagangan, dimana GATS memberikan pengecualian prinsip dalam aturannya sebagai jalan untuk mengakomodasi regionalisme ekonomi seperti AFAS.

Keempat prinsip tersebut tentu saja sangat penting sebagai dasar dari penyusunan kesepakatan kesepakatan pada paket perundingan AFAS. Meskipun demikian, sebagaimana yang telah diketahui bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan pada kesepakatan perdagangan jasa tidaklah semutlak penerapan prinsip dalam perdagangan barang. Begitupun dalam penerapan prinsip-prinsip di AFAS. Prinsip dalam AFAS memang penting sebagai dasar dalam membuat dan mengajukan kesepakatan kesepakatan dalam komitmen yang diajukan, tetapi penerapannya sendiri bersifat regional untuk kawasan Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan AFAS.

Mengenai prinsip *Most Favored Nation* (MFN), bahwa perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota, maka konsesi tersebut harus pula diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi¹⁵¹. Segala kemudahan yang diberikan kepada suatu negara haruslah sama dengan apa yang diberikan terhadap negara lain. Menanggapi hal tersebut, hal pertama dalam hal ini bahwa tentu saja segala kemudahan yang tercipta dari perjanjian dan komitmen AFAS tentu saja hanya berlaku terhadap negara anggota, yaitu negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan AFAS. Dalam pasal 3(a) AFAS disebutkan:

“Eliminating substantially all existing discriminatory measures and market access limitations amongst Member States; and...”

Digaris bawah dalam hal ini adalah kata *among Member State* yang memberikan gambaran bahwa perjanjian-perjanjian yang terkait dengan kesepakatan AFAS hanya terjadi antara *member state* dan tentu saja termasuk penerapan prinsip dari AFAS itu sendiri. Kemudian jika kita memperhatikan pasal-pasal dalam AFAS, hampir dalam semua pasal-pasal AFAS sendiri terus menyebutkan kata “*Member state*” dalam setiap pasal yang menandakan bahwa pasal-pasal tersebut ditujukan untuk negara-negara anggota. Selain itu, pasal 6 AFAS memuat yang tentang

¹⁵¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm 110

“*Denied of Benefits*” semakin menegaskan hal tersebut. Disebutkan bahwa:

“The benefits of this Framework Agreement shall be denied to a service supplier who is a natural person of a non-Member State or a juridical person owned or controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member State, but not engaged in substantive business operations in the territory of Member State(s)”

Pasal ini jelas sekali memberikan penjelasan bahwa segala keuntungan yang akan diperoleh dari perjanjian ini hanya berlaku untuk negara-negara dan *person* dari negara-negara anggota, termasuk untuk mendapatkan perlakuan *Most Favored Nation*.

Kemudian isu selanjutnya, bahwa diantara negara-negara anggota sekalipun pemberlakuan prinsip *Most Favored Nation* sendiri tidak berlaku mutlak. Terdapat kemungkinan dimana prinsip ini dapat dikesampingkan. Salah satunya adalah bahwa setiap negosiasi paket AFAS sendiri selain komitmen *Schedule Of Specific Commitment* dan *Horizontal Commitment* dikenal adanya *MFN Exemption*. *MFN Exemption* ini memuat hal hal dimana kewajiban MFN dari suatu negara anggota dikecualikan. Pengecualian ini harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal II GATS mengenai MFN¹⁵².

Prinsip selanjutnya yaitu *Non Discriminative*, bahwa negara anggota tidak diperbolehkan memberikan perlakuan yang berbeda kepada

¹⁵² Integrasi ekonomi Asean dibidang jasa, op,cit Hal 36

penyedia jasa dari satu negara tertentu. dengan kata lain pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian¹⁵³. Ini berarti, secara umum bahwa bila suatu negara menerapkan suatu hambatan dalam perdagangan, maka hambatan tersebut haruslah berlaku untuk semua negara. tentu saja sehubungan dengan penulis telah bahas sebelumnya pada bagian pertama tadi bahwa prinsip ini hanya berlaku dalam konteks negara negara anggota AFAS, dan tidak berlaku terhadap negara-negara yang berada diluar perjanjian ini. olehkarena itu, maka diskriminasi terhadap negara-negara anggota asean memang dapat dicegah dengan adanya prinsip ini, akan tetapi sebagai organisasi regional, maka perbedaan perlakuan antara negara anggota dan negara diluar konteks AFAS tak bisa dihindari.

Kemudian prinsip *transparency*, AFAS pun menerapkan prinsip ini sebagaimana di WTO, bahwa setiap negara anggota WTO, wajib bersikap transparan dalam menetapkan kebijakan perdagangan luar negerinya antara lain dengan mempublikasikan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan, memberikan informasi atas permintaan anggota WTO lainnya, membentuk institusi yang memungkinkan peninjauan keputusan administrasi negara¹⁵⁴

¹⁵³ *ibid*

¹⁵⁴ Sri Sunardi, 2012, Strategi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi Jasa Telekomunikasi dalam kerangka Asean Framework Agreement on Service (AFAS), Tesis, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 39

Kemudian prinsip yang terakhir yaitu *progressive liberalization*, bahwa setiap negara anggota wajib melakukan liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing. Dalam hal ini, prinsip ini menurut penulis telah dijalankan dengan baik, dimana dalam penerapan mekanisme AFAS sangat memperhatikan bagaimana kesiapan negara-negara dalam meliberalisasi suatu sektor. Proses liberalisasi suatu bidang jasa dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi negara anggota ASEAN. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (*Pre-agreed flexibility*)¹⁵⁵ dan penerapan formula ASEAN minus X¹⁵⁶. Hal ini juga dapat kita lihat dalam negosiasi tiap paket AFASnya. Setiap negara hanya diberikan target untuk meliberalisasi sejumlah komitmen, baik dari segi jumlah, persentase modal asing dan sebagainya dalam perundingan tersebut, namun hanya menargetkan dan tidak ada aturan yang bersifat paksaan untuk memenuhi target tersebut, dimana hal ini bertujuan agar negara-negara anggota dapat mempersiapkan terlebih dahulu sektor yang ingin diajukannya.

¹⁵⁵ Integrasi ekonomi ASEAN dibidang jasa, op.cit hal 8

¹⁵⁶ Dalam publikasi WTO/ESCAP Workshop On Trade in Service Negotiation di Dhaka, Bangladesh menjelaskan bahwa Formula ASEAN Minus X yaitu ketika dua negara atau lebih dapat melakukan liberalisasi atas sektor jasa yang disepakati bersama, sedangkan Negara-negara lain dapat menyusul setelah mereka siap.

2. Penerapan mekanisme AFAS

Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada 2015, ASEAN juga telah mempersiapkan beberapa mekanisme pelaksanaannya, yaitu¹⁵⁷:

- a. Mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata. Pada 2010 dan untuk sektor prioritas kelima, yaitu jasa logistik, pada 2013
- b. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada 2015
- c. Melaksanakan liberalisasi perdangan jasa melalui putaran negoisasi setiap 2 tahun hingga 2015, yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015
- d. Menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2010, 15 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 subsektor pada 2015, yang didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO (GATS) W/120
- e. Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai parameter sebagai berikut:
 - Tidak ada hambatan bagi moda 1 dan 2, dengan pengecualiaan alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua Negara anggota berdasarkan kasus per kasus.

¹⁵⁷ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN , 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm 13-15

- Mengizinkan penyertaan modal asing (ASEAN) minimal 50% pada 2008 dan 70% pada 2010 bagi empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010 dan 70% pada 2015 bagi sektor jasa lainnya; dan
 - Menghapuskan secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa moda 3 pada 2015.
- f. Menetapkan parameter liberalism untuk pembatasan *National Treatment*, moda 4 dan pembatasan dalam *Horizontal Commitments* pada setiap putaran pada 2009;
 - g. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan pada horizontal commitments yang ditentukan pada 2009
 - h. Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdagangan jasa pada Agustus 2008;
 - i. Mengizinkan seluruh fleksibelisasi, meliputi subsektor yang secara penuh dikecualikan dari liberalisasi, dan subsektor yang parameternya belum disepakati dalam penjadwalan komitmen liberalisasi. Penjadwalan komitmen liberalisasi pada tiap putaran akan disesuaikan dengan fleksibelisasi sebagai berikut:
 - Kemungkinan untuk ikut serta pada putaran berikutnya jika negara anggota tidak dapat memenuhi parameter komitmen yang ditentukan pada putaran sebelumnya;

- Mengizinkan pergantian sub-sektor telah sepakat sepakat diliberalisasikan dalam satu putaran dengan subsektor lain diluar yang telah di sepakati, tapi hanya untuk negara anggota yang tidak mampu melaksanakan komitmennya; dan
 - Liberalisasi melalui formulasi ASEAN minus X.
- j. Menyelasaikan Pengaturan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangements/MRas*) yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi antara lain di bidang jasa arsitek, akuntan, *surveying qualification*, tenaga medis pada 2008 dan dokter gigi pada 2009;
 - k. Mengimlementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap MRA;
 - l. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya selambat-lambatnya pada tahun 2015; dan
 - m. Memperkuat pengembangan SDM dan peningkatkan kemampuan di bidang perdagangan jasa

Namun dalam hal penerapan mekanisme AFAS, dapat dilihat dari bagaimana AFAS itu diimplementasikan selama ini, dimana implementasi AFAS tercermin dari komitmen-komitmen tiap-tiap negara ASEAN yang ada didalam suatu paket skedul komitmen yang dicapai pada setiap

putaran negosiasi. Paket-paket skedul komitmen tersebut antara lain sebagai berikut¹⁵⁸:

- Paket 1 dan 2 skedul komitmen AFAS dicapai pada putaran pertama
- Negosiasi AFAS yang dimulai pada 1 Januari 1996 dan berakhir pada 31 Desember 1998
- Paket 3 Skedul Komitmen dicapai pada putaran kedua negosiasi AFAS yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2001
- Paket 4 Skedul komitmen dicapai pada putaran ketiga negosiasi AFAS yang berlangsung antara tahun 2002 hingga 2004
- Paket 5 & 6 skedul komitmen AFAS dicapai pada putaran keempat Negosiasi AFAS yang berjalan antara tahun 2005 hingga 2006
- Paket 7 Skedul Komitmen AFAS dicapai pada putaran kelima Negosiasi AFAS yang berjalan antara tahun 2007 hingga 2009

Oleh karena itu kemudian dalam pokok permasalahan penerapan mekanisme ini, maka penulis akan menekankan pada penerapan mekanisme *Schedule Of Commitmen*

Suatu skedul komitmen terdiri dari dua jenis komitmen yaitu komitmen horizontal dan komitmen spesifik. Yang dimaksud dengan komitmen horizontal adalah komitmen yang mengikat dan berlaku secara umum bagi seluruh sektor jasa, baik yang disebut didalam skedul maupun tidak. Sedangkan komitmen spesifik adalah komitmen yang berlaku bagi sektor-sektor atau sub-sub sektor jasa tertentu yang disebutkan didalam

¹⁵⁸ The ASEAN Secretariat, *ASEAN Integration in Services*, Jakarta: ASEAN Secretariat, Agustus 2009, hal 13.

skedul komitmen. Jika skedul tarif hanya mencantumkan satu tingkat tarif bagi masing-masing produk, maka skedul komitmen mencantumkan sedikitnya delapan item untuk setiap sektor: komitmen untuk akses pasar dan *National Treatment* (perlakuan nasional) bagi empat moda penyediaan jasa. Dalam komitmen spesifik, setiap item mengenai akses pasar maupun perlakuan nasional dapat berbentuk komitmen *None*, *bound with limitations* dan *Unbound*. Lalu apa yang dimaksud dengan *None*? Jika merujuk kepada definisi yang diberikan WTO dalam situs resminya, *None* dapat diartikan sebagai tidak adanya hambatan-hambatan akses pasar atau perlakuan nasional pada sektor dan moda penyediaan jasa tertentu¹⁵⁹. Selain itu, *None* dapat diartikan juga sebagai penjaminan penuh akses pasar dan perlakuan nasional bagi sektor dan moda penyediaan jasa tertentu¹⁶⁰. Komitmen *None* ini sering disebut juga dengan *full commitment*. Selanjutnya, komitmen *bound with limitations* dapat diartikan sebagai liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan didalam komitmen, dimasa yang akan datang pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut¹⁶¹. Komitmen *bound with limitations* ini sering disebut juga dengan *partial commitment*. Selanjutnya yang terakhir, komitmen *Unbound* dapat diartikan bahwa negara yang berkomitmen

¹⁵⁹ http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm diakses pada 18 November 2010 pukul 14.50 WIB

¹⁶⁰ (Lihat juga)Peter Egger & Rainer Lanz, *The Determinants of GATS Commitment Coverage*, *The World Economy*, Vol 31, Issue 12, December 2008, hal 1674.

¹⁶¹ Aida S. Budiman ,op,cit ,hlm 131

seperti itu tidak membuat komitmen akses pasar dan perlakuan nasional bagi suatu sektor dan moda penyediaan jasa tertentu¹⁶².

Komitmen *Unbound* sering disebut juga dengan *no commitment* atau *full discretion*. Dengan kata lain negara tersebut masih memberlakukan hambatan akses pasar dan perlakuan nasional pada sektor dan moda penyediaan jasa tersebut. Hambatan-hambatan yang dimaksud diatas antara lain, hambatan-hambatan akses pasar seperti:

- pembatasan dalam jumlah penyedia jasa
- pembatasan dalam jumlah volumen transaksi
- pembatasan dalam jumlah operator
- pembatasan dalam jumlah tenaga kerja
- pembatasan dalam bentuk hukum dan kepemilikan asing. Sedangkan hambatan-hambatan yang terkait penerapan perlakuan nasional antara lain.:
- peraturan yang diskriminatif untuk persyaratan pajak
- peraturan yang diskriminatif dalam kewarganegaraan
- peraturan yang diskriminatif dalam jangka waktu menetap atau masa kerja
- peraturan yang diskriminatif dalam perizinan
- peraturan yang diskriminatif dalam standarisasi dan kualifikasi
- peraturan yang diskriminatif dalam batasan kepemilikan properti dan lahan.

¹⁶² Peter Egger & Rainer Lanz, *op. cit*, hal 1674

Kemudian penulis akan menjelaskan komitmen-komitmen negara-negara Asean dalam komitmen AFAS` sebagai bentuk dari penerapan mekanisme AFAS. karena penulis ingin menjelaskan bagaimana perkembangan komitmen negara-negara ASEAN, maka penulis memilih untuk membahas komitmen AFAS dari AFAS 5 hingga yang terakhir 7 (paket 8 saat tulisan ini ditulis sedang dirampungkan). Tidak semua komitmen pada seluruh sektor jasa akan dijelaskan, penulis hanya akan menjelaskan komitmen-komitmen disektor jasa pariwisata, sebagai sampel. Maka kita hanya akan membahas mengenai sektor *Tourism and Travel Related Service* dalam komitmen-komitmen paket AFAS. Komitmen negara-negara Asean pada sektor pariwisata atau *Tourism* selalu diikuti dengan *Travel Related Services* sebagai satu kesatuan.

a. Paket Perundingan Afas 5¹⁶³

Protocol to implement the fifth package of Commitment under AFAS lebih dikenal dengan Paket perundingan AFAS 5 ditandatangani di Cebu-Filiphina pada tanggal 8 Desember 2006. Adapun negara-negara yang ikut berpartisipasi, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filiphina, Singapura, Thailand, Vietnam. Dalam komitmen negara-negara ASEAN kali ini, negara-negara ASEAN memberikan komitmen pada subsektor-subsektor yang berbeda beda yaitu:

¹⁶³ data dari afas 5 di akses dari <http://www.asean.org/news/item/protocol-to-implement-the-fifth-package-of-commitments-on-air-transport-services-under-the-asean-framework>

- Brunei Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*
- Kamboja Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Educational Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*
- Indonesia Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services, Other Services N.E.C (Energy Services).*
- Laos Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services.*
- Malaysia Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services, Other Services (Skills Training Services)*

- Myanmar Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*
- Philipina Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services.*
- Singapura Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services.*
- Thailand Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare And Related Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services,*
- Vietnam Mengajukan Komitmen pada Subsektor *Business Services, Communications Services, Construction and Engineering Related Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services*

Maka dari itu pada Komitmen AFAS 5 kali ini total dikomitmenkan Sektor-sektor berupa.:

Business Services, Communications Services (Minus Singapura Yang Memasukkan Sector Ini Kedalam *Bussines Service Bagian Computer-Related Services*), *Construction and Related Engineering Services, Tourism and Travel Related Services, Healthcare Services* (Min Philipina), *Transport Services, Environmental Services* (Minus Indonesia Brunei, Malaysia) , *Recreational, Cultural and Sporting Services*(Minus Vietnam, Thailand, Singapura, Philipina, Laos dan Indonesia,), *Distribution Services*(Minus Brunei Dan Vietnam) , *Education Services* (Minus Vietnam, Philphina, Myanmar Dan Brunei) ,*Other Services* (Beberapa Negara Menambahkan Beberapa komitmen Subsektor Lain)

Untuk Sektor *Tourism and Travel Related Services*, Brunei dalam komitmennya mengajukan 3 kolom subsector.dengan komitmen berupa : *Hotel Lodging Services, Restaurants, Other Tourism Services (Youth Hotel, Golf Courses, Marina Facilities)*. Untuk moda 1 dan 2 juga telah dikomitmenkan *None* secara menyeluruh kecuali pada moda 1 *Restaurants* yang tidak memperbolehkan Minuman beralkohol. Kemudian Untuk moda 3 dan 4 pada subsector *Hotel Lodging Services* pada afas lima kali ini masih ditutup rapat dengan komitmen *Unbound* secara penuh. Sedangkan untuk moda 3 dan 4 pada subsektor *Restaurants* dan *Other Tourism*

Services juga *Unbound* kecuali pada moda 3 *Market Acces Limitation* yang memberikan persyaratan keharusan untuk melakukan *Join ventura* dengan perusahaan Lokal.

Kamboja dalam Sektor *Tourism* dalam komitmennya pada afas 5 mengajukan 5 subsektor untuk diliberalisasi, yaitu : *Hotels, Restaurants, Travel agencies and Tour Operators Services, Tourist guides Services, Convention Centre*. Untuk komitmen pada Moda 1 dan 2 dari seluruh subsector *Tourism* yang diajukan, telah dikomitmenkan *None* keseluruhannya. Kemudian pada moda 3 *Market Acces limitation*, untuk subsector *Hotels* dikomitmenkan *None* tetapi hanya untuk *Hotel* berbintang 3 keatas. Pada subsector *Travel agencies and Tour Operators Services* dikomitmenkan *None* kecuali *travel agency* yang membetasi modal asing hingga maksimal 51 %. Subsektor lain, *Tourist guides Services* yang dikomitmenkan *None* sepenuhnya dan *Convention Centre* yang dikomitmenkan *None* jika modal yang diinvestasikan untuk convention center berkapasitas lebih dari 3000 orang. Kemudian untuk moda 3 *National treatment*, telah dikomitmenkan *None* kecuali subsektor *Restaurants* yang *Unbound*. Kemudian pada moda 4, semua subsektor dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian dengan apa yang telah dikomitmenkan pada *Horizontal Commitmen*, kecuali subsektor *Restaurant* yang *Unbound* sepenuhnya.

Indonesia dalam Komitmen *SOC* Afas 5 dalam sektor *Tourism and Travel Related Service* mengajukan subsector yang cukup banyak bila

dibandingkan dengan komitmen negara lain, sebagai berikut: *Hotels, Motel Lodging Services, Letting Services of furnished accommodations, Meal Serving Services with full restaurant Services, Beverage serving Services without entertainment, Beverage serving Services with entertainment, Travel Agent and Tour Operator Services, Tour Leader Services, Tourism Consultancy Services, International Hotel Operator, Professional congress organizer, Golf Courses and other facilities.* Meskipun cukup banyak, dari semua subsektor tersebut untuk moda 1 dan moda 2 telah dikomitmenkan *None* keseluruhannya. Sedangkan untuk moda 3 *Market Acces* limitation, dalam komitmen Indonesia hanya *Professional congress organizer* dan *Tour Leader Services* yang sepenuhnya *Unbound*, sedangkan subsektor lainnya masih dimungkinkan untuk diikuti modal asing dengan persyaratan persyaratan *Join venture* dengan pembatasan jumlah modal. Kemudian untuk moda 3 *National Treatment* limitation juga masih dengan pembatasan-pembatasan, misalkan pada subsector *Motel Lodging Services* dan *Letting Services of furnished accommodations* komitmennya dikembalikan sebagaimana komitmen di horizontal komitmen. Sedangkan pada *Tour Leader Services* dan ***Other*** (*Tourism Consultancy Services*) justru dikomitmenkan *Unbound*. Kemudian pada subsector-subsektor lainnya dikomitmenkan masih dengan persyaratan-pesyaratan tertentu yang diberikan pada penyedia jasa asing yang membedakan mereka dengan penyedia Jasa local.

Untuk moda 4 *Market Acces Limitation* terdapat beberapa sektor yang justru *Unbound* seperti *Tour Leader Services*, *Other (Tourism Consultancy Services)* dan *Meal Serving Services with full restaurant Services*. Untuk subsektor lainnya juga pada dasarnya *Unbound* tapi ditambahkan pengecualian utamanya terhadap dua jenis kategori pekerja yaitu *Top management level* dan *Highly-skilled professionals*. Kemudian pada bagian *National Treatment limitation* pada moda yang sama untuk semua sector dikomitmenkan sebagaimana komitmen yang telah diberikan pada *Horizontal Commitment* kecuali subsektor *Tour Leader Services* yang komitmennya masih *Unbound*.

Komitmen laos dalam *SOC* mereka pada sector *Tourism* paket AFAS 5 hanya terdiri dari tiga subsector yaitu : *Hotel Lodging Services*, *Beverage serving Services without entertainment*, *Meal Serving Services with full restaurant service*. Untuk moda 1 dan 2 dari keseluruhan subsector yang dikomitmenkan telah dikomitmenkan dengan *None*. Kemudian untuk moda 3 diberikan beberapa persyaratan yaitu a). pemodal asing harus melakukan *Join ventura* dengan satu atau lebih investor dalam negeri b). partner asing dalam *join venture* harus berkontribusi paling tidak 30% dari total Investasi. c). perusahaan yang dimiliki sepenuhnya d). harus tunduk terhadap aturan dan regulasi dari hukum investasi asing Laos, dan untuk subsektor *Hotel Lodging Services* dan *Beverage serving Services without entertainment* menambahkan bahwa standar pembangunan *Hotel* pada subsector yang bersangkutan haruslah berbintang 3 atau lebih. Untuk

bagian *National Treatment* pada moda yang sama dikomitmenkan dengan *Unbound*. Sedangkan pada moda 4 dikomitmenkan *Unbound* dengan beberapa pengecualian, misalkan pada *Beverage serving Services without entertainment* dan *Hotel Lodging Services* yang memberikan pengecualian terhadap person yang telah mendapatkan ijin dalam posisi *General Manager, food and beverage manager, sales and marketing manager, operator manager* dan *congress manager*. Kemudian pada *National Treatment limitation* pada moda yang sama dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian sebagaimana pada *Horizontal Commitmen*, sedangkan pada *subsector Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dikomitmenkan *Unbound* sepenuhnya

Malaysia dalam Afas 5 komitmen sector *Tourism* mengajukan sector-sektor berupa, *Hotel and restaurant Services (covering only Hotel Lodging Services, Holiday Centre and Holiday Home Services, Letting Services of Furnished Accommodation)* , *Food serving Services, Beverage serving Services for consumption on the premises, Travel agencies and Tour Operators Services, Tourist Guide Services, Convention Centre, Theme Park*. Dari semua subsector yang diajukan Malaysia, untuk moda 1 dan 2 telah dikomitmenkan seluruhnya dengan komitmen *None*. Untuk moda 3 *Market Acces Limitation* hampir semua subsector mewajibkan pemodal asing untuk melakukan *Join ventura* dengan investor lokal (kecuali subsector *Tourist Guide Services* yang dikomitmenkan *Unbound* terhadap penyedia jasa yang dianggap tidak memiliki kecakapan teknis)

dengan pembatasan moda maksimal 49 % (kecuali *Convention Centre* sebesar 30 %). Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama kecuali subsector *Tourist Guide Services* yang *Unbound* terhadap penyedia jasa yang dianggap tidak memiliki kecakapan teknis, subsector lainnya telah dikomitmenkan *None*. Kemudian pada moda 4, *Market Acces limitation*, hampir semua subsector dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada bagian tertentu yang diindikasikan pada *Horizontal Commitment*, misalkan pada subsector *Hotel and restaurant Services* yang *Unbound* dengan pengecualian pada bagian (a) dan (b) dan 2 (a) dan (c) dari *Horizontal Commitment*. Hanya subsector *Tourist Guide Services* saja yang telah dikomitmenkan *None*. Kemudian *National Treatment* pada moda 4, hampir semua subsector dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian dalam kategori natural person dalam *Market Acces*. Hanya subsector *Tourist Guide* yang komitmennya *None* serta *Theme Park* yang *Unbound* dengan pengecualian komitmen yang ada dalam *Horizontal Commitment* bagian (a) dan (b) dan 2 (a) dan (c)

Myanmar mengajukan beberapa Subsector yaitu *Hotel and other Lodging Services, Motel Lodging Services, Meal Serving Services with full restaurant service, Beverage serving Services without entertainment, Travel agencies and Tour Operators Services*. Sebagaimana negara lainnya, pada AFAS paket 5 ini, Myanmar juga telah membuka seluas luasnya subsector yang dikomitmenkan pada Moda 1 dan Moda 2. Pada moda 3 *Market Acces Limitation* juga semuanya telah dikomitmenkan

None, meskipun pada beberapa subsektor seperti *Hotel and other Lodging Services* dan *Motel Lodging Services* menyaratkan investasi modal asing minimal 35% dari total keseluruhan investasi dan diperbolehkan hingga 100%. Sedangkan untuk, Myanmar masih memberikan persyaratan persyaratan untuk mendapatkan pengecualian dalam hukum investasi Myanmar, kecuali subsector *Travel agencies and Tour Operators Services* yang dikomitmenkan *Unbound*. Kemudian untuk moda 4 *Market Acces Limitation*, beberapa subsektor justru telah dikomitmenkan *None* kecuali *Travel agencies and Tour Operators Services* yang *Unbound* dan subsector *Motel Lodging Services* yang mewajibkan subjek untuk tunduk pada hukum investasi asing Myanmar dan aturan-aturan Myanmar. Sedangkan pada *National Treatment* pada moda yang sama, hampir semua subsector berkomitmen *Unbound*, kecuali subsector *Motel Lodging Services* yang komitmennya sebagaimana komitmen dalam *Horizontal Commitment*

Philiphina dalam komitmen AFAS 5 sektor *Tourism* mengkomitmenkan beberapa subsector yaitu: *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services, Meal Serving Services with full restaurant service, Beverage serving Services for consumption on the premises, Travel agencies and Tour Operator*, dan *Professional congress organizers*. Philiphina juga telah memberikan komitmen *None* terhadap seluruh subsector pada moda 1 dan moda 2. Namun untuk moda 3, *Market Acces Limitation* masih dengan pembatasan pembatasan.

Misalkan pada subsector *Travel agencies and Tour Operator* dan *Professional congress organizers* yang hanya memperbolehkan modal asing maksimal 60% dari total investasi. sedangkan pada subsektor *Beverage serving Services for consumption on the premises* dan *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* memperbolehkan seluruh perusahaan dimiliki oleh asing apabila modal yang dibayarkan berjumlah minimal 2.5 juta Us Dollar. Untuk subsector *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services* dikomitmenkan *None* dengan pengecualian yang telah diindikasikan dalam *Horizontal Commitment*. Sedangkan untuk *National Treatment* pada moda yang sama, semua subsektor telah dikomitmenkan *None* dengan tambahan pengecualian terhadap apa yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitmen* pada subsector *Travel agencies and Tour Operator* dan *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services*. Kemudian untuk Komitmen moda 4, *Market Acces Limitation* dikomitmenkan sebagaimana pada komitmen *Horizontal Commitment* kecuali *Professional congress organizers* yang *None*. Sedangkan *National Treatment limitation* moda 4 semua telah dikomitmenkan *None* secara menyeluruh.

Singapura dalam komitmen mereka Sektor *Tourism* Afas 5 mengajukan beberap subsektor, yaitu ; *Hotel Lodging Services, Beverage serving Services for consumption on the premises, Restaurant and Catering Services, Circus, amusement park and similar attraction Services, Travel agencies and Tour Operators, Tourist Guide Services* dan

Other Tourism Services (International Hotel Operator, Tourism consultancy Services, Convention Centre, Tourist resorts include Hotel, marinas, golf course and other sport facilities, Marina facilities, Hotel management, Professional Congress Organisers). Untuk moda 1 dan 2 semua telah dikomitmenkan secara menyeluruh dengan komitmen *None* artinya telah dibuka seluas luasnya bagi penyedia jasa asing pada moda 1 dan 2. Untuk moda 3 *Market Acces Limitation* juga telah dikomitmenkan *None* seperti subsector *Hotel Lodging Services, Restaurant and Catering Services, Travel agencies and Tour Operators* dan *Tourist Guide Services*. Sedangkan subsector lainnya membatasi modal asing dari 30 % hingga 49 %. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama juga telah dikomitmenkan *None* seluruhnya kecuali subsector *Travel agencies and Tour Operators* yang *Unbound*. Kemudian untuk Moda 4, *Market Acces Limitation* semua subsector komitmennya *Unbound* dengan pengecualian pada apa yang telah diindikasikan didalam *Horizontal Commitment*. Untuk *National Treatment* pada moda yang sama, juga komitmennya malah *Unbound* sepenuhnya kecuali untuk subsector *Hotel Lodging Services* dan *Beverage serving Services for consumption on the premises* yang memberikan pengecualian *Unbound* sebagaimana yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment*.

Thailand dalam komitmen mereka mengajukan beberapa subsector yaitu *Hotel Lodging Services, Camping and Caravan site Services, Meal Serving Services with full restaurant Services, Beverage serving Services*

without entertainment, Motel Lodging Services, Holiday center and holiday home Services, Catering Services, Travel agency and tour operator Services, Hotel management Services, dan Convention Centre over 2000 participants. Untuk komitmen moda 1, separuh dari komitmen diatas masih *Unbound* baik *Market Acces* maupun *National Treatment* nya. Subsector yang *None* hanyalah *Hotel Lodging Services, Camping and Caravan site Services, Meal Serving Services with full restaurant Services, Beverage serving Services without entertainment, Motel Lodging Services, Holiday center and holiday home Services.* Kemudian pada moda 2 dan 3 justru oleh Thailand telah dikomitmenkan *None* secara menyeluruh, berbeda dengan negara lain yang masih sulit membuka moda 3 dalam komitmen mereka. Kemudian pada moda 4, *Market Acces Limitation* komitmennya sebagaimana komitmen dalam *Horizontal Commitment* Thailand sendiri, sedangkan pada *National Treatment limitation* pada moda yang sama dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian seperti yang ada dalam *Horizontal Commitment* Thailand.

Vietnam mengajukan komitmen *Tourism* mereka pada beberapa subsektor yaitu *Hotel Lodging Services, Food serving Services, Beverage serving Services for consumption on the premises* dan *Travel agencies and Tour Operator Services.* Untuk moda 1 dan moda 2 Vietnam telah memberikan komitmen *None* secara menyeluruh. Sedangkan pada moda 3 *Market Acces Limitation* pada subsector *Hotel Lodging Services, Food serving Services, Beverage serving Services for consumption on the*

premises dikomitmenkan *None* dengan pengecualian bahwa penyedia jasa yang bersangkutan haruslah paralel dengan pembangunan konstruksi *Hotel* dengan minimum *Hotel* berbintang 3 keatas dengan modal minimal 30% dari seluruh investasi. untuk subsector *Travel agencies and Tour Operator Services* pada bagian ini hanya mewajibkan penyedia jasa asing untuk melakukan *Join ventura* dengan investor dalam negeri dengan modal maksimal 49%. Untuk bagian *National Treatment* pada moda yang sama telah dikomitmenkan *None* kecuali pada subsector *Travel agencies and Tour Operator Services* yang mensyaratkan *Tourist guides* haruslah warga Vietnam. Kemudian pada moda 4, semua subsektor baik *Market Acces Limitation* maupun *National Treatment limitation* dikomitmenkan *Unbound* oleh Vietnam dengan pengecualian sebagaimana yang diindikasikan dalam *Horizontal Commitment*

b. Paket Perundingan AFAS 6

Paket perundingan AFAS 6 atau *Protocol to implement the sixth Package of Commitments under AFAS* ditandatangani di Singapura pada tanggal 19 november 2007. Seluruh negara Asean ikut berpartisipasi dalam Komitmen Afas paket 6 ini, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.

Adapun komitmen negara negara Asean pada komitmen Afas 6 ini yaitu :

- Brunei mengkomitmenkan sektor sektor *Business Services* (*professional service, Computer and Related Services, research and development Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services*) *Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Education Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*
- Kamboja memberikan komitmen berupa Sektor-sektor *Business Services* (*professional service, Computer and Related Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services*). *Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Educational Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services*
- Indonesia dalam AFAS 6 memberikan komitmen berupa Sektor-sektor *Business Services* (*professional service, Computer and Related Services, research and development Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services*), *Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services, Other Services n.e.c*

- Laos memberikan komitmen berupa Sektor-sektor; *Business Services (professional service, Computer and Related Services, research and development Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environment Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services*
- Malaysia memberikan komitmen berupa Sektor-sektor; *Business Services (professional service, Computer and Related Services, research and development Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services, Other Services*
- Malaysia memberikan komitmen berupa Sektor-sektor; *Business Services (professional service, Computer and Related Services, research and development Services, rental and leasing Services without operator, other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services, Other Services*

- Myanmar berkomitmen kedalam sektor-sektor; *Business Services* (*professional service, research and development Services , other Business Services*) *Computer and Related Services , Communications Services, Construction and Engineering Related Services , Distribution Services , Environmental Services, Healthcare Services , Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services , Transport Services.*
- Philipina memberikan komitmen terhadap sektor; *Business Services, Professional service, Computer and Related Services, Research and development Services, Rental and leasing Services without operator, Other Business Services), Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*
- Singapura dalam komitmen AFAS 6 memberikan komitmen berupa Sektor *Business Services (professional Services, computer-related Services), Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services*
- Thailand dalam komitmennya AFAS 5 mengajukan Sektor *Business Services (Professional service, Computer and Related Services, Research and development Services, Rental and leasing Services*

without operator, Other Business Services), Communications Services, Construction Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services,

- Vietnam komitmennya AFAS 5 mengajukan Sektor *Business Services* (*Professional Services*), *Communications Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Educational Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services.*

Dari komitmen-komitmen diatas, total ada paling tidak ada sekitar 11 Sektor yang diliberalisasi oleh negara-negara ASEAN dalam Komitmen AFAS 6 ini , Yaitu : *Business Services, Communications Services* (Minus Singapura, tetapi Singapura tetap memasukkan beberapa komitmen menyangkut telekomunikasi pada subsektor *Computer and Related Service*), *Construction and Engineering Related Services* (Thailand hanya mengajukan *Construction Service*), *Distribution Services* (minus Brunei), *Educational Services* (Minus Philipina dan Myanmar), *Environmental Services* (Minus Brunei), *Healthcare Services* (Thailand menambahkan *Related Social Service*. Philipina dan Laos menggabungkan komitmenkan *Health and Social Service*), *Tourism and Travel Related*

Services, Recreational, Cultural and Sporting Services (minus Singapura, Laos dan Indonesia), *Transport Services, Social Services* (hanya Myanmar, sedangkan Philipina, Laos dan Thailand menggabung komitmen ini dengan *Health Service*), kemudian Indonesia dan Malaysia menambahkan Kolom *Other Service* dalam Komitmen mereka untuk subsektor subsektor tambahan.

- **Komitmen Sektor *Tourism***

Komitmen negara negara ASEAN pada sektor *Tourism* terdiri dari banyak subsektor yang berbeda beda. Secara umum negara negara Asean telah bisa memberikan komitmen yang lebih terbuka terhadap Moda 1 dan 2, namun untuk moda 3 dan 4 ternyata masih sulit untuk diliberalisasi secara penuh. Pembahasan komitmen selengkapnya sebagai berikut.

Brunei pada komitmen *Tourism and Travel Related Service* nya mengajukan 3 kolom subsector. Yaitu *Hotel Lodging Services, Restaurants, Other Tourism Services (Youth Hostel, Golf Courses, Marina Facilities)*. Ketiga kolom subsektor yang diajukan telah memberikan komitmen *None* secara menyeluruh terhadap Moda 1 dan 2, kecuali pada subsektor *Restaurants* yang pada moda satunya *None* juga tetapi dengan pengecualian dengan khusus tidak memperbolehkan masuknya minuman yang beralkohol. Untuk moda 3 pada *Market Acces Limitation* untuk subsektor *Hotel Lodging Services* dan *Restaurants* mewajibkan *join venture* dengan perusahaan lokal dengan aturan domestik. Sementara untuk *National Treatment limitation* pada kedua subsektor tersebut masih

dikomitmenkan *Unbound*. Sementara itu untuk moda 3 pada kolom *other Tourism service* untuk *Market Acces Limitation* dikatakan bahwa “*It must be a joint venture project with local enterprise*” sebagai persyaratan modal asing, sedangkan pada *National Treatment limitation* pada moda yang sama juga masih *Unbound*. Brunei pada AFAS putaran 6 ini masih sulit untuk membuka penuh moda 4. Hal ini terlihat bahwa seluruh komitmen moda 4 yang diajukan pada subsektor *Tourism* masih dikomitmenkan *Unbound*.

Kemudian komitmen Kamboja pada sector *Tourism* total terdapat 5 kolom subsektor , yaitu *Hotels, Restaurants, Travel agencies and Tour Operators Services, Tourist guides Services* dan *Convention Centre*. Untuk komitmen Moda 1 dan 2 pada semua subsektor yang diajukan oleh Kamboja telah dikomitmenkan *None* secara keseluruhan, Kamboja telah membuka seluas luasnya subsektor jasa *Tourisme* yang diajukan pada moda ini. Untuk subsektor *Hotels*, moda 3 *Market Acces Limitation* dikomitmenkan *None* hanya pada Hotel berbintang3 keatas, sedangkan untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama dikomitmenkan *None*. Untuk subsektor *Tourist guides Services* moda 3 secara keseluruhan telah dikomitmenkan *None*. Sementara untuk subsektor *Travel agencies and Tour Operators Services* moda 3 *Market Acces Limitation* mensyaratkan partisipasi modal asing maksimal 51% untuk *Travel Agencies*, dan pada *National Treatment limitation*nya sendiri dikomitmenkan *None*. Pada subsektor *Convention Centre* moda 3 *Market*

Acces Limitation sendiri dikomitmenkan *None* dengan memungkinkan investasi modal asing hingga 100% pada pembangunan *Convention Centre* dengan kapasitas lebih dari 3000 orang dan untuk *National Treatment* limitationnya telah dikomitmenkan *None*. Untuk Moda 4 semua dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian komitmen yang ada dalam *Horizontal Commitment* kecuali subsector *Restaurants* yang moda 4 nya masih *Unbound* sepenuhnya.

Indonesia total mengajukan 12 kolom komitmen kedalam *SOC* nya pada AFAS paket 6 kali ini, yaitu : *Hotels, Motel Lodging Services, Letting Services of furnished accommodations, Meal Serving Services with full restaurant Services, Beverage serving Services without entertainment, Beverage serving Services with entertainment, Travel Agent and Tour Operator Services (TA&TO), Tour Leader Services, Tourism Consultancy Services, International Hotel Operator, Professional congress organizer, Golf Courses and other facilities*. Dari semua subsektor yang diajukan Indonesia telah membuka penuh untuk moda 1 dan moda 2 dengan memberikan komitmen *None* secara menyeluruh. Namun untuk moda 3 dan moda 4, juga masih belum membuka sepenuhnya dengan beberapa bagian pada moda 3 dan 4 tersebut dengan memberlakukan persyaratan persyaratan. Bahkan untuk dua subsektor seperti *Tour Leader Services* dan *Professional congress organizer* untuk moda 3 dan 4 nya masih berstatus *Unbound* sepenuhnya. Untuk moda 3 yang lain, pada subsektor *Motel Lodging Services* dan *Letting Services of furnished accommodations*

pada bagian *Market Acces Limitation* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada beberapa daerah tertentu di bagian Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, dimana modal asing masih dipersyaratkan maksimal 49%. Untuk *Market Acces Limitation* pada moda untuk kedua subsektor ini juga *Unbound* dengan pengecualian pada kategori *Temporary stay if natural persons* yaitu *Top management level* dan *Highly-skilled professionals*. Untuk *National Treatment limitation* moda 3 dan 4 pada kedua subsektor ini juga dikomitmenkan *As indicated in the horizontal section* yaitu komitmen pada moda ini sebagaimana yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment*. Sementara untuk subsektor-subsektor selebihnya mayoritas untuk moda 3 dan 4 masih berstatus *Unbound* dengan pengecualian, dan sebagian kecil *Unbound* sepenuhnya dan sisanya disesuaikan dengan apa yang dikomitmenkan didalam *Horizontal Commitmen*.

Laos Untuk sector *Tourism* ini sendiri dalam *SOC* diajukan kedalam AFAS paket 6 terdapat 5 subsektor kedalam 4 kolom subsector, yaitu : *Hotel Lodging Services with 3 stars or more*, *Meal Serving Services with full restaurant service*, *Beverage serving Services without entertainment*, *Travel agencies Services*, *in-bound Services only* dan *Other (Tourism consulting Services)*. Dari kelima subsektor yang diajukan oleh laos pada AFAS 6 ini, moda 1 dan moda 2 telah diliberalisasi sepenuhnya dengan dikomitmenkannya semua moda tersebut baik *Market Acces Limitation* maupun *national treatment limitation* dengan komitmen *None*.

Untuk moda 3 pada subsektor *Hotel Lodging Services (with 3 stars or more)*, *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dan *Beverage serving Services without entertainment* pada *Market Acces Limitation* disamakan dengan apa yang dikomitmenkan oleh Laos pada *Horizontal Commitment*nya. Untuk *Travel agencies Services in-bound Services only* pada moda dan bagian yang sama mensyaratkan beberapa persyaratan bagi pemodal asing yaitu : 1. *foreign investment shall be as a travel agency* 2. *a joint venture with one or more Lao Services suppliers* 3. *foreign equity participation limited to 70%;* 4. *in compliance with the laws and regulations of Lao PDR*. Dan untuk *Other (Tourism consulting Services)* juga dikembalikan kepada apa yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment*. Untuk moda 4 *Market Acces Limitation* pada subsektor *Hotel Lodging Services with 3 stars or more*, *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dan *Beverage serving Services without entertainment*, dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian sesuatu yang disebut *intra-corporate transferees of managers and subject to approval of the competent authority of Lao PDR*. Sedangkan untuk subsektor *Travel agencies Services, in-bound Services only* dan *Other (Tourism consulting Services)* pada moda dan bagian yang sama dikomitmenkan juga *Unbound* dengan pengecualian manajer dan subjek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berkompeten dibidangnya di Laos. Sedangkan untuk moda 4 *National Treatment limitation* pada semua subsektor *Tourisme* yang diajukan Laos juga dikomitmenkan *Unbound*

dengan pengecualian apa yang dikomitmenkan kedalam *Horizontal Commitment*

Malaysia dalam komitmen di sektor *Tourism* meliberalisasi *Theme Park, Tourist Guide Servicesm, Travel agencies and Tour Operators Services, Beverage serving Services for consumption on the premises, Food serving Services, Hotel and restaurant Services*(covering only: *Hotel Lodging Services, Holiday Centre and Holiday Home Services, Letting Services of Furnished Accommodation*). Secara keseluruhan, Malaysia telah memberlakukan liberalisasi secara penuh untuk moda 1 dan 2 baik itu dari *Market Acces limitation*, maupun *National Treatment limitation* dengan dikomitmenkan *None*. Untuk moda 3 *Market Acces Limitation* subsektor *Hotel and restaurant Services*(covering only: *Hotel Lodging Services, Holiday Centre and Holiday Home Services, Letting Services of Furnished Accommodation*), *Beverage serving Services for consumption on the premises, Food serving Services, Agencies and Tour Operators Services dan Theme Park* mensyaratkan *Join ventura* antara pemodal asing dengan pengusaha dalam negeri dengan jumlah maksimal dari modal asing sebesar 49 %. Sedangkan untuk *Guide Servicesm* dikomitmenkan *Unbound* bila diindikasikan sang penyedia jasa memiliki kemampuan tehnikal yang rendah. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama, semuanya telah dikomitmenkan *None* kecuali *Guide Servicesm* yang komitmennya *Unbound* jika dindikasikan si penyedia jasa memiliki kemampuan teknik yang rendah. Kemudian untuk

moda 4 *Market Acces Limitation* secara umum semua sektor dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada komitmen tertentu yang ada pada *Horizontal Commitment*. Hanya subsektor *Tourist Guide Servicesm* yang moda 4 secara keseluruhan *None*. Untuk moda 4 *National Treatment limitation* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian *Natural person referred to under market acces*, kecuali untuk *Theme Park* yang komitmennya *Unbound* dengan pengecuaalian apa yang dikomitmenkan didalam *Horizontal Commitment* serta *Tourist Guide Service* yang dikomitmenkan *None*

Myanmar dalam komitmen di sektor *Tourism* mereka mengkomitmenkan beberapa subsektor *Hotel and other Lodging Services* , *Motel Lodging Services* , *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* , *Beverage serving Services without entertainment* serta *Travel agencies and Tour Operators Services*. Untuk moda 1 dan 2, Mynmar juga telah memberikan komitmen liberalisasi secara penuh dengan memberikan komitmen *None* secara menyeluruh, baik *Market Acces limitation*, maupun *National Treatment Limitation*. Pada moda 3 *Market Acces Limitation* semua subsektor yang dikomitmenkan oleh Myanmar telah dikomitmenkan *None* sepenuhnya kecuali *Hotel and other Lodging Services* , *Motel Lodging Services* yang memberikan persyaratan minimum investasi asing sebesar 35% dan maksimum 100 % dengan *BOT System Under Foreign Investment Law*. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama, untuk subsektor *Meal Serving Services with Full*

Restaurant Service dan *Hotel and other Lodging Services* dikatakan *Entitled to enjoy the exemptions under the Foreign Investment Law Chapter X, Article 21*. Untuk subsektor *Motel Lodging Services* dan *Beverage serving Services without entertainment* di katakan bahwa bila telah mendapatkan ijin dari *Myanmar Investment Commission*, maka ia akan mendapatkan hak untuk membayar pajak dalam kurs mata uang asing dengan disesuaikan dengan nilai pada saat itu. Sedangkan untuk *Travel agencies and Tour Operators Services* Moda 3 *National Treatment* nya masih dalam keadaan *Unbound*. Untuk Moda 4 *Market Access limitation*, beberapa subsektor seperti *Hotel and other Lodging Services*, *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dan *Beverage serving Services without entertainment* telah dikomitmenkan *None*. Namun pada subsektor *Travel agencies and Tour Operators Services* dikomitmenkan *Unbound*. Sedangkan pada *Motel Lodging Services* dikatakan bahwa subjek tunduk pada *foreign investment law*, hukum pekerja dan hukum keimigrasian Myanmar. Untuk bagian *nationl treatment limitation* pada moda yang sama, pada beberapa sektor seperti *Travel agencies and Tour Operators Services*, *Beverage serving Services without entertainment*, *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* masih dikomitmenkan *Unbound*. Untuk sektor sektor lainnya, yaitu *Motel Lodging Services* sebagaimana yang diindikasikan pada *Market Acces* colum.

Philiphina dalam Sektor *Tourism* mengajukan Subsektor untuk diliberalisasi sebagai berikut ; *Hotel, resort, pension houses tourist inns*

apartelles Lodging Services, Meal Serving Services with full restaurant service, Beverage serving Services for consumption on the premises, Travel agencies and Tour Operator dan Professional Congress Organisers. Untuk moda 1 dan 2 daari seluruh subsektor yang diajukan oleh Philipina telah dikomitmenkan *None* secara menyeluruh. Untuk moda 3, *Market Acces* belum dilakukan hal yang sama seperti pada moda 1 dan 2. Pada moda 3 *Market Acces Limitation* untuk subsector *Travel agencies and Tour Operator* dan *Professional Congress Organisers* yang membatasi modal asing dalam suatu perusahaan hingga maksimal 60%, kecuali untuk subsektor *Beverage serving Services for consumption on the premises* dan *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* yang memperbolehkan hingga 100% dengan syarat modal asing tersebut hingga 2.5 miliar dolla US. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama, telah dikomitmenkan *None*, kecuali *Travel agencies and Tour Operator* dan *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services* yang komitmennya dikembalikan kepada *Horizontal Commitmen*. Untuk moda 4 *Market Acces Limitation* juga mengembalikan komitmennya terhadap apa yang telah dikomitmenkan dalam *Horizontal Commitmen* kecuali *Professional Congress Organisers* yang dikomitmenkan *None*. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama juga seluruhnya telah dikomitmenkan *None*.

Singapura dalam Komitmen Sektor *Tourism* nya mengajukan subsektor subsektor *Hotel Lodging Services, Beverage serving Services for*

consumption on the premises, Restaurant and Catering Services, Circus, amusement park and similar attraction Services, Travel agencies and Tour Operators, Tourist Guide Services, Other Tourism Services (International Hotel Operator, Tourism consultancy Services, Convention Centre, Tourist resorts include Hotel, marinas, golf course and other, sport facilities, Marina facilities, Hotel management, Professional Congress Organisers). Dalam komitmen-komitmen tersebut, moda 1 dan moda 2 oleh Singapura juga telah memberikan komitmen *None* secara menyeluruh. Sedangkan untuk moda 3 dan 4 masih dengan beberapa pembatasan pembatasan. Namun pada beberapa subsektor untuk moda 3 *Market Acces Limitation* juga telah diberlakukan komitmen *None* seperti subsector *Hotel Lodging Services, Restaurant and Catering Services, Travel agencies and Tour Operators* dan *Tourist Guide Services*. Sedangkan untuk *Beverage serving Services for consumption on the premises* dan *other service* masih membatasi modal asing hingga 49 % serta *Circus, amusement park and similar attraction Services* dengan 30 %. Untuk Moda 4 *Market Acces* masih dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian apa yang telah dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment*. Sedangkan untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama, hanya subsektor *Beverage serving Services for consumption on the premises* dan *Hotel Lodging Services* yang dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada komitmen yang ada di *Horizontal Commitment*, sedangkan sisanya dikomitmenkan *Unbound* sepenuhnya

Untuk Thailand sendiri dalam Komitmennya pada Sektor *Tourism* ini mengajukan beberapa subsector seperti : *Hotel Lodging Services, Motel Lodging Services, Holiday center and holiday home Services, Camping and Caravan site Services, Meal Serving Services with full restaurant Services, Catering Services, Beverage serving Services without entertainment, Travel agency and tour operator Services* dan *Hotel management Services*. Dari semua subsector ini, moda 1 dan moda 2 juga telah dikomitmenkan *None*, kecuali pada subsector *Travel agency and tour operator Services* yang moda 1 nya masih *Unbound*. Untuk moda 3 juga Thailand telah memberlakukan dan membuka seluas luasnya subsector yang mereka ajukan dengan mengajukan Komitmen *None* secara menyeluruh, baik *Market Acces Limitation* maupun *National Treatment Limitation*, kecuali pada satu subsector yaitu *Travel agency and tour operator Services* yang pada *Market Acces Limitation* nya memberikan komitmen sebagaimana yang ada pada *Horizontal Commitment* dengan tambaha bahwa dewan direktur dari perusahaan yang bersangkutan tidak boleh kurang setengahnya berkebangsaan Thailand. Kemudian Untuk Moda 4, *Market Acces Limitation* dikomitmenkan sebagaimana yang dikomitmenkan didalam *Horizontal Commitment* Untuk semua subsector, dan untuk *National Treatment* pada moda yang sama, dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian yang ada dalam *Horizontal Commitment*, kecuali subsector *Hotel Lodging Services* dan *Camping and Caravan site*

Services yang menyatakan bahwa komitmen mereka sebagaimana pada *Horizontal Commitment*

Untuk komitmen Vietnam, Vietnam mengajukan beberapa subsector yaitu *Hotel Lodging Services, Food serving Services, Beverage serving Services for consumption on the premises, Travel agencies and Tour Operator Services*. Dari keseluruhan subsector ini, moda 1 dan moda 2 telah diliberalisasi dengan dikomitmenkan *None* secara keseluruhan. Untuk moda 3 *Market Acces limitation*, pada subsector *Travel agencies and Tour Operator Services*. Pada dasarnya dikomitmenkan *None* dengan pengecualian bagi perusahaan penyuplai jasa asing mendapatkan ijin untuk menjadi penyedia jasa dengan bentuk *join venture* dengan partner Vietnam, tanpa batasan suplai modal. Untuk subsector yang lainnya juga dikomitmenkan *None* dengan pengecualian bahwa penyedia jasa, haruslah pararel dengan investasi dibidang *Hotel Construction. renovation, restoration atau acquisition*, setelah itu *None* sepenuhnya. Untuk moda *national treatment*, pada subsector *Travel agencies and Tour Operator Services* dikomitmenkan *None* dengan pengecualian bahwa para para guide di perusahaan dengan investasi asing haruslah warga Vietnam sedangkan untuk subsector lainnya dikomitmenkan *None* secara penuh. Pada komitmen moda 4, seluruh subsector baik pada *National Treatment limitation* dan *Market Acces Limitation* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian apa yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment*.

c. Paket Perundingan AFAS 7

Protocol to implement the seventh package of Commitments under AFAS atau Paket perundingan Afas 7 ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009. Semua negara-negara ASEAN, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam ikut ambil bagian pada Komitmen AFAS 7 ini. sektor sektor yang dikomitmenkan pun kini semakin banyak. Adapun komitmen negara-negara ASEAN pada AFAS 7 kali ini pada sector sector tertentu yaitu:

- Brunei : *Professional Services (Computer and Related Services, Research and development Services, Rental and leasing Services without operator, Other Business Services) , Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Education Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services (Maritime Transport Services, Space Transport, Rail Transport Services, Services Auxiliary to all Modes of Transport)*
- Kamboja: *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Rental/Leasing Services Without Operators, Other Business Services), Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Educational Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel*

Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services (Maritime Services, Road Transport Services, Pipeline Transport Services, Services Auxiliary to all Modes of Transport)

- Indonesia: *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Research and development Services, Rental and leasing Services without operator, other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services (Secondary Education Services, Adult Education, other Education Services), Environmental Services, Healthcare Services , Tourism and Travel Related Services, Transport Services, Other Services n.e.c*
- Laos : *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Research and development Services, . Other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environment Services, . Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Transport Services (Maritime Transport Services, Internal Waterway Transport Services, Road Transport Services, Services Auxiliary to all Modes of Transport) Other Services not Included Elsewhere*

- Malaysia : *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Research and development Services, Rental/Leasing Services Without Operator, Other Business Services,) , Communications Services , Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services, Other Services,*
- Myanmar : *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Rental/Leasing Services Without Operator, Other Business Services) Communications Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, social Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services,*
- Filiphina : *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, . Research and development Services, Real Estate Services, Rental/Leasing Services Without Operators, Other Business Services) , Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational ,Cultural and Sporting Services, Transport Services, other Services not Included elsewhere*

- Singapura : *Business Services (Professional Services, Computer-Related Services , Research and development Services, Rental/Leasing Services Without Operators, Other Business Services), Communication Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services (Other than Audio Visual Services), Transport Services,*
- Thailand : *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Computer and Related Services, Research and development Services, Real Estate Services, Rental/Leasing Services Without Operator, Other Business Services,) Communications Services, Construction Services, Distribution Services, Education Services, Environmental Services, Health Related and Social Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services,*
- Vietnam : *Business Services (Professional Services, Research & Development Services, Other Business Services), Communications Services, Construction and Engineering Related Services, Distribution Services, Educational Services, Environmental Services, Healthcare Services, Tourism and Travel Related Services, Recreational, Cultural and Sporting Services, Transport Services*

- *Komitmen Sektor Tourism*

Dalam afas 7, sector *Tourism* oleh negara-negara peserta AFAS selalu digandengkan dengan *Travel Related Service*. Hal ini beralasan sebab pada saat ini, sektor *Tourism* tak dapat lagi dipisahkan dari perusahaan biro perjalanan itu sendiri, bahkan saat ini, wisata biasanya satu paket dengan paket perjalanan yang ditawarkan oleh biro travel.

Untuk Brunei Darussalam, Pada AFAS 7 kali ini, untuk sektor jasa *Tourism* Brunei Darussalam memberikan komitmennya pada 3 kolom subsektor, yaitu *Hotel Lodging Services* , *Restaurants*, *Other Tourism Services*(*Youth Hostel*, *Golf Courses*, *Marina Facilities*). Untuk kolom subsector jasa *Hotel Lodging Services* dan *Other Tourism Services*, Brunei telah memberikan Komitmen *None* untuk layanan jasa moda 1 dan 2 baik itu pembatasan *National Treatment* serta pembatasan market akses. Sedangkan untuk moda 3 market akses, Brunei mengharuskan pemilik modal asing dalam mendirikan usaha mereka di Brunei haruslah dengan syarat melakukan *join venture* dengan perusahaan lokal dengan menggunakan aturan-aturan lokal. Kemudian untuk pembatasan nasional treatment moda 3 serta seluruh pembatasan pada moda 4, Brunei masih menutup sektor tersebut dengan mengajukan komitmen *Unbound*. Pada subsektor *Restaurants*, komitmen Brunei sebenarnya serupa dengan dua kolom subsektor lain sebelumnya, namun khusus untuk moda 1 *market acces limitation* serta *National Treatment* Brunei memnberikan

pengecualian dalam komitmen *None* nya untuk tidak memperbolehkan minuman beralkohol

Kamboja dalam sector *Tourism* nya memberikan komitmen pada kolom subsector yaitu : *Hotels, Restaurants, Travel agencies and Tour Operators Services, Tourist guides Services*. Kamboja telah memberikan komitmen *None* nya pada seluruh pembatasan moda 1 dan moda 2 pada keempat kolom subsector tersebut. Pada subsector *Hotel* moda 3 telah diberlakukan komitmen *None*, namun pada bagian *Market Acces Limitation* hanya berlaku bagi *Hotel* berbintang 3 keatas dan pada moda 4 *Unbound* sebagai mana pada *Horizontal Commitmennya*. Pada subsector *restaurant* moda 3 dan 4 ternyata masih tertutup dengan komitmen *Unbound*, kecuali pada *Market Acces Limitation* moda 3 dengan persyaratan persyaratan tertentu sesuai dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Untuk subsector *Travel agencies and Tour Operators Services* moda 3 secara keseluruhan telah dikomitmenkan *None*, kecuali untuk *Travel agencies market acces*, mengharuskan partisipasi modal asing maksimal 51%. Sedang pada moda 4 masih *Unbound* kecuali memenuhi apa yang ada dalam *Horizontal Commitment*. Subsector *Tourist guides Services* pada moda 3 secara keseluruhan telah memberlakukan komitmen *None*, namun pada moda 4 masih *Unbound* kecuali memenuhi apa yang telah disyaratkan dalam *Horizontal Commitment*

Indonesia dalam sektor *Tourism and Travel Related Service* ini memberikan total 12 kolom subsector komitmen dalam *SOC* nya.

*Hotels(3, 4, 5 starred Hotels), Hotels (1 or 2 starred Hotels), Motel Lodging Services, Letting Services of furnished accommodations, Meal Serving Services with full restaurant Services, Beverage serving Services without entertainment, Beverage serving Services with entertainment, Travel Agent and Tour Operator Services, Tour Leader Services, Tourism Consultancy Services , International Hotel Operator, Professional congress organiser. Pada Subsektor Hotel, Indonesia membagi komitmennya dalam dua kolom, yaitu khusus untuk Hotel berbintang 3,4 dan 5 serta Hotel berbintang 1 dan 2. Pada pembatasan Moda 1 dan 2 tidak ada masalah karena Indonesia telah memberikan komitmen *None* secara penuh. Sedang Pada moda 3 untuk Hotel berbintang 3,4 dan 5, *Market Acces Limitation* menyatakan bahwa untuk daerah timur Indonesia seperti Kalimantan, Bengkulu, Jambi, Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT),memperbolehkan kepemilikan modal asing disektor ini hingga 100% , namun untuk daerah lain maksimal kepemilikan modal asing hanya hingga 51%. Untuk *National treatmen limitation* pada moda yang sama juga memberikan persyaratan *Higher paid-up capital is required of foreign Services suppliers than of domestic Services suppliers*, dimana akan dihapuskan pada tahun 2012. Untuk moda 4 *Market Acces Limitation* masih *Unbound* kecuali untuk *Top Management Level*(. *General Manager, Food and Beverage Manager, Resident Manager, Comptroller, Marketing Director*) dan *Highli skilled professionals (Executive Chef, Sous Chef, Specialty Cook)*. Sedangkan pada Subsektor Hotel untuk Hotel*

berbintang 1 dan 2, pada moda 3 *Market Acces Limitation* memperbolehkan penyertaan modal asing hingga 51 % untuk wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara sedangkan pada *National Treatmen Limitation* pada Moda yang sama memberikan komitmen sebagaimana yang ada pada *Horizontal Commitmen*. Namun Untuk Moda 4, pada subsektor ini masih tertutup dengan komitmen *Unbound*. Secara keseluruhan, dalam ke 12 subsektor yang diajukan oleh Indonesia untuk dikomitmenkan, pada sektor moda 1 dan dua baik itu *Market Acces Limitation* maupun *National Tratment Limitation* telah memberlakukan Komitmen *None* secara keseluruhan, namun ternyata Indonesia masih sulit dalam membuka sektor-sektor jasa secara penuh pada moda 3 dan 4. Hampir semua moda pada moda 3 dan 4 berstatus *Unbound*, dan sisanya dikomitmenkan dengan *Bound With Limitation*, misalkan pada subsektor *Tour Leader Service* pada moda 3 dan 4 secara keseluruhan komitmennya bahkan berstatus *Unbound*. Pada subsektor *Tourism Consultancy Service* pada moda 3 *Market Acces Limitation* mensyaratkan bahwa setiap pemodal asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia haruslah mendaftar ke menteri Hukum dan Ham Indonesia dan mendaftar sebagai perusahaan Indonesia, dan keharusan untuk menjalin *Joint Venture*, *Join Operation* serta *Join Contract* dengan pemodal lokal dengan memperbolehkan partisipasi pemodal hingga 51%. Untuk *National Treatment limitation* pada yang sama, masih *Unbound* sedangkan pada moda 4 juga *Unbound* kecuali

pada national limitation yang masih ikut pada komitmen dalam *Horizontal Commitment*.

Laos dalam Komitmen mereka dalam sektor *Tourism* memberikan komitmen pada 5 subsektor jasa dalam komitmen mereka di AFAS. *Hotel Lodging Services(with 3 stars or more)*, *Meal Serving Services with full restaurant service*, *Beverage serving Services without entertainment* , *Travel agencies Services*, *in-bound Services only*, *Tourism consulting Services*.

Laos juga telah membuka seluruh subsektor diatas secara penuh untuk moda 1 dan moda 2 secara penuh, Laos telah mencantumkan komitmen *None* pada seluruh subsektor pada sektor *Tourism* khusus untuk moda satu dan 2. Pada moda 3 *Market Acces Limitation* untuk subsektor *Hotel Lodging Services(with 3 stars or more)*, *Meal Serving Services with full restaurant service*, dan *Beverage serving Services without entertainment* Laos menyatakan bahwa komitmennya dikembalikan pada bagian *Horizontal Commitment*, sedang pada *National treatmen* komitmennya masih *Unbound*, kecuali pada *Meal Serving Services with full restaurant service*, dan *Beverage serving Services without entertainment* yang mengecualikan *Unbound* tersebut bila telah memenuhi apa yang dikomitmenkan dalam komitmen horizontal. Untuk Moda 4 dalam *Market Acces Limitation* ketiga subsektor tersebut diberikan komitmen *Unbound* kecuali yang disebut sebagai *intra-corporate transferees of general manager and managers and subject to the approval*

of the competent authority of Lao PDR. Sedang untuk *National Treatment* pada moda yang sama ketiga subsektor ini memberlakukan komitmen *Unbound* dengan pengecualian yang ada dalam horizontal komitmen

Malaysia dalam Komitmen *Tourism* Mereka di SOC mengajukan 5 Subsektor Untuk diliberalisasi dalam SOC nya, yaitu : *Hotel and restaurant Services (Hotel Lodging Services, Holiday Centre and Holiday Home Services, Letting Services of Furnished Accommodation), Food serving Services , Beverage serving Services for consumption on the premises, Travel agencies and Tour Operators Services*(For inbound travel only), *Tourist Guide Services*. Kelima subsektor yang diajukan oleh Malaysia telah diliberalisasi secara penuh untuk Moda 1 dan 2. Secara keseluruhan. Malaysia telah memberikan komitmen *None* untuk kelima subsektor yang diajukan khusus untuk moda 1 dan 2 tersebut. Sementara untuk moda 3 *Market Acces limitation*, kecuali *Tourist Guide Service* mengharuskan para pemodal asing untuk melakukan *Join venture* dengan perusahaan lokal atau perusahaan yang berada dibawah kendali Malaysia dengan persentasi *equity* maksimal 51%. Sementara untuk komitmen Malaysia pada moda yang sama untuk *National Treatment limitation* kecuali *Tourist Guide Service* telah diberikan komitmen *None*. Sedang khusus untuk *Tourist Guide Service* moda 3 secara keseluruhan masih *Unbound* untuk penyedia jasa yang mesih belum teruji kelayakan technical nya, namun sebaliknya untuk moda 4, hanya sektor ini yang memberikan komitmen *None* secara keseluruhan, baik *Market Acces Limitation*

maupun *National Treatment limitation*. Sedangkan 4 subsektor lainnya untuk moda 4 memberlakukan persyaratan-persyaratan untuk *Market Acces Limitation* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada bagian 1(a) dan (b) dalam *Horizontal Commitment* mereka, begitupun pada moda yang sama *National Treatment limitation* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian kategori *Natural person* sebagaimana yang ditunjukkan pada Market Akses.

Myanmar dalam Sektor *Tourism* mengajukan 6 subsektor yang dibagi dalam *Hotel and restaurant Services* dan *Travel agencies and Tour Operators Services*. Keenam subsektor tersebut yaitu : *Hotel and other Lodging Services, Motel Lodging Services, Meal Serving Services with full restaurant service, Beverage serving Services without entertainment , Travel agencies and Tour Operators Services, Tourist Transport Operation: exclusively operating a tourist business by motor vehicle, water craft or both*. Myanmar pun telah membuka seluas luasnya sektor *Tourism* yang diajukan dengan memberikan komitmen *None* pada semua subsektor yang diajukan untuk Moda 1 dan 2 secara keseluruhan. Namun Myanmar masih sulit melakukan hal yang sama pada moda 3 dan 4 dari subsektor yang diajukan . pada subsektor *Travel agencies and Tour Operators Services* dan *Tourist transport operation: exclusively operating a tourist business by motor vehicle, water craft or both* misalkan. Kedua subsektor ini diajukan dengan komitmen yang sama, pada moda 3 dan 4 hanya *Market Acces Limitation* moda 3 saja yang diajukan dengan

komitmen *None*, selebihnya masih komitmen *Unbound*. Untuk subsektor *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dan *Beverage serving Services without entertainment* pada *Market Acces Limitation* untuk moda 3 dan 4 telah di komitmenkan *None*, sementara *National Treatmen Limitation* moda 4 pada kedua subsektor ini masih *Unbound* dan pada moda tiga masih dengan pembatasan-pembatasan.

Piliphina hanya mengajukan 4 kolom subsektor dalam *SOC* nya pada komitmen *Tourism* mereka, yaitu : *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services, Meal Serving Services with full restaurant service, Beverage serving Services for consumption on the premises* serta *Travel agencies and Tour Operator*. Secara keseluruhan, khusus pada moda 1 dan moda 2 Philiphina telah memberikan komitmen *None* pada semua moda tersebut baik *Market Acces Limitation* maupun *National Treatment limitation*. Pada moda 3 dan 4 pun sebenarnya sebagian telah dikomitmenkan *None*, namun sebagian lainnya masih *Bound With Limitation*, atau *None* dengan pengecualian. Pada subsektor *Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles Lodging Services* misalkan. Moda 3 dan 4 nya dikomitmenkan *None* dengan pengecualian sebagaimana yang telah dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment* mereka, kecuali pada moda 4 *National Treatment*. Pada subsektor *Meal Serving Services with Full Restaurant Service* dan *Beverage serving Services for consumption on the premises* moda 3 *Market Acces Limitation* menyatakan bahwa hanya pemodal asing dengan penanaman

nilai modal senilai 2.5 miliar dolar US yang dapat memiliki perusahaan secara penuh. Sedangkan pada moda 4 *Market Acces Limitation* kembali menyaratkan sebagaimana dalam *Horizontal Commitmen*. Pada moda 3 dan 4 *National Treatmen* keduanya telah memberikan komitmen *None*. Untuk *Travel agencies and Tour Operator* pada moda 3 *Market Acces Limitation* memperbolehkan maksimal hingga 60 % partisipasi modal asing sedangkan untuk *National Treatmen* pada moda yang sama serta *Market Acces Limitation* pada moda 4 kembali pada apa yang dikomitmenkan pada *National Treatmen* serta untuk *National Treatment* pada moda 4 subsektor ini telah dikomitmenkan dengan *None*.

Singapura dalam komitmen *Tourism* mereka mengajukan 6 kolom subsektor untuk diliberalisasi, yaitu *Hotel Lodging Services* , *Restaurant and Catering Services*, *Beverage serving Services for consumption on the premises*, *Travel agencies and Tour Operators*, *Tourist Guide Services* , dan *Other Tourism Services (International Hotel Operator, Tourism consultancy Services, Convention Centre, Tourist resorts include Hotel, Marinas, golf course and other , Sport facilities, Hotel management, Professional Congress Organisers)*. untuk komitmen sektor *Tourisme* tersebut pada moda 1 dan 2 telah dikomitmenkan *None* secara keseluruhan kecuali moda 1 *Market Acces Limitation* pada subsektor *Hotel Lodging Services* . pada kolom *Other service* moda 3 *Market Acces limitation*, seluruh subsektor membatasi modal asing maksimal 51%, sedangkan pada *National Treatmen Limitation* moda yang sama telah dikomitmenkan

None, pada moda 4 *Market Acces* dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian pada *Horizontal Commitment*, sedangkan pada *National Treatmen limitation* masih tertutup dengan komitmen *Unbound*. Secara keseluruhan, sebagian komitmen moda 3 market *Market Acces Limitation* sebagian telah dikomitmenkan *None*. sebagian lainnya (*Beverage serving Services for consumption on the premises* dan kolom *other service*) hanya mensyaratkan partisipasi maksimal dari 51 % modal asing , sedangkan pada *National Treatmen* moda yang sama, hanya subsektor *Travel agencies and Tour Operators* saja yang *Unbound*, selebihnya telah dikomitmenkan *None*. untuk moda 4 seluruhnya masih *Unbound* dengan pengecualian pada yang di komitmenkan di *Horizontal Commitment*. Namun pada *National Treatment* moda subsektor selain *Hotel Lodging Services* dan *Beverage serving Services for consumption on the premises* dikomitmenkan dengan *Unbound*

Thailand dalam *SOC Sektor Tourism* mengajukan total 9 kolom subsektor, yaitu *Hotel Lodging Services*, *Motel Lodging Services*, *Holiday center and holiday home Services*, *Holiday center and holiday home Services*, *Meal Serving Services with full restaurant Services*, *Catering Services*, *Beverage serving Services without entertainment*, *Travel agency and tour operator Services*, *Hotel management Services*. Thailand telah memberikan komitmen yang relatif lebih jauh dibandingkan negara lain. Thailand telah melakukan liberalisasi secara penuh subsektor yang diajukannya untuk moda 1, 2 dan 3 baik itu *Market Acces Limitation*

maupun *National Treatment limitation*, kecuali subsector *Travel agency and tour operator Services* yang justru hanya moda 2 yang secara keseluruhan berkomitmen *None*, sedang moda 1 baik *Market Acces* maupun *National Treatment limitation*nya berstatus *Unbound*, sedang moda 3 *Market Acces* dari moda ini mewajibkan bahwa setiap perusahaan bersangkutan mewajibkan tidak kurang dari dewan direktornya berkebangsaan Thailand. Untuk *National Treatment limitation* pada moda yang sama telah dikomitmenkan *None*. Sedangkan untuk moda 4 kesembilan kolom subsektor yang diajukan Thailand dikomitmenkan dengan komitmen yang sama secara keseluruhan, yaitu dengan sebagaimana yang dikomitmenkan pada *Horizontal Commitment* mereka sebelumnya

Vietnam dalam komitmen *Tourism* nya mengajukan 5 subsektor jasa dalam 3 kolom subsektor. Yaitu *Hotel Lodging Services* , *Food serving Services*, *Beverage serving Services for consumption on the premises* , *Travel agencies and Tour Operator Services*, *Others (Tourist Theme Park)*. Seperti halnya negara lain, untuk moda 1 dan 2 Vietnam telah membuka seluas luasnya sektor tersebut, akan tetapi moda 3 dan 4 sebahagian besar masih dengan persyaratan-persyaratan. Hal yang menarik pada subsektor *Hotel Lodging Services* , *Food serving Services*, *Beverage serving Services for consumption on the premises* moda 3 *Market Acces Limitation* dikomitmenkan *None* akan tetapi akan berlaku setelah 8 tahun sejak 11 januari 2007. Setelah itu dalam *SOC* juga disebutkan “the

Services provided should be in parallel with the investment in the Hotel Construction. renovation, restoration or acquisition. None afterwards”.

Sedangkan pada *National Treatment limitation* pada moda yang sama dikomitmenkan *None*. Untuk moda 4 subsektor-subsektor ini secara keseluruhan dikomitmenkan *Unbound* dengan pengecualian komitmen yang ada dalam *Horizontal Commitment*. Untuk subsektor *Travel agencies and Tour Operator Services, Others (Tourist Theme Park)* pada moda 4 berisi komitmen *Unbound* dengan pengecualian yang telah dikomitmenkan sebelumnya pada *Horizontal Commitmen*, sedangkan moda 3 dari kedua subsektor ini masih *None* dengan beberapa pengecualian yang disebutkan, kecuali pada *National Treatment limitation* pada subsector *Tourist Theme Park* yang masih *Unbound*.

Dari semua komitmen yang diberikan oleh negara-negara Asean terhadap perundingan AFAS dari tahun ke tahun memang semakin bertambah jumlah sektor dan subsektor yang dimasukkan. Akan tetapi liberalisasi untuk moda 3 dan 4 ternyata masih sesuatu yang sulit dilakukan oleh negara-negara Asean. Untuk moda 1 dan 2 memang terlihat negara-negara Asean dalam komitmen AFAS telah dibuka seluas luasnya. Hal ini terlihat dari komitmen yang diajukan oleh negara negara Asean lebih dari 95% telah dikomitmenkan *None* secara penuh. Namun untuk moda 3 dan 4 masih dengan pembatasan pembatasan. Pada moda 3 misalkan, negara-negara Asean masih banyak membatasi investasi asing untuk menanamkan modalnya hingga 100% per total investasi dalam satu

bidang usaha. Hingga Afas 7, hampir semua negara-negara masih mewajibkan pemodal asing untuk melakukan *Join venture* dengan investor dalam negeri masing masing, meskipun dari paket komitmen ke paket komitmen lainnya persentasi dari modal asing yang diperbolehkan dalam satu bidang semakin meningkat meskipun tidak secara signifikan., misalkan *Meal Serving Services with full restaurant Services* oleh Indonesia yang pada AFAS 5 dan 6 sama, hanya memperbolehkan modal asing hingga 49% pada saat AFAS 7 telah ditingkatkan menjadi 51%.

Tentu saja bukan hal yang mudah dalam membuka sektor sektor tertentu dalam perdagangan jasa suatu negara. Dibutuhkan negosiasi yang tidak sebentar oleh negara yang bersangkutan dengan penyedia jasa dalam negeri yang bersangkutan untuk membuka sektor-sektor jasa tertentu yang ingin diajukan oleh negara tersebut kedalam komitmen AFAS. Tentu saja ini juga mengenai kesiapan subsektor jasa tersebut sebelum diajukan kedalam komitmen AFAS untuk diliberalisasi kemudian dan bersaing dengan penyedia jasa asing.

Dibawah paket 7 dari komitmen *ASEAN Framework Agreement in Service* (AFAS), ASEAN telah mengkomitmenkan setidaknya 65 subsektor jasa untuk diliberalisasi. Komitmen jasa untuk paket AFAS 8 dengan lebih banyak subsektor dan akses liberalisasi yang lebih tinggi kini sedang ditargetkan, dimana saat tulisan ini ditulis (2012) sedang dalam proses kesepakatan akhir. Kemudian untuk mendukung mobilitas dari *Qualified Professional* dalam wilayah regional ini, kesepakatan MRA

untuk profesi *Engineers* dan *Architect* telah diimplementasikan dan pada saat yang sama sedang berusaha untuk mengefektifkan aturan MRA untuk bidang *Professional* yang lain (*nursing, medical, dental, accountancy, and surveying*). Kemudian untuk memfasilitasi perpindahan person untuk perdagangan dan investasi, the *ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons* (MNP) telah di rancang dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2012 ¹⁶⁴.

C. Pengaruh liberalisasi perdagangan Jasa AFAS terhadap peningkatan Industri jasa dalam negeri

Perjanjian liberalisasi perdagangan dalam konteks AFAS telah berjalan cukup lama yaitu sejak tahun 1996 hingga saat tulisan ini ditulis yaitu 2012 telah berjalan dalam kurun waktu 16 tahun. Selama 16 tahun tersebut, negara-negara ASEAN telah berhasil menyelesaikan 5 paket putaran perundingan AFAS yang terdiri dari 7 paket komitmen dan kini sejak tulisan ini ditulis, putaran perundingan ke 6 yang menegosiasikan kesepakatan AFAS paket 8 sedang dirampungkan.

Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kompetitif sehingga proses penyediaan jasa dapat berlangsung secara lebih baik dan efisien. Ekonomi modern sangat

¹⁶⁴ Asean Economic Community Scorecard, Jakarta, CHARTING PROGRESS TOWARD REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION Phase I (2008-2009) and Phase II (2010-2011) 2012 the asean secretariat, Hlm 5,

bergantung pada pelayanan jasa yang cepat dan efisien untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya¹⁶⁵

Melalui liberalisasi bidang jasa secara progresif, maka para penyedia jasa domestik akan mendapatkan keuntungan karena semakin terbukanya akses pasar. Para penyedia jasa juga akan memetik manfaat dari proses dan gagasan baru yang muncul akibat semakin terbukannya sektor jasa¹⁶⁶.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah yang secara khusus membahas permasalahan terkait dengan dampak dan pengaruh dari kesepakatan kesepakatan negara-negara dalam AFAS untuk membuka sektor-sektor jasa tertentu terhadap perkembangan industri jasa yang bersangkutan. Kebanyakan penulis hanya menemukan literature-literatur yang membahas mengenai kemungkinan akibat yang akan ditimbulkan dengan pembukaan sektor-sektor tersebut terhadap industri jasa dalam negeri dari sektor-sektor yang akan dibuka. Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan bagaimana perkembangan sektor industri jasa dari waktu ke waktu sejak diadakannya perjanjian AFAS oleh negara-negara ASEAN.

Liberalisasi bidang jasa di ASEAN dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kompetitif sehingga proses penyediaan jasa dapat berlangsung secara lebih baik dan efisien. Ekonomi modern sangat

¹⁶⁵ Integrasi ekonomi asean dibidang jasa. Dirjen kerjasama asean DEPLU. Hal 2

¹⁶⁶ Ibid.

bergantung pada pelayanan jasa yang cepat dan efisien untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lainnya. Manfaat liberalisasi perdagangan dibidang jasa adalah potensi keuntungan yang dapat diraih oleh ASEAN dari liberalisasi bidang jasa sangatlah tinggi. Melalui proses liberalisasi, maka investasi dibidang jasa yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan akan semakin meningkat. Sebagai catatan, pada tahun 2008 pendapatan sektor jasa di ASEAN mencapai 50% dari total arus *Foreign Direct Investment* jasa di ASEAN atau sekitar US\$ 33,5 miliar. Peningkatan investasi dibidang jasa di ASEAN tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan sektor perekonomian lainnya di kawasan seperti sektor keuangan, telekomunikasi, distribusi, dan transportasi¹⁶⁷

Ekspor sektor jasa intra ASEAN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya karena para eksportir sektor jasa intra ASEAN ingin mengikuti keberhasilan yang telah dicapai dalam bidang ekspor barang. Melalui liberalisasi bidang jasa secara progresif di ASEAN, maka bidang jasa akan memiliki peran yang lebih besar dan semakin penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperluas basis ekonomi, serta meningkatkan kontribusi terhadap ekspor. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan inovasi dan perkembangan teknologi baru, penyesuaian terhadap standar internasional guna meningkatkan daya saing dan

¹⁶⁷ Silvi Ch. Sumanti, "Perkembangan Asean Framework Agreement on service dan Kesiapan Indonesia", *Buletin KPI*, Kementerian Perdagangan, Edisi 001/KPI/BUL/2011, Hlm36

efisiensi, peningkatan arus perdagangan dan investasi, serta pengembangan sumber daya manusia di ASEAN.

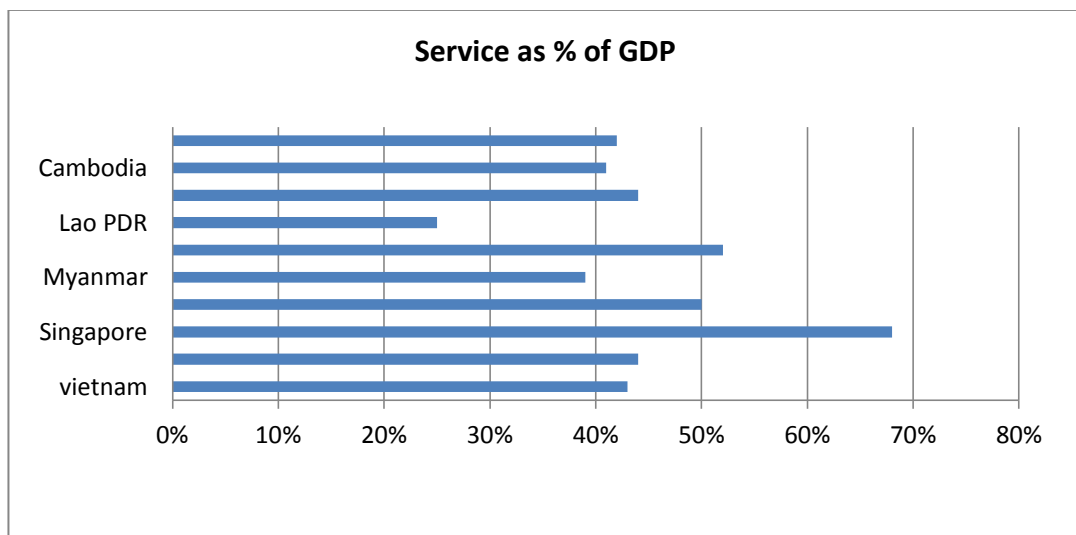
Potensi keuntungan yang dapat diraih oleh ASEAN dari liberalisasi bidang jasa sangat tinggi. Melalui proses liberalisasi, maka investasi dibidang jasa yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan semakin meningkat. Sebagai catatan, pada tahun 2008 pendapatan sektor jasa di Asean mencapai 50 % dari total arus *Foreign Direct investment* (FDI) Asean atau sekitar US\$ 33,5 miliar. Perkembangan investasi bidang jasa di Asean tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemajuan sektor perekonomian lainnya di kawasan seperti sektor keuangan, telekomunikasi, distribusi dan transportasi.¹⁶⁸

Asean juga akan mendapatkan manfaat dengan masuknya arus teknologi, pengetahuan baru dan keterampilan manajemen sebagai akibat dari adanya aliran bebas bidang jasa. Perdagangan bidang jasa intra asean diharapkan akan terus meningkat dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kunci utamanya adalah asean harus melaksanakan liberalisasi bidang jasa secara progresif dan tertata dengan baik agar tercipta perluasan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Integrasi ekonomi asean di bidang jasa hal 3

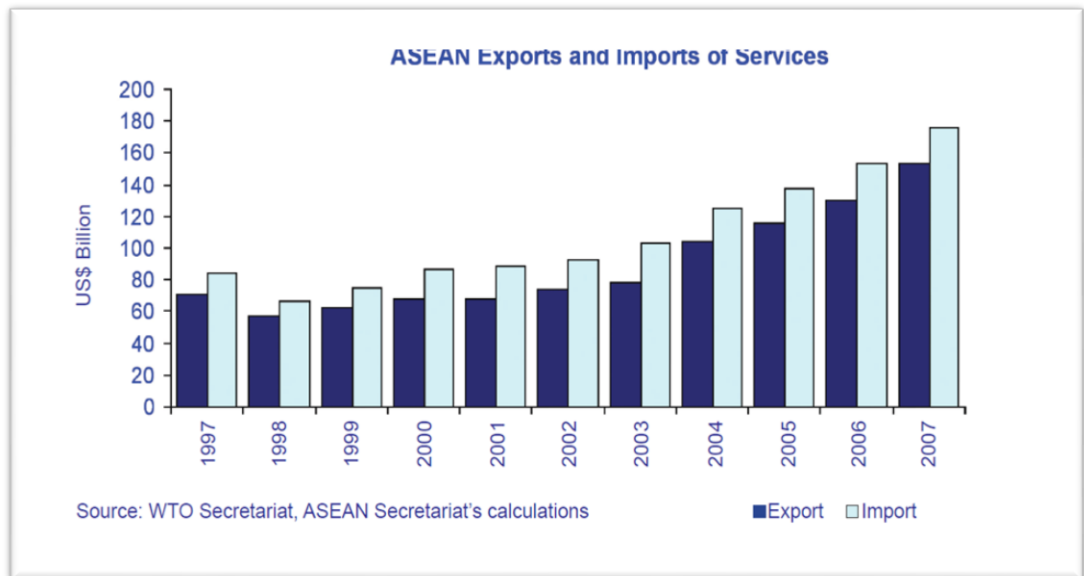
¹⁶⁹ Ibid

Sejak ditandatanganinya kesepakatan AFAS yang selanjutnya diimplementasikan melalui paket perundingan AFAS sejak tahun 1998 hingga 2007, perdagangan internasional bidang jasa asean meningkat cukup tinggi. Ekspor sektor jasa ASEAN meningkat sebesar US\$ 57,4 miliar pada tahun 1998 menjadi US\$ 153,2 miliar pada tahun 2007 atau meningkat sekitar 167 %. Sementara impor sektor jasa Asean dari pasar internasional meningkat dari 66,5 miliar pada 1998 menjadi US\$ 176,3 miliar pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 165 %. Impor sektor jasa ASEAN mengalami kenaikan tajam, seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi asing ke ASEAN yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan jasa asing seperti perawatan mesin-mesin dan tenaga ahli¹⁷⁰.



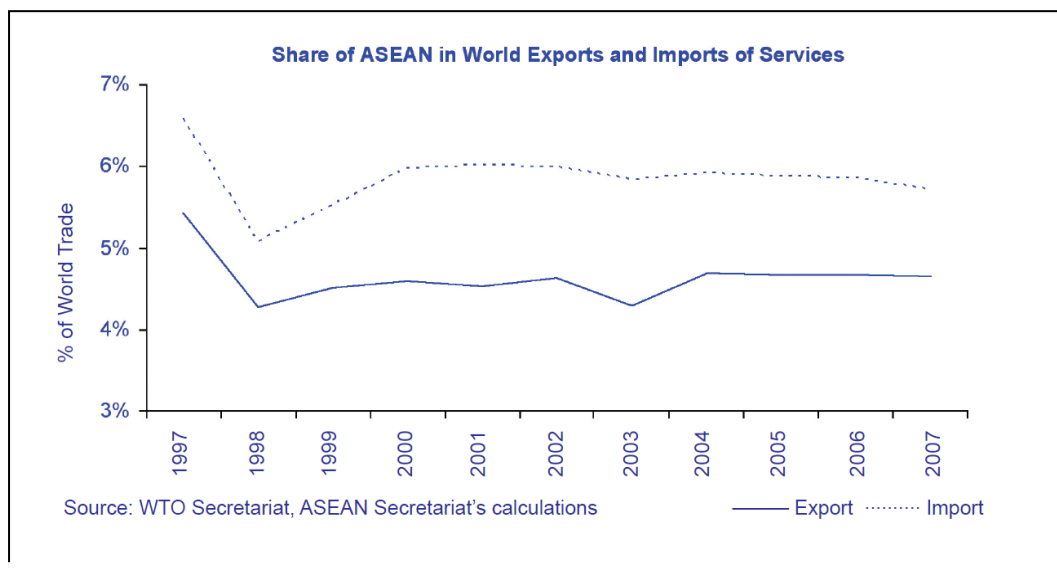
Gambar . 1
Nilai kontribusi sector jasa terhadap PDB Negara-negara anggota Asean

¹⁷⁰ Integrasi ekonomi asean di bidang jasa hal , hal 3-4. Dirjen kerjasama asean.

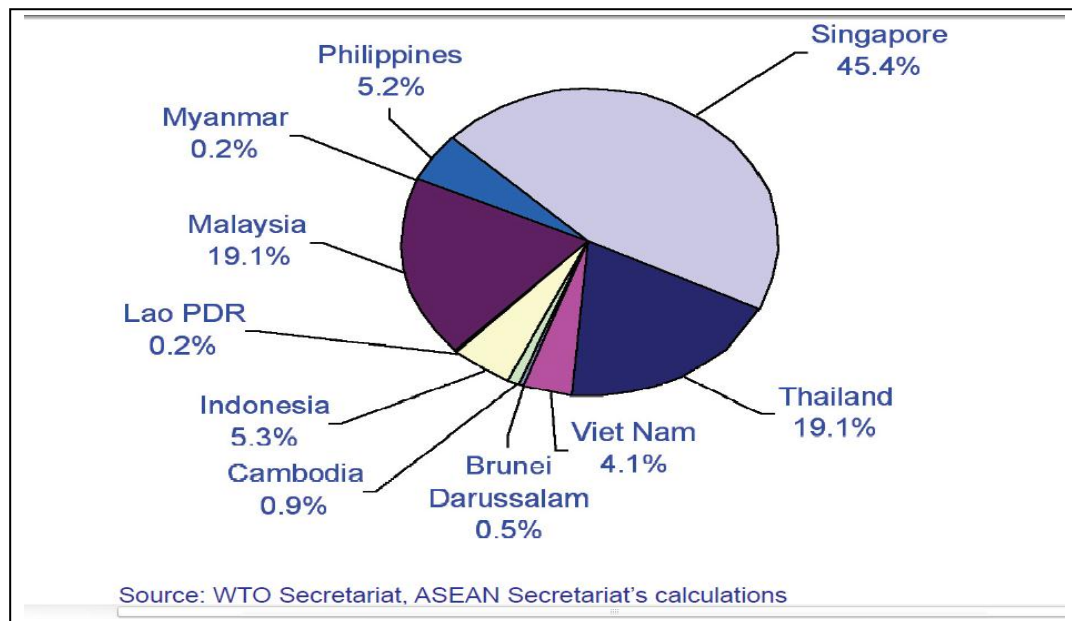


Gambar. 2
Jumlah Ekspor dan Impor Sektor Jasa Asean

Dilihat dari volume perdagangan, ASEAN merupakan penyedia sektor jasa terbesar di dunia dibandingkan dengan organisasi regional negara-negara berkembang lainnya. Nilai kontribusi perdagangan ekspor dan impor sektor jasa ASEAN sebesar 4,7 % dan 5,7 % terhadap jumlah perdagangan sektor jasa dunia pada tahun 2007.



Gambar. 3
Nilai Kontribusi Ekspor dan Impor Sektor Jasa ASEAN terhadap



Gambar . 4
Nilai Ekspor perdagangan bidang Jasa ASEAN tahun 2007

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan jasa untuk lingkup perdagangan intra ASEAN telah berkembang sangat pesat, hal ini juga telah ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam perdagangan jasa intra ASEAN tersebut yang ditandai dengan meningkatnya porsi sumbangan PDB negara negara Asean dari sektor perdagangan jasa terhadap total nilai PDB masing masing. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan volume perdagangan jasa yang terjadi sebagai imbas dari semakin dibukanya sektor sektor perdagangan jasa untuk bersaing secara bebas yang memancing pelaku pasar untuk lebih ekspansif dalam perdagangan jasa. Tentu saja negara-negara yang membuka sektor perdagangan jasa mereka haruslah memikirkan segala konsekuensi dan

kesiapan sektor tersebut sebelum benar-benar membukanya untuk bersaing dengan penyedia jasa asing dalam lingkup intra ASEAN. Hal ini pulalah yang menjadi penghambat utama beberapa keterlambatan dan kegagalan memenuhi target tenggang waktu untuk membuka beberapa sektor tertentu dalam perjanjian AFAS, karena rumitnya perundingan baik dengan penyedia jasa dalam negeri dalam rangka kesiapan mereka dalam bersaing, maupun dengan negara lainnya dalam rangka kesiapan mereka untuk membuka sektor yang diusulkan.

Lalu kemudian bagaimana dengan sektor perdagangan jasa di Indonesia itu sendiri? Dalam AFAS 7, Indonesia mengkomitmenkan subsektor subsektor berupa: *Business Services (Professional Services, Computer and Related Services, Research and development Services, Rental and leasing Services without operator, other Business Services), Communications Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services, Education Services (Secondary Education Services, Adult Education, other Education Services), Environmental Services, Healthcare Services , Tourism and Travel Related Services, Transport Services, Other Services n.e.c.* Komitmen-komitmen tersebut oleh pemerintah Indonesia, dianggap menguntungkan untuk dibuka, sehingga pantas untuk diajukan kedalam komitmen spesifik jasa Indonesia. Akan tetapi kemudian bagaimana pengaruh komitmen ini terhadap industri jasa Indonesia? Oleh karena itu kemudian, peneliti mengambil parameter peningkatan nilai ekspor dan statistik jasa Indonesia,

sebagai tolak ukur apakah industri dalam negeri secara umum berkembang untuk bersaing dengan penyedia jasa dari luar. Semakin banyak sektor layanan jasa Indonesia yang di ekspor, maka semakin baik dan berkembang sektor jasa tersebut.

Dari data yang telah dipaparkan diatas, bahwa pada tahun 2007 menunjukkan bahwa nilai kontribusi sektor jasa terhadap PDB Indonesia kurang lebih mencapai 43%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan jasa berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dalam negeri. pembukaan sektor-sektor jasa dalam negeri tentunya akan mempermudah penyedia jasa asing untuk ikut menawarkan jasanya di Indonesia, yang berakibat dari meningkatnya arus investasi asing masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi persaingan seperti ini, para penyedia jasa dalam negeri haruslah benar-benar siap untuk menghadapi para penyedia jasa asing, atau kita akan menjadi pekerja di rumah sendiri.

Namun kemudian, perlu diperhatikan bahwa dalam laporan triwulan ke 3 yang dikeluarkan oleh bank Indonesia¹⁷¹, disebutkan bahwa neraca perdagangan jasa Indonesia masih mengalami defisit sebesar USD2,4 Miliar, meskipun lebih kecil bila dibandingkan dengan defisit pada triwulan kedua pada tahun yang sama, yaitu sebesar USD 2,9 Miliar. Menyusutnya defisit tersebut terutama karena penurunan defisit jasa transportasi dan kenaikan surplus jasa travel, namun tetap saja hal ini

¹⁷¹ Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan III-2012, 2012, Bank Indonesia, Jakarta, hal 9

menandakan bahwa meskipun ekspor jasa Indonesia dibidang jasa meningkat, namun juga diikuti dengan peningkatan jumlah impor jasa dari luar masuk ke Indonesia.

Kemudian pada laporan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa berkurangnya defisit jasa transportasi terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran *freight* impor seiring aktivitas impor yang menurun. Sementara, peningkatan surplus jasa travel pada Triwulan III-2012 didorong oleh kenaikan *inflow* dari wisatawan mancanegara (*wisman/inbound traveler*) seiring pola pengeluaran wisman yang lebih tinggi di triwulan laporan.

Jumlah wisman selama Tw. III-2012 tercatat sebanyak 2,03 juta orang, naik 2,2% dari triwulan sebelumnya (1,99 juta orang). Sementara secara nominal, penerimaan jasa perjalanan dari wisman tersebut tercatat sebesar USD2,1 miliar, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar USD1,8 miliar

Di sisi lain, jumlah wisatawan nasional (wisnas) yang bepergian ke luar negeri meningkat dari 1,89 juta orang pada Tw. II-2012 menjadi 2,07 juta orang pada Tw. III-2012 seiring libur lebaran dan dimulainya musim haji. Namun demikian, peningkatan tersebut disertai dengan pengeluaran jasa perjalanan yang sedikit lebih kecil (USD1,57 miliar) dibanding triwulan sebelumnya (USD1,61 miliar). Tujuan utama kunjungan wisnas

adalah negara-negara kawasan Asia, yaitu Singapura dan Malaysia, serta Australia.

Pada laporan mengenai transfer neraca berjalan Triwulan ke 3 tahun 2012, juga memperlihatkan bahwa remitansi¹⁷² menjadi tulang punggung surplus transfer berjalan meski kontribusinya terhadap keseluruhan penerimaan transaksi berjalan cenderung menurun seiring adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang didominasi jabatan berpenghasilan tinggi. Di sisi *inflow*, remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) relatif stabil karena kebijakan moratorium penempatan TKI di beberapa negara tujuan dapat diimbangi dengan struktur gaji yang lebih baik di negara penempatan TKI lainnya. Kebijakan moratorium TKI juga diikuti dengan perbaikan komposisi TKI formal.

Selanjutnya pada Grafik 3.5 , kita dapat melihat mengenai neraca pembayaran indonesia yang memperlihatkan transaksi berjalan di sektor jasa-jasa. Pada tabel tersebut diperlihatkan perkembangan neraca pembayaran indonesia di sektor jasa per triwulan sejak tahun 2010 hingga triwulan ketiga tahun 2012. Terlihat bahwa neraca perdagangan jasa-jasa indonesia sejak tahun 2010 hingga saat tulisan ini ditulis dengan menggunakan data triwulan ke 3 tahun 2012, masih mengalami tren

¹⁷² Remitansi adalah dana yang dibawa masuk oleh pekerja migrant ke negaranya asalnya. Remitansi merupakan alah satu sumber daya ekonomi yang paling besar bagi negara, terutama negara berkembang atau negara dunia ketiga. Bahkan menurut World Bank, remitansi merupakan penghasilan terbesar kedua negara-negara berkembang. Karena itu, tingkat kemiskinan di sebuah negara dapat menurun (diakses dari <http://library.thinkquest.org/07aug/00782/id/remittance.html>, pada tanggal 30 desember 2012 pukul 22.6

defisit. Hal ini sekaligus menunjukkan dari tahun ke tahun bahwa jumlah impor Indonesia di sektor jasa selalu lebih besar daripada ekspor jasa Indonesia itu sendiri. Pada tahun

2010, jumlah total ekspor jasa mencapai USD 16,7 miliar, dan jumlah impor jasa Indonesia mencapai USD 26 miliar, sehingga total defisit mencapai USD 9,3 miliar. Pada tahun selanjutnya yaitu 2011, total defisit malah kemudian bertambah menjadi USD 10,6 miliar, hal ini diakibatkan peningkatan impor jasa dalam kurun waktu 2011 senilai USD 31,3 miliar. Meskipun sektor ekspor juga meningkat menjadi USD 20,6 miliar, namun

Tabel 2

ketimpangannya menjadi semakin jauh. Sedangkan hingga triwulan ketiga tahun 2012, tren defisit yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya napaknya juga masih akan terus berlanjut, hal ini dengan defisit yang terus terjadi setiap triwulannya dengan kisaran USD 2 miliar hingga mendekati USD 3 miliar.

Dari tabel terangkumlah sektor sektor jasa, seperti transportasi, perjalanan, jasa komunikasi, konstruksi, keuangan, asuransi, komputer dan informasi, royalti dan imbalan lisensi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural dan rekreasi, dan jasa pemerintah yang tidak dicatat di tempat lain. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai trend defisit disektor jasa ini, namun pada dasarnya ada beberapa sektor yang masih menghasilkan surplus neraca perdagangan, seperti sektor perjalanan, yang pada tahun 2010 mengalami surplus sebesar USD 563 juta, kemudian meningkat pesat menjadi USD 1,7 miliar pada tahun 2011 dan hingga triwulan ketiga tahun 2012 telah menembus angka USD 1,3 miliar. Sektor yang juga mengalami surplus yaitu sektor komunikasi yang mengalami peningkatan dari USD 579 juta pada tahun 2011 menjadi USD 644 juta pada 2012, kemudian jasa konstruksi yang mulai surplus USD 54 juta pada 2011 dan tren surplus USD 167 juta hingga triwulan ke 3 tahun 2012, kemudian jasa pemerintah yang tidak dicatat di tempat lain yang surplus USD 65 juta pada 2010 yang mengalami penurunan menjadi USD 38 juta pada 2012.

Sementara itu pada sektor-sektor lainnya masih mengalami defisit yang cukup signifikan, misalkan pada sektor transportasi yang masih

mengalami tingkat ketimpangan jumlah ekspor dan impor yang cukup signifikan, sehingga mengalami defisit hingga USD 6 miliar pada 2010, dan meningkat menjadi USD 8,6 miliar pada 2011 dan hingga triwulan ketiga 2012 telah mengalami defisit sekitar USD 6,7 miliar.

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun sektor jasa Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan peningkatan ekspor jasa Indonesia dari tahun ke tahun, meskipun tak dapat di hindari juga bahwa impor Indonesia pada sektor jasa juga terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan defisit pada neraca perdagangan jasa Indonesia.

Dalam hubungannya dengan perjanjian perdagangan AFAS, tentu saja indonesia membutuhkan pasar yang terbuka di negara-negara tujuan ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspornya pada bidang jasa jasa sehingga dapat menipiskan dan menghilangkan defisit neraca perdagangan jasanya. Sejauh ini, dari tahun ke tahun Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah kuantitas perdagangan jasa mereka dan seiring dengan semakin banyaknya sektor-sektor jasa yang di buka oleh negara-negara Asia Tenggara daam rangka perjanjian AFAS, maka akan semakin mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah ekspor jasa mereka ke negara-negara ASEAN yang bila dibarengi dengan peningkatan kualitas jasa dalam negeri untuk bersaing dengan jasa luar yang masuk ke indonesia, sehingga kita dapat sekaligus memenuhi permintaan jasa dalam

negeri sehingga menekan impor. Dengan Hal ini dengan sendirinya akan mengurangi defisit neraca perdagangan jasa di Indonesia

Bagi Indonesia, AFAS memberikan peluang kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pasar bersama yang besar dan kenaikan aliran faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, peluang yang diperoleh adalah akses yang lebih baik pada teknologi, jasa pasokan dan kompetisi domestik yang lebih tinggi, serta transfer dari *know how* dan teknologi melalui investasi. kompetisi industri jasa selain ditentukan oleh modal, teknologi dan SDM yang berkualitas, perubahan industri jasa ditentukan pada sektor mana yang akan dibuka dan efektifitas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk sektor telekomunikasi, kompetisi mendorong perluasan area telekomunikasi, menurunkan permintaan perbaikan, meningkatkan tingkat pemenuhan panggilan, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerima sambungan telpon. Pada sektor angkutan darat, reformasi telah meningkatkan perluasan ruas jalan, dipelabuhan dan akan mempersingkat waktu tunggu berlayar dan lain-lainnya¹⁷³.

¹⁷³ (Lihat jug) World Bank (2004), *Reforming Infrastructure: Privatization, regulation and competition*, Washington D.C

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang penulis telah uraikan kedalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Terlihat bagaimana negara-negara Asean dengan aturan regional AFAS nya tetap saja sulit untuk memperlakukan sama antara penyedia jasa domestik negara-negara asean dengan negara-negara yang berada dibawah GATS diluar cakupan AFAS ASEAN. Dari pengamatan kami tentu saja sulit untuk menyeragamkan apa yang dikomitmenkan di AFAS dan GATS bukan saja karena keduanya dipayungi oleh aturan perdagangan bebas yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan komitmen, namun tentu saja juga hal ini sebagai akibat dari posisi ASEAN dengan regionalisasi ekonomi jasa dengan AFAS yang dibentuknya.

Meskipun pada dasarnya proses penerapan Aturan-aturan perdagangan jasa regional dilakukan dengan menabrak prinsip-prinsip umum yang biasa berlaku di WTO, seperti prinsip Non diskriminasi dan *National Treatmen*, pengesampingan aturan seperti ini menjadi legal dalam perdagangan jasa. Hal ini disebabkan karna aturan yang dibuat di GATS yang memayungi perdagangan jasa dibuat dengan memperlonggar pemberlakuan prinsip tersebut. Banyak pengecualian-pengecualian yang dibuat oleh GATS untuk boleh mengenyampingkan prinsip Non Diskriminasi dan Nasional Treatment dalam berbagai moment dan situasi yang dalam sektor barang

tidak dapat dilakukan. Namun mengingat sektor jasa masih sangat muda, maka tentu saja sector jasa sangat sulit mencapai kesepakatan bila tidak melonggarkan beberapa prinsip prinsip dasar tersebut

2. Dalam Penerapan prinsip prinsip AFAS, bahwa dalam AFAS sendiri menerapkan prinsip sebagaimana yang ada didalam WTO. Terdapat empat prinsip utama, yaitu MFN (*Most Favoured Nation*), *Non Discriminative*, *Transparency*, dan *Progressive Liberalisation*.

Prinsip *Most Favored Nation* sendiri tidak berlaku mutlak. Terdapat kemungkinan kemungkinan dimana prinsip ini dapat dikesampingkan. Salah satunya adalah bahwa setiap negosiasi paket AFAS sendiri selain komitmen *Schedule Of Specific Commitment* dan *Horizontal Commitment* dikenal adanya *MFN Exemption*. *MFN Exemption* ini memuat hal hal dimana kewajiban MFN dari suatu negara anggota dikecualikan. Pengecualian ini harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal II GATS mengenai MFN

Prinsip selanjutnya yaitu *Non Discriminative*, umum bahwa bila suatu negara menerapkan suatu hambatan dalam perdagangan, maka hambatan tersebut haruslah berlaku untuk semua negara. prinsip ini hanya berlaku dalam konteks negara negara anggota AFAS, dan tidak berlaku terhadap negara-negara yang berada diluar perjanjian ini. Oleh karena itu, maka diskriminasi terhadap negara-negara anggota asean memang dapat dicegah dengan adanya prinsip ini, akan tetapi sebagai organisasi regional, maka

perbedaan perlakuan antara negara anggota dan negara diluar konteks AFAS tak bisa dihindari.

Prinsip *Transparency* dilaksanakan dengan mewajibkan setiap Negara-negara Asean untuk melakukan pemberitahuan baik itu dengan publikasi terhadap semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Progressive liberalization, bahwa setiap negara anggota wajib melakukan liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonominya masing-masing. Mekanisme liberalisasi suatu bidang jasa di AFAS dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi negara anggota asean. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (*Pre-agreed flexibility*) dan penerapan formula ASEAN minus X, yaitu ketika dua negara atau lebih dapat melakukan liberalisasi atas sector jasa yang disepakati bersama, sedangkan Negara-negara lain dapat menyusul setelah mereka siap.hal ini juga dapat kita lihat dalam negosiasi tiap paket afasnya. Setiap negara hanya diberikan target untuk meliberalisasi sejumlah komitmen, baik dari segi jumlah, presentasi modal asing dan sebagainya dalam perundingan tersebut, namun hanya menargetkan dan tidak ada aturan yang bersifat paksaan untuk memenuhi target tersebut, dimana hal ini bertujuan agar negara negara anggota dapat mempersiapkan terlebih dahulu sektor yang ingin diajukannya.

Kemudian mekanisme AFAS dilaksanakan dengan melaksanakan serangkaian negosiasi dibawah ASEAN *Cordinating Committee on Service* (CCS), yang mengkordinasi kan 6 kelompok kerja sektor jasa, yaitu bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, parawisata, serta telekomunuikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-masing kementerian yang menangani sektor tersebut. Kemudian negosiasi negosiasi tersebut dibentuk kedalam sebuah komitmen *schedule of commitmen* yang saat ini telah memasuki negosiasi AFAS 8. Meskipun demikian, proses negosiasi kerap berlangsung lama dikarenakan rumitnya negosiasi akibat terkait dengan kesiapan masing-masing Negara untuk membuka sektor jasa mereka, sehingga kerap target waktu yang dicanangkan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Sejak *Asean Framework Agreement on service* (AFAS) disepakati pada tahun 1995, telah berhasil disepakati 7 protokol untuk melaksanakan tujuh paket komitmen AFAS, dengan pola liberalisasi berdasarkan 4 moda distribusi dalam perdagangan jasa.

Komitmen yang diberikan oleh negara-negara Asean terhadap perundingan AFAS dari tahun ke tahun memang semakin bertambah jumlah sektor dan subsektor yang dimasukkan. Akan tetapi liberalisasi untuk moda 3 dan 4 ternyata masih sesuatu yang sulit dilakukan oleh negara-negara Asean. Untuk moda 1 dan 2 memang terlihat negara-negara Asean dalam komitmen AFAS telah dibuka seluas luasnya. Hal ini terlihat dari komitmen yang diajukan oleh negara negara Asean lebih dari 95% telah dikomitmenkan

None secara penuh. Namun untuk moda 3 dan 4 masih dengan pembatasan pembatasan, baik dalam bentuk komitmen *Unbound*, maupun *bound with limitation*.

3. Bila kita melihat nilai ekspor perdagangan jasa, sebagai indikator perkembangan industri dan produksi jasa dalam negeri, maka kita akan menemukan bahwa bahwa pada tahun 2007 nilai kontribusi sektor jasa terhadap PDB Indonesia kurang lebih mencapai 43%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan jasa di Indonesia berkembang cukup pesat dan berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, akan tetapi laporan triwulan ke 3 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia¹⁷⁴, disebutkan bahwa neraca perdagangan jasa Indonesia masih mengalami defisit sebesar USD2,4 Miliar bila dibandingkan dengan impor jasa kita. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri jasa dalam negeri masih tertinggal dan masih harus berjuang keras bersaing dengan penyedia jasa asing ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia

B. SARAN

1. Setelah diberlakukannya kesepakatan kesepakatan dalam negosiasi AFAS, maka untuk meminimalisir dampak perbedaan tarif yang didapat oleh Negara-negara non ASEAN, maka ASEAN perlu mengakomodasi Negara-negara yang berada diluar konteks ASEAN, dengan semakin memperbanyak kerjasama antara ASEAN dengan Negara-negara mitra

¹⁷⁴ Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan III-2012, 2012, Bank Indonesia, Jakarta, hal 9

diluar ASEAN. Kerjasama External semisal *Agreement on Trade in Service (TIS) under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and China*, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Hendaknya perjanjian seperti ini di perbanyak dengan calon mitra potensia ASEAN.

2. Untuk penerapan prinsip dan mekanisme AFAS, pada pelaksanaan prinsip AFAS, Negara Negara ASEAN agar lebih aktif untuk memperbaiki sektor jasa dalam negeri mereka agar mereka secara bertahap dapat mengurangi jumlah MFN list yang diajukan dalam komitmen MFN AFAS mereka. Kemudian dalam pelaksanaan mekanisme AFAS, hendaknya Negara-negara ASEAN lebih berpartisipasi Aktif untuk lebih berusaha dalam memenuhi semua target tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam melakukan liberalisasi berdasarkan mekanisme-mekanisme AFAS yang telah diatur, agar pelaksanaan mekanisme yang telah diatur sebelumnya dapat berjalan dengan lebih efektif.
3. Kemudian untuk bersaing dengan penyedia jasa asing, maka satu satunya hal yang harus dilakukan adalah dengan mempersiapkan sektor-sektor jasa yang akan diliberalisasi dengan sebaik mungkin. Sektor-sektor yang diliberalisasi harus mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pemerintah, baik berupa dukungan pengembangan sektor jasa secara finansial dan modal, maupun dukungan dengan aturan dan kebijakan yang pro terhadap peningkatan produksi dan penyediaan jasa dalam negeri.

Daftar Pustaka

Sumber dari buku-buku

- A Ball, Donald (dkk).2004. *Bisnis Internasional*, Salemba Empat.Jakarta
- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- . 2005. *Penyelesaian Sengketa dagang Dalam WTO*. Cv Mandar Maju: Bandung
- Adolf , Huala dan A. Chandrawulan.1995. *Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Arifin, R. Winantyo (dkk)(ed).2007. *Integrasi keuangan dan moneter di Asia Timur: peluang dan tantangan bagi Indonesia*. PT Elex Media Komputindo., Jakarta
- Arifin, Sjamsul (dkk). 2004. *Kerja sama perdagangan Internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*.PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Budiman, Aida s, (Dkk).2008. *Masyarakat Ekonomi Asean 2015* . PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009. *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*: Jakarta
- Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2011. *ASEAN Selayang Pandang*: Jakarta
- Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*. Jakarta
- Hadiwinata, Bob Sugeng.2002.*Politik Bisnis Internasional*, Kanisius media, Yogyakarta
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO*. PT Refika Aditama: Bandung
- Sood, Muhammad. 2011. *Hukum perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada,,: Jakarta

- Kartadjoemena, H.S. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta
- , 2000. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta
- , 2002. *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan)*. Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Grasindo. Jakarta
- Priyono, Joko. 2010. *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*. Universitas Diponegoro Press. Semarang
- Rudy, T May. 2002. *Bisnis Internasional Teori Aplikasi dan Operasional*, Refika Aditama. Jakarta
- Soesastro, Hadi (ed). 2000. *A New ASEAN in a New Millenium*. Centre for Strategic and International Student: Jakarta
- Suherman, Ade Manan. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Syahmin A.K. 2006. *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Tambunan, Tulus TH. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia. Bogor
- The ASEAN Secretariat, 2009, *ASEAN Integration in Services*, ASEAN Secretariat, Jakarta
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Andy. Yogyakarta
- Uhulima, C.P.F L. 1997. *ASEAN Menuju Postur BARU*. Centre for Strategic and International Student: Jakarta
- van Den Bossche, Peter (dkk). 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta,

Karya ilmiah, laporan dan Publikasi ilmiah lainnya

- Arvin panagariya “the regionalism debate”: an overview”, The World Economy journal, Volume 22, Issue 4 June 1999
- Bank Indonesia.2012. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan III-2012, 2012, , Jakarta
- Basuki Antariksa. 2010. *Pengaruh Liberalisasi perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia*. Makalah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Egger,Peter dan Rainer Lanz. *The Determinants of GATS Commitment Coverage*, *The World Economy*, Vol 31, Issue 12, December 2008
- Sumanti, Silvi Ch. Perkembangan Asean Framework Agreement on service dan Kesiapan Indonesia, Buletin KPI, Kementerian Perdagangan, Edisi 001/KPI/BUL/2011
- Sunardi Sri. 2012. Strategi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi jasa Telekomunikasi dalam kerangka Asean Framework Agreement on Service (AFAS),Tesis, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta
- Tan Tai Hiong.2004.ASEAN SECRETARIAT. Towards Free Flow of Trade in Service: The ASEAN Experience. Publikasi WTO/ESCAP Workshop On Trade in Service Negotiation di Dhaka, Bangladesh
- World Bank .2004. Reforming Infrastructure: Privatization, regulation and competition. Washington D.C

Website

- <http://www.worldtradelaw.net/uragreements/gats.pdf>,
- http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
- <http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-liberalisme/189-critical-review--regionalisme-ekonomi>
- <http://www.aseansec.org/6636.htm>
- http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm
- <http://library.thinkquest.org/07aug/00782/id/remittance.html>

